HARIAN ACEH INDONESIA

TEBAL
28 Hal
WWW.HARIANACEH.CO.ID

SENIN, 23 NOVEMBER 2026 | HARIANACEH.co.id | WWW.HARIANACEH.CO.ID · EDISI NO. 16

NASIONAL

Yusril Ihza Mahendra: Kalau Diperlukan, Penyidik Bisa Periksa Jokowi

Oleh Redaksi · 23 Nov, 21.57 WIB



BANDA ACEH - Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan penyidik bisa saja memeriksa mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pengembangan kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.Pernyataan itu disampaikan Yusril dalam wawancara dengan Tempo di kantornya di Trinity Tower, Jakarta, pada Rabu, 18 November 2026.

Menurut Yusril, pemeriksaan terhadap Jokowi tetap harus didasarkan pada temuan pemeriksaan dan bukti yang sudah dihimpun penyidik.

"Ya. Bisa saja penyidik memeriksa Jokowi kalau diperlukan. Tentunya ini harus dilakukan berdasarkan temuan hasil pemeriksaan dan bukti yang sudah dihimpun. Jadi penyidik memerlukan suatu klarifikasi atau penjelasan dari Jokowi," kata Yusril.

Yusril mengungkapkan, Polri telah menetapkan empat tersangka dalam kasus penyadapan tersebut. Salah satunya adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang diduga menjadi penerima manfaat penyadapan terhadap Presiden Prabowo.

Ia menyebut, polisi kini tengah mengembangkan kasus penyadapan itu ke arah dugaan tindak pidana makar. Polri disebut telah menerbitkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dugaan makar.

"Setelah menetapkan mantan Kepala Polri, Listyo Sigit, sebagai tersangka penyadapan, polisi memeriksa sejumlah saksi …

Selengkapnya di halaman 2 »

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Weton Pasangan Prabowo-Sugiono vs Prabowo-Amran Sulaiman, Mana yang Lebih Cocok?



BANDA ACEH - Di tengah proses usulan dua nama calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka, yakni Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menko PMK Sugiono, muncul sudut pandang budaya Jawa melalui perhitungan weton.

Selengkapnya di halaman 3 »

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Diusulkan Prabowo Jadi Cawapres, Ini Profil dan Rekam Jejak Sugiono



BANDA ACEH -Profil Sugiono menjadi sorotan setelah Presiden Prabowo Subianto mengusulkan namanya sebagai calon wakil presiden (cawapres), bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Sugiono saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) RI setelah diangkat Prabowo pada 1 Oktober 2026.

Selengkapnya di halaman 4 »

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

DALAM EDISI INI

NASIONAL 2
ACEH 17
EKONOMI 19
HIBURAN 21
LINGKUNGAN 23
Aneka Berita 25

NASIONAL

Tiga Skenario Makar Listyo Sigit dan 5 Petinggi Polri



BANDA ACEH -- Bareskrim Polri mengungkap konstruksi perkara dugaan tindak pidana makar menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan lima perwira menengah polisi lainnya sebagai tersangka.

Selengkapnya di halaman 2 »

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Plus-Minus Amran Sulaiman dan Sugiono sebagai Calon Wakil Presiden Prabowo



BANDA ACEH – Presiden Prabowo Subianto resmi menyerahkan dua nama calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, yaitu Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono.

Selengkapnya di halaman 3 »

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

38 BERITA

NASIONAL

Yusril Ihza Mahendra: Kalau Diperlukan, Penyidik Bisa Periksa Jokowi

Oleh Redaksi · 23 Nov, 21.57 WIB



BANDA ACEH - Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan penyidik bisa saja memeriksa mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pengembangan kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.Pernyataan itu disampaikan Yusril dalam wawancara dengan Tempo di kantornya di Trinity Tower, Jakarta, pada Rabu, 18 November 2026.

Menurut Yusril, pemeriksaan terhadap Jokowi tetap harus didasarkan pada temuan pemeriksaan dan bukti yang sudah dihimpun penyidik.

“Ya. Bisa saja penyidik memeriksa Jokowi kalau diperlukan. Tentunya ini harus dilakukan berdasarkan temuan hasil pemeriksaan dan bukti yang sudah dihimpun. Jadi penyidik memerlukan suatu klarifikasi atau penjelasan dari Jokowi,” kata Yusril.

Yusril mengungkapkan, Polri telah menetapkan empat tersangka dalam kasus penyadapan tersebut. Salah satunya adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang diduga menjadi penerima manfaat penyadapan terhadap Presiden Prabowo.

Ia menyebut, polisi kini tengah mengembangkan kasus penyadapan itu ke arah dugaan tindak pidana makar. Polri disebut telah menerbitkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dugaan makar.

“Setelah menetapkan mantan Kepala Polri, Listyo Sigit, sebagai tersangka penyadapan, polisi memeriksa sejumlah saksi untuk pengembangan kasus. Dari mereka, polisi menemukan bukti atau petunjuk mengenai adanya dugaan makar,” ujar Yusril.

Menurut Yusril, salah satu isi penyadapan yang terungkap berkaitan dengan penggantian Kapolri. Polisi disebut telah menemukan bukti-bukti bagaimana Presiden Prabowo kesulitan mengganti Kapolri pada waktu itu.

“Soal membuat Presiden Prabowo tidak berdaya serta tidak mampu menjalankan tugasnya, buktinya sudah ada, yakni soal penggantian Kapolri,” kata Yusril.

Ia menjelaskan, makar dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di antaranya adalah membunuh presiden, membuat presiden menjadi lumpuh atau tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, menggulingkan pemerintah, serta memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Namun, Yusril menegaskan, apakah perbuatan tersebut sudah bisa dikategorikan makar masih harus menunggu hasil pemeriksaan penyidik.

“Tunggu hasil pemeriksaan,” ujarnya.

Yusril juga menyebut ada informasi Listyo Sigit cs menggerakkan massa dalam sejumlah unjuk rasa yang memprotes pemerintah.

“Ada informasi seperti itu,” kata Yusril.

Ketika ditanya tujuannya, Yusril menjawab singkat.

“Membuat kerusuhan. Detailnya saya enggak tahu. Yang jelas ada program Prabowo yang dihambat kegiatannya,” ujarnya.

Salah satu program yang disebutnya adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Yusril, polisi sedang menyelidiki bagaimana program Prabowo banyak …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Beathor Suryadi: Gerakan Makar Jenderal LSP Terasa Hambar Jika Tidak Melibatkan Jokowi

Oleh Redaksi · 22 Nov, 22.19 WIB

BANDA ACEH - Aktivis senior sekaligus mantan Ketua ProDem ke-4, Beathor Suryadi, mempertanyakan dugaan keterkaitan Joko Widodo (Jokowi) dalam gerakan makar yang menyeret nama Jenderal LSP. Menurutnya, pengungkapan kasus tersebut akan terasa tidak utuh apabila penyidik tidak menelusuri kemungkinan adanya keterlibatan pihak-pihak lain, termasuk Jokowi.Beathor menilai, Jenderal LSP bukanlah sosok yang dikenal sebagai pemain Politik yang memiliki ambisi untuk merebut kekuasaan. Karena itu, ia mempertanyakan apa sebenarnya tujuan di balik dugaan rencana gerakan makar tersebut.

“Jenderal LSP bukan orang politik dan tidak memiliki ambisi untuk berkuasa. Lantas, untuk apa LSP merencanakan gerakan itu?” kata Beathor dalam keterangannya, Ahad (22/11/2026).

Ia juga menyoroti pernyataan Jenderal Suyudi, menurut Beathor, disampaikan belum genap 20 hari setelah penangkapan, bahwa gerakan makar tersebut tidak melibatkan Jokowi.

Pernyataan itu justru memunculkan pertanyaan bagi Beathor. Ia mempertanyakan dasar penyidik menyimpulkan tidak adanya keterlibatan Jokowi, sementara proses pengungkapan perkara masih perlu mendalami berbagai kemungkinan dan hubungan antarpihak.

Beathor kemudian mengaitkan persoalan tersebut dengan posisi Jenderal LSP sebagai Kepala Kantor Staf Presiden (KSP). Menurutnya, salah satu fungsi penting jabatan tersebut adalah melihat, mendengar, dan mencatat berbagai perkembangan yang terjadi di lingkungan pemerintahan untuk mendukung tugas Presiden.

Atas dasar itu, Beathor mempertanyakan apakah penyidik telah menelusuri seluruh kemungkinan komunikasi, koordinasi, dan hubungan yang berkaitan dengan dugaan gerakan tersebut.

Di sisi lain, ia turut menyinggung pernyataan Jenderal Suyudi yang menyebut tidak terdapat persaingan pribadi antara dirinya dan Jenderal LSP.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Tiga Skenario Makar Listyo Sigit dan 5 Petinggi Polri

Oleh Redaksi · 23 Nov, 21.46 WIB



BANDA ACEH -- Bareskrim Polri mengungkap konstruksi perkara dugaan tindak pidana makar menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan lima perwira menengah polisi lainnya sebagai tersangka. Dugaan makar tersebut terdiri atas tiga tahapan, yakni permufakatan, persiapan, dan permulaan pelaksanaan.Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menjelaskan, tahap pertama berupa permufakatan diduga berlangsung melalui rapat pada 3 Oktober 2024, ketika Presiden Prabowo Subianto belum dilantik. Rapat tersebut dipimpin tersangka SU dan dihadiri EH, ASN, TK, serta sejumlah anggota tim lainnya.

Dalam rapat itu, dibahas sejumlah pointer disusun atas perintah tersangka ASN. Materinya mencakup analisis arah pemerintahan ke depan serta pemetaan tokoh-tokoh dinilai berpengaruh. Penyidik juga menemukan sejumlah dokumen dalam laptop milik seorang saksi diduga berkaitan dengan hasil rapat tersebut.

Dokumen itu memuat analisis krisis, analisis pemakzulan atau impeachment, analisis isu kebijakan pemerintah, analisis calon Kapolri, hingga dokumen berjudul atau bertema cap makar. Selain itu, ditemukan analisis mengenai peristiwa krisis 1998, termasuk mekanisme kejadian dan proses mundurnya Presiden Soeharto.

"Kami temukan ya dalam melakukan pemeriksaan saksi serta alat bukti dan petunjuk, ditemukan bahwa pada tanggal 3 Oktober 2024, saat presiden terpilih belum dilantik, dilaksanakan rapat yang dipimpin oleh SU dengan dihadiri oleh EH, ASN, dan TK beserta tim lainnya," kata Asep dalam konferensi pers di gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (23/11/2026).

Penyadapan Sejumlah Tokoh

Tahap kedua adalah persiapan. Menurut Asep, tahap ini merupakan tindak lanjut dari arahan yang dibahas dalam rapat permufakatan pada 3 Oktober 2024.

Dalam tahap tersebut, diduga dilakukan penyadapan terhadap sejumlah tokoh yang sebelumnya telah dipetakan. Kegiatan penyadapan disebut berlangsung sejak masa jabatan Kabagmon dijabat oleh EH hingga ASN.

Asep mengungkapkan, tersangka ASN diduga menentukan target penyadapan. Target tersebut kemudian diserahkan kepada personel untuk diolah dan dianalisis menggunakan sistem LIMS, PLX, dan DFS.

Hasil pengolahan tersebut selanjutnya menjadi produk analisis yang digunakan dalam rangkaian kegiatan berikutnya.

Surveillance hingga Serangan Siber

Tahap ketiga merupakan permulaan pelaksanaan. Asep menyebut, hasil penyadapan diduga ditindaklanjuti dengan kegiatan surveillance atau pengawasan terhadap sejumlah pejabat negara, pimpinan lembaga negara, dan tokoh Politik. Kegiatan surveillance tersebut diduga dilakukan oleh tersangka TK atas perintah tersangka ASN.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

DeMul Ikut Hadiri Pertemuan Elite Parpol dengan Prabowo di Hambalang

Oleh Redaksi · 22 Nov, 20.38 WIB

BANDA ACEH - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ikut dalam pertemuan sejumlah elite partai Politik (parpol) koalisi dengan Presiden Prabowo Subianto di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (22/11/2026).Dedi hadir bersama sejumlah elite Partai Gerindra di tengah persiapan pengajuan dua nama calon wakil presiden (cawapres) kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.

Pertemuan berlangsung di Padepokan Garudayaksa, Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, sejak Minggu (22/11/2026) siang.

Selain Dedi Mulyadi, sejumlah tokoh yang hadir yakni Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dan Ketua Komisi IV DPR RI yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Titiek Soeharto.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Plus-Minus Amran Sulaiman dan Sugiono sebagai Calon Wakil Presiden Prabowo

Oleh Redaksi · 23 Nov, 18.53 WIB



BANDA ACEH – Presiden Prabowo Subianto resmi menyerahkan dua nama calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, yaitu Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono. Sidang Paripurna MPR untuk memilih salah satu dari keduanya dijadwalkan 11 Desember 2026, setelah Gibran mengundurkan diri pada 12 November karena alasan pribadi serta dinamika publik terkait persyaratan pencalonan.Nasional.kompasPrabowo menekankan pertimbangan prestasi, pengabdian, kesetiaan kepada negara, serta keyakinan bahwa keduanya mampu bekerja dengan baik. Ia juga menegaskan bahwa banyak nama lain memenuhi syarat, namun konstitusi hanya mengizinkan pengusulan dua nama dengan waktu terbatas setelah konsultasi dengan partai koalisi dan Dewan Pembina Gerindra.

Berikut analisis plus-minus masing-masing figur jika terpilih sebagai wapres sisa masa jabatan 2024-2029.

Andi Amran Sulaiman: Teknokrat Pertanian dengan Modal Bisnis Kuat

Plus:

Amran (lahir 27 April 1968 di Bone, Sulawesi Selatan) memiliki rekam jejak panjang di sektor pertanian. Lulusan S1-S3 Ilmu Pertanian Universitas Hasanuddin, ia pernah menjadi Mentan era Jokowi (2014-2019), kembali diangkat 2023 menggantikan Syahrul Yasin Limpo, dan kini merangkap Kepala Badan Pangan Nasional. Prestasi swasembada pangan serta pendekatan hands-on terhadap petani dan pemberantasan mafia pangan menjadi modal utama. Latar belakang pengusaha sukses sebagai pendiri Tiran Group (konglomerat agribisnis dan pertambangan di Indonesia Timur) serta kekayaan sekitar Rp1,7 triliun (LHKPN 2025) dianggap menunjukkan kemandirian finansial dan kemampuan eksekutif. Asal dari luar Jawa juga bisa memperkuat representasi regional.Nasional.

Minus:

Sejumlah kontroversi membayangi. Gugatan perdata Rp200 miliar terhadap Majalah Tempo terkait laporan investigasi “Poles-Poles Beras Busuk” dinilai sejumlah pihak sebagai ancaman terhadap kebebasan pers. Kritik Komnas Perempuan muncul atas pernyataan yang dinilai mengandung stereotip gender. Polemik tata kelola pangan juga mencuat, termasuk temuan beras rusak, sentralisasi kewenangan (Mentan merangkap Kepala Bapanas), dan sorotan Ombudsman. Potensi konflik kepentingan dari gurita bisnis Tiran Group tetap menjadi perhatian, meski Amran mengklaim memisahkan urusan pribadi dan jabatan.

Sugiono: Anak Ideologis Prabowo dengan Pengalaman Diplomatik dan Partai

Plus:

Sugiono (lahir 11 Februari 1979 di Takengon, Aceh) dikenal sebagai “anak ideologis” Prabowo. Lulusan SMA Taruna Nusantara dan Norwich University (AS), ia sempat berdinas singkat di Kopassus sebelum menjadi sekretaris pribadi Prabowo dan terlibat …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Weton Pasangan Prabowo-Sugiono vs Prabowo-Amran Sulaiman, Mana yang Lebih Cocok?

Oleh Redaksi · 23 Nov, 18.38 WIB



BANDA ACEH - Di tengah proses usulan dua nama calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka, yakni Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menko PMK Sugiono, muncul sudut pandang budaya Jawa melalui perhitungan weton. Perhitungan ini didasarkan pada hari dan pasaran kelahiran menurut kalender Jawa (Primbon), yang sering digunakan untuk menafsirkan karakter dan kecocokan hubungan. Perlu digarisbawahi bahwa tafsir weton bersifat budaya tradisional, bukan penentu kelayakan Politik atau kepastian masa depan.

Data Weton Berdasarkan Tanggal Lahir

• Prabowo Subianto (17 Oktober 1951): Weton Rabu Pon, neptu 14 (Rabu = 7 + Pon = 7). Menurut Primbon, weton ini dikaitkan dengan filosofi Lakuning Rembulan — berwibawa, tenang, cerdas, tegas, memiliki jiwa kepemimpinan, sekaligus bisa keras kepala dan ambisius.

• Sugiono (11 Februari 1979): Weton Minggu Pahing, neptu 14 (Minggu = 5 + Pahing = 9). Karakter yang sering dikaitkan: cerdas, teliti, optimis, berwawasan luas, bertanggung jawab, namun cenderung pendiam dan sensitif.

• Andi Amran Sulaiman (27 April 1968): Weton Sabtu Kliwon, neptu 17 (Sabtu = 9 + Kliwon = 8). Dikenal berwibawa, berjiwa kepemimpinan, teguh pada prinsip, dermawan (Lakuning Bumi), pekerja keras, namun bisa keras kepala dan sulit menerima kritik.

Perhitungan Kecocokan (Jumlah Neptu)

Metode umum Primbon Jawa menjumlahkan neptu kedua pihak, lalu menafsirkan totalnya ke dalam kategori seperti Pegat, Ratu, Jodoh, Topo, Tinari, Padu, Sujanan, atau Pesthi. Hasilnya bervariasi antar sumber, sehingga berikut adalah salah satu pemetaan yang sering dipakai:

Catatan tafsir:

- Total 28 (Prabowo-Sugiono) sering masuk kategori Topo (berjuang dulu baru stabil) atau Pegat (perlu kehati-hatian ekstra).

- Total 31 (Prabowo-Amran) sering dikaitkan dengan Sujanan (waspada terhadap gangguan eksternal) atau Topo.

Ulasan Karakter dan Kecocokan

Prabowo-Sugiono (total 28):

Kedua pihak memiliki neptu sama (14). Dalam pandangan budaya, pertemuan weton dengan energi serupa bisa saling menguatkan dalam hal kecerdasan dan tanggung jawab, tetapi berisiko “bersaing” secara karakter karena sifat tegas Prabowo (Rabu Pon) bertemu dengan sisi pendiam-cerdas Sugiono (Minggu Pahing). Kategori Topo mengisyaratkan hubungan kerja yang membutuhkan penyesuaian di awal, namun berpotensi stabil jika ada komunikasi baik. Ini cocok dengan citra Sugiono sebagai kader Gerindra yang loyal dan berpengalaman di DPR serta kementerian.

Prabowo-Amran (total 31):

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Aliran Uang Rp500 Juta ke Total Politik Terungkap di Sidang Korupsi Kuota Haji

Oleh Redaksi · 22 Nov, 20.21 WIB

BANDA ACEH — Terdakwa kasus dugaan korupsi pengelolaan kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag) periode 2023–2024, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, mengungkapkan adanya penyerahan uang sebesar Rp500 juta kepada staf media Total Politik. Dana tersebut disebut berkaitan dengan kebutuhan kampanye haji dan kegiatan menjelang pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Haji 2024.Pengakuan itu disampaikan Gus Alex kepada wartawan saat jeda persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2026).

Menurut Gus Alex, aliran dana bermula ketika dirinya menerima proposal kebutuhan Total Politik dari Wibowo Prasetyo dan Muhammad Nuruzzaman. Keduanya diketahui merupakan staf khusus mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

”Ya, jadi menjelang pansus itu saya dikirimin proposal oleh Mas Wibowo Prasetyo dan Muhammad Nuruzzaman tentang kebutuhan Total Politik,” kata Gus Alex.

Setelah menerima proposal tersebut, ia mengupayakan dana Rp500 juta dan menyerahkannya kepada Khumaidi, staf Wibowo Prasetyo.

”Atas hal tersebut kemudian saya mengupayakan saya serahkan dana sejumlah Rp500 juta kepada namanya Khumaidi. Khumaidi itu stafnya Mas Bowo,” ujarnya.

Meski mengakui menyerahkan uang tersebut, Gus Alex mengaku tidak mengetahui secara rinci teknis kebutuhan Total Politik yang tercantum dalam proposal. Ia hanya memahami dana itu dikaitkan dengan kampanye haji dan agenda menjelang pembentukan Pansus Haji.

”Nah, untuk lebih tahu lebih detail terkait Total Politik keperluan itu apa, itu saya tidak tahu itu. Sebenarnya itu apa itu saya tidak paham. Tapi yang jelas waktu itu terkait dengan kampanye haji dan menjelang pansus intinya,” tuturnya.

Asal-Usul Dana dan Pengembalian

Dalam persidangan, penasihat hukum mendalami asal-usul uang Rp500 juta yang diserahkan kepada Khumaidi tersebut, termasuk menanyakan apakah dana itu berasal dari seseorang bernama Syauqi.

Gus Alex membenarkan uang tersebut berasal dari Syauqi. Namun, ia mengklaim dana itu pada akhirnya telah dikembalikan kepada yang bersangkutan.

”Akadnya itu memberikan. Tapi kemudian saya mengembalikan pada akhirnya uang tersebut kepada Syauqi. Uang itu Rp500 juta dari Syauqi itu saya serahkan ke Khumaidi, stafnya Wibowo Prasetyo atas permintaan proposal Total Politik,” kata Gus Alex.

Rangkaian keterangan ini memunculkan sejumlah poin yang perlu diuji lebih lanjut di persidangan, mulai dari asal dana dari Syauqi, penyerahan melalui Khumaidi, hingga tujuan penggunaannya.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Prabowo Kumpulkan Petinggi Partai Koalisi di Hambalang, Bahas Cawapres

Oleh Redaksi · 22 Nov, 20.19 WIB

BANDA ACEH -Presiden sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, mengumpulkan sejumlah petinggi dan kader partai koalisi di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu, 22 November 2026.

Pertemuan tersebut dikabarkan berkaitan dengan pembahasan dua nama calon Wakil Presiden (Cawapres).

Sejumlah petinggi dan kader Gerindra tampak mulai berdatangan ke Hambalang sejak siang hari. Mereka di antaranya Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Mochamad Iriawan, Fadli Zon, Irfan Yusuf, Maruarar Sirait serta Dahnil Anzar Simanjuntak juga tiba di lokasi.

Pada Minggu pagi, Bahlil mengungkap ada rencana pertemuan dengan Presiden hari ini untuk membahas proses penyusunan dua nama calon Wakil Presiden yang nantinya diserahkan Presiden kepada MPR.

Agenda itu rencananya melibatkan empat partai pengusung, yakni Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat, serta partai …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Diusulkan Prabowo Jadi Cawapres, Ini Profil dan Rekam Jejak Sugiono

Oleh Redaksi · 23 Nov, 19.20 WIB



BANDA ACEH -Profil Sugiono menjadi sorotan setelah Presiden Prabowo Subianto mengusulkan namanya sebagai calon wakil presiden (cawapres), bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Sugiono saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) RI setelah diangkat Prabowo pada 1 Oktober 2026.

Nama Sugiono belakangan masuk dalam bursa calon pengganti Gibran Rakabuming Raka yang berhenti dari jabatannya pada 12 November 2026. Sosok politikus Partai Gerindra tersebut memiliki rekam jejak panjang, mulai dari karier militer hingga menduduki sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan partai Politik.

Lantas, bagaimana profil Sugiono, termasuk riwayat pendidikan dan perjalanan kariernya?

Profil dan Riwayat Pendidikan Sugiono

Dikutip dari laman resmi Partai Gerindra yang diakses pada Senin (23/11/2026), Sugiono lahir dan besar di Aceh. Ia mengawali pendidikan formal di SDN 1 Takengon, kemudian melanjutkan sekolah di SMPN 3 Banda Aceh.

Setelah itu, Sugiono diterima di SMA Taruna Nusantara, Magelang, Jawa Tengah. Selepas menyelesaikan pendidikan menengah, Sugiono melanjutkan studi ke Amerika Serikat. Ia meraih gelar Bachelor of Science di bidang Computer Science dari Norwich University.

Sugiono juga disebut pernah menempuh pendidikan di Norwich Military Academy, Amerika Serikat. Ia diketahui sempat tinggal dan bekerja di Rhode Island.

Selain pendidikan sipil, Sugiono mengikuti pendidikan calon perwira TNI melalui Sekolah Perwira Prajurit Karier (Semapa PK) di Akademi Militer, Magelang. Ia menyelesaikan pendidikan tersebut pada 2002 dan dilantik sebagai Letnan Dua di Korps Infanteri.

Rekam Jejak Karier Sugiono

Sebelum terjun ke dunia politik, Sugiono mengawali perjalanan kariernya di militer. Ia pernah bertugas sebagai perwira Infanteri di Komando Pasukan Khusus (Kopassus) pada periode 2002–2004.

Setelah meninggalkan dinas militer, Sugiono menjadi sekretaris pribadi Prabowo Subianto. Kedekatan tersebut kemudian membawanya terlibat dalam proses awal pendirian Partai Gerindra pada 2008.

Sugiono menjadi salah satu kader yang mengikuti perjalanan partai sejak awal pembentukannya. Pada 2014, ia dipercaya menduduki posisi Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra.

Karier politik Sugiono semakin berkembang setelah terpilih sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Tengah I pada Pemilu 2019. Selama menjadi anggota DPR, ia dipercaya menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi I DPR RI.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Usut Laporan yang Menyeret Keluarga Jokowi, Mahfud MD Desak Prabowo Beri Sinyal ke KPK

Oleh Redaksi · 22 Nov, 20.16 WIB

BANDA ACEH - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mendesak Presiden Prabowo Subianto memberikan sinyal keberanian kepada aparat penegak hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Ia meminta KPK menindaklanjuti berbagai laporan dugaan korupsi yang menyeret sejumlah anggota keluarga mantan Presiden Joko Widodo secara transparan.

Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud saat berbincang dengan pakar hukum tata negara Refly Harun dalam tayangan di kanal YouTube Refly Harun, Sabtu (21/11/2026).

Menurut Mahfud, perubahan situasi politik dan hukum saat ini seharusnya menjadi momentum untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Ia menilai selama ini muncul kesan di tengah masyarakat bahwa KPK masih ragu atau takut menangani laporan tertentu.

"Keberanian yang harus dinyatakan oleh pemerintah dalam hal ini Presiden untuk mengatakan kepada KPK, 'kamu sekarang enggak usah takut pada siapa pun'. Kan kesan publik sekarang KPK itu takut," ujar Mahfud.

Mahfud secara khusus menyoroti sejumlah laporan masyarakat yang telah disampaikan kepada KPK, tetapi belum menunjukkan perkembangan signifikan. Ia menyinggung laporan yang pernah diajukan aktivis sekaligus dosen Ubedilah Badrun serta persoalan "Blok Medan" yang sempat muncul dalam persidangan.

Menurut Mahfud, laporan-laporan tersebut berkaitan dengan sejumlah nama dalam keluarga Joko Widodo, termasuk Gibran Rakabuming Raka, Kaesang Pangarep, Bobby Nasution, hingga Jokowi sendiri.

"Mumpung sekarang sedang terjadi perubahan, kalau mau sungguh-sungguh menegakkan hukum, Pak Prabowo bisa menyatakan ke KPK. Itu laporan-laporan Badrun sudah berkali-kali enggak pernah dijawab tidak, tapi tidak pernah di-follow up. Menyangkut Bobby yang Blok Medan yang disebut di pengadilan, kemudian menyangkut Kaesang, menyangkut Gibran, dan menyangkut Pak Jokowi," kata Mahfud.

Ia menilai KPK perlu memberikan penjelasan kepada publik mengenai perkembangan laporan-laporan tersebut. Menurutnya, apabila proses hukum tidak menemukan bukti yang cukup, hasilnya juga harus disampaikan secara terbuka agar masyarakat memperoleh kejelasan.

"Coba itu dijelaskan kepada publik agar kita bisa belajar untuk masa depan, jangan melakukan hal-hal yang seperti itu lagi. Seumpama bersih, untuk masa depan boleh orang melakukan seperti itu karena tidak apa-apa, tidak ditemukan bukti di pengadilan misalnya. Nah, itu cara berkeadaban menurut saya, berkeadaban di dalam berhukum dan berdemokrasi," tambahnya.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Profil Andi Amran Sulaiman, Mentan yang Diusulkan Jadi Cawapres Prabowo

Oleh Redaksi · 23 Nov, 19.16 WIB



BANDA ACEH -Profil Andi Amran Sulaiman menjadi sorotan setelah Presiden Prabowo Subianto mengusulkan namanya sebagai salah satu calon wakil presiden (cawapres) kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Saat ini, Amran menjabat sebagai Menteri Pertanian (Mentan) dalam Kabinet Merah Putih.

Andi Amran Sulaiman dikenal memiliki latar belakang pendidikan di bidang pertanian serta pengalaman panjang sebagai pengusaha dan pejabat pemerintahan. Ia juga pernah menduduki posisi Menteri Pertanian pada era Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelum kembali dipercaya mengisi jabatan tersebut pada pemerintahan Prabowo.

Profil dan Biodata Andi Amran Sulaiman

Andi Amran Sulaiman lahir di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, pada 27 April 1968. Ia menempuh pendidikan tinggi di Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar, dengan mengambil bidang Ilmu Pertanian.

Amran meraih gelar sarjana (S1) pada 1993. Ia kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang magister (S2) yang diselesaikan pada 2003 dan doktor (S3) pada 2012 di universitas yang sama.

Selain memiliki latar belakang akademis di bidang pertanian, Amran juga memperoleh sejumlah penghargaan atas kiprahnya di sektor pertanian dan kewirausahaan. Pada 2007, ia menerima Tanda Kehormatan Satyalancana Pembangunan di Bidang Wirausaha Pertanian dari Presiden RI.

Empat tahun kemudian, Amran memperoleh FKPTPI Award pada 2011 di Bali.

Karier dan Bisnis Andi Amran Sulaiman

Di luar aktivitasnya sebagai akademisi dan pejabat pemerintahan, Andi Amran Sulaiman dikenal sebagai pengusaha. Ia membangun dan mengembangkan 14 perusahaan yang tergabung dalam holding Tiran Group.

Perusahaan-perusahaan tersebut bergerak di berbagai sektor usaha, mulai dari pertambangan emas dan nikel, pabrik gula, distribusi semen, produksi pestisida, perkebunan kelapa sawit, hingga stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Amran juga diketahui memiliki hubungan keluarga dengan pengusaha Haji Isam, pemilik PT Jhonlin Agro Raya.

Pengalaman di bidang pertanian dan kewirausahaan menjadi salah satu latar belakang yang mengantarkan Amran ke pemerintahan. Pada 2014, Presiden Joko Widodo menunjuknya sebagai Menteri Pertanian dalam Kabinet Kerja periode 2014-2019.

Perjalanan Jabatan Andi Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian

Jabatan Menteri Pertanian yang pernah diemban Amran pada periode 2014-2019 kemudian dilanjutkan oleh Syahrul Yasin Limpo pada pemerintahan Jokowi periode berikutnya. Setelah sempat tidak menjabat, Amran kembali dipercaya menjadi Menteri Pertanian pada Oktober 2023.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Emak-Emak Geruduk DPR Besok, Desak Gibran Kembalikan Fasilitas Negara

Oleh Redaksi · 22 Nov, 18.10 WIB

BANDA ACEH - Emak-Emak Bergerak Lintas Provinsi berencana mendatangi Gedung DPR RI, Senin (23/11/2026) besok. Mereka menuntut Gibran Rakabuming Raka agar mengembalikan fasilitas negara yang pernah diterima selama menjabat sebagai wakil presiden.

Koordinator aksi, Merry alias Bunda Merry, mengatakan unjuk rasa sekaligus permintaan audiensi tersebut akan melibatkan emak-emak dari sejumlah daerah. Mereka berasal dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, hingga Sumatera Selatan.

Salah satu tuntutan yang akan disampaikan yakni mempertanyakan sikap DPR RI yang dinilai belum menindaklanjuti rencana penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) terkait polemik Gibran.

"Maka kami dari emak-emak bergerak lintas provinsi, nanti akan menyuarakan kami akan meminta DPR RI, mana suaranya kenapa HMP itu tidak jadi dilaksanakan," kata Merry dalam konferensi pers di Tebet …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Guntur Tuding Zulhas Bohong soal Nol Keracunan MBG Usai Penyadapan Dibongkar: Logika Anda Berbahaya!

Oleh Redaksi · 23 Nov, 17.53 WIB



BANDA ACEH – Politikus PDI Perjuangan M Guntur Romli melontarkan kritik keras terhadap Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas.

Ia menuding Zulhas menyampaikan informasi yang tidak benar ketika mengklaim tidak ada lagi kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama tiga pekan terakhir pascaterbongkarnya skandal penyadapan ilegal oleh Listyo Sigit Cs.

Guntur Romli, menuding pernyataan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut sebagai kebohongan publik bahkan kebohongan besar.

Menurut Guntur fakta di lapangan menunjukkan kasus dugaan keracunan setelah mengonsumsi makanan MBG masih terjadi di sejumlah daerah, meski kasus penyadapan sudah dibongkar.

Kritik itu disampaikan Guntur Romli melalui video dan unggahan di akun media sosial X miliknya, @GunRomli, Senin (23/11/2026).

Dalam unggahannya, Romli secara khusus membantah klaim Zulhas yang mengaitkan meredanya kasus keracunan MBG dengan terbongkarnya dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

"Kebohongan Zulhas: 'Tidak Ada Keracunan MBG Setelah Penyadapan Listyo Sigit Terbongkar'. Benarkah? Tentu tidak benar. Alias omongan Pak Zulhas bohong. Masih ada keracunan MBG. Mari kita cek," tulis Guntur Romli.

Melalui video tersebut, Romli membeberkan sejumlah kejadian dugaan keracunan MBG yang menurutnya masih berlangsung setelah kasus penyadapan mencuat ke publik.

Bagi Romli, klaim bahwa tidak ada lagi keracunan MBG tidak bisa begitu saja diterima ketika laporan kejadian di sejumlah daerah masih bermunculan.

Zulhas Kaitkan Meredanya Keracunan MBG dengan Kasus Penyadapan

Sebelumnya, Zulhas menjadi sorotan setelah menyampaikan pernyataan mengenai perkembangan program MBG dalam sebuah acara di Universitas Jember, Jawa Timur, Sabtu (21/11/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Zulhas mengaku merasakan situasi yang lebih tenang karena selama dua hingga tiga pekan terakhir tidak lagi mendengar laporan keracunan MBG.

Menariknya, ia menyandingkan kondisi tersebut dengan terbongkarnya kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah jenderal Polri.

"Beberapa minggu ini, 2-3 minggu ini agak enak setelah adanya penyadapan agak enak rasanya. Betul kan? Nggak ada lagi yang keracunan MBG, Pak," kata Zulhas.

Ketua Umum PAN itu mengaku heran karena sebelumnya laporan keracunan MBG kerap muncul dengan jumlah korban mencapai ratusan orang.

"Saya juga heran. Dulu setiap hari 100, 200 banyak betul ini yang keracunan. 200, 300 sekarang alhamdulillah sudah 3 minggu nggak ada, Pak. Aman," ujarnya

NASIONAL

Koalisi Kompak Terima Amran dan Sugiono Cawapres, Pengamat Ungkap Fakta di Balik Layar!

Oleh Redaksi · 23 Nov, 22.05 WIB



BANDA ACEH - Pengamat Politik Adi Prayitno mengungkapkan alasan tidak adanya penolakan dari partai-partai Politik di dalam koalisi pemerintah terhadap dua nama calon wakil presiden (cawapres) yang diajukan Presiden Prabowo Subianto kepada pimpinan MPR RI pada Senin sore (23/11/2026).Adi meyakini bahwa Prabowo telah mempertimbangkan pilihannya secara matang serta berkomunikasi dengan partai-partai koalisi sebelum mengajukan Andi Amran Sulaiman dan Sugiono sebagai dua cawapres pengganti Gibran Rakabuming Raka.

"Saya cukup meyakini bahwa pemilihan dua nama calon wakil presiden ini pastilah sudah dipertimbangkan secara signifikan oleh Pak Prabuwo Subianto yang sudah dikomunikasikan dengan partai pengusung dan partai-partai koalisi yang lainnya," ujar Adi dalam kanal YouTube Adi Prayitno Official, dikutip Senin (23/11).

Menurut Adi, tidak mengherankan jika pengajuan dua nama tersebut ke MPR tidak menuai resistensi, protes, ataupun penolakan dari partai-partai koalisi.

"Itu artinya apa? sudah ada kompromi, kesepakatan, dan persetujuan politik antara partai koalisi dan tentu saja dengan pilihan yang sudah dipilih oleh Pak Prabowo Supianto," tandasnya.

Sebelumnya, Prabowo menegaskan bahwa pertimbangannya memilih Amran dan Sugiono didasarkan pada aspek prestasi, pengabdian, kesetiaan kepada negara, serta keyakinannya bahwa keduanya mampu bekerja sebaik-baiknya.

"Saya tadi sudah ajukan dua nama, MPR yang nanti akan umumkan. Pertimbangannya adalah semata-semata prestasi, pengabdian, kesetiaan terhadap negara dan keyakinan saya bahwa mereka akan bekerja dengan sebaik-baiknya," ujar Prabowo di Gedung MPR, Jakarta, Senin (23/11).

Ia menjelaskan bahwa banyak tokoh lain yang juga memenuhi syarat. Namun, aturan konstitusi membatasi Presiden hanya boleh mengusulkan dua nama.

Sebelum menetapkan pilihan tersebut, Prabowo menyatakan telah berkonsultasi dengan partai-partai koalisi pengusung di parlemen serta Dewan Pembina Partai Gerindra. Meski demikian, keputusan akhir tetap diambil secara mandiri olehnya.

NASIONAL

Yaqut Cholil Qoumas Tak Menyesal Terjerat Kasus Kuota Haji Tambahan, Singgung Nasib Penjual Sayur

Oleh Redaksi · 22 Nov, 13.43 WIB

BANDA ACEH – Mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut menyatakan tidak menyesali keputusan membagi kuota haji tambahan 2024.

Meski kebijakan tersebut kini membuatnya harus menghadapi proses hukum sebagai terdakwa, ia menyebut keputusan kuota haji diambil atas dasar niat baik untuk melindungi keselamatan jemaah.

Gus Yaqut menyatakan telah mengabdikan dirinya untuk melayani jemaah haji Indonesia sejak awal menjabat sebagai Menteri Agama. Ia mengaku siap menanggung segala konsekuensi, termasuk mempertaruhkan dirinya, demi memastikan masyarakat yang telah menabung selama puluhan tahun dapat menunaikan ibadah haji dengan aman.

Pernyataan tersebut disampaikan Gus Yaqut saat menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (20/11) malam.

Gus Yaqut menyampaikan, kebijakan selama dirinya memimpin Kementerian Agama selalu berpedoman pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Ia juga menyebut pelaksanaan administrasi kebijakan mengacu pada KMA Nomor 777 Tahun 2016.

Menurutnya, ada dua prinsip mendasar yang selalu ditekankan kepada seluruh jajaran Kementerian Agama dalam penyelenggaraan ibadah haji, yakni kepatuhan terhadap aturan dan kebermanfaatan bagi masyarakat.

"Jangan pernah sekali-kali melakukan pelanggaran atas dua prinsip utama ini. Karena dua prinsip penting dalam menjalankan pemerintahan dalam hal pelaksanaan ibadah haji," kata Gus Yaqut.

Ia mengklaim, telah berulang kali mengingatkan jajarannya agar tidak melakukan pungutan dalam bentuk apa pun kepada jemaah. Selain itu, dirinya juga menerbitkan sejumlah surat edaran sebagai peringatan agar pegawai Kementerian Agama tidak melakukan kecurangan maupun penyimpangan dalam memberikan pelayanan.

Gus Yaqut juga membantah pernah menerima laporan mengenai pemberian uang secara tidak sah ataupun persoalan pengaturan antrean keberangkatan haji.

"Sama sekali tidak ada, Yang Mulia. Saya malah baru tahu setelah hal ini ramai. Saya tidak pernah mendapatkan laporan apa pun mengenai penerimaan-penerimaan yang tidak sah," ujarnya.

Ia pun membantah pernah menggunakan staf khusus untuk mengatur keberangkatan jemaah demi memperoleh keuntungan pribadi. Ia menegaskan, tidak pernah memanfaatkan jabatannya untuk mengintervensi proses tersebut.

Adik dari mantan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf itu merasa tidak menyesal atas jabatan Menteri Agama hingga dirinya didakwa menerima uang sekitar USD 271.000 …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Sudah Dipecat Tidak Hormat, Kenapa Ahrie Sonta – Eko Hadi Masih Aktif di Polri dan Dimutasi ke Yanma?

Oleh Redaksi · 22 Nov, 18.21 WIB

BANDA ACEH - Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso, yang telah dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, tetap berstatus aktif di lingkungan Polri dan baru-baru ini dimutasi menjadi Perwira Tinggi (Pati) Yanma Polri.Mutasi tersebut tercantum dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2598/XI/KEP/2026 tertanggal 20 November 2026 yang ditandatangani Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. Ahrie Sonta, yang sebelumnya menjabat Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri, dicopot dan digantikan Brigjen Iksantyo Bagus Pramono. Eko Hadi Santoso, sebelumnya Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri, juga dialihkan ke Pati Yanma. Irjen Slamet Uliandi turut dimutasi ke posisi serupa.

Kedua jenderal tersebut sebelumnya menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri. Ahrie Sonta dijatuhkan PTDH pada 10 November 2026 setelah persidangan selama sekitar 11 jam. Eko Hadi menyusul pada 17 November 2026 setelah sidang sekitar sembilan jam. Majelis menilai keduanya melakukan perbuatan tercela, antara lain menyalahgunakan akses perangkat teknologi Polri untuk penyadapan yang tidak sesuai prosedur.

Keduanya mengajukan banding. Polri telah menyatakan akan membentuk majelis komisi banding. Selama proses banding berlangsung, secara administrasi mereka masih berstatus anggota Polri sehingga dapat dimutasi. Keduanya tetap ditahan di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, terkait perkara pidana.

Yanma (Pelayanan Markas) Polri adalah unsur pelayanan di tingkat Mabes Polri yang mengurus tugas administratif, pelayanan markas, angkutan, perumahan, protokoler, dan penjagaan markas.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Zulhas Sentil Era Reformasi: Dulu Tambang Dikuasai Orang Per Orang, Negara Cuma Dapat Sedekah

Oleh Redaksi · 23 Nov, 17.58 WIB



BANDA ACEH -- Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menilai pengelolaan kekayaan alam Indonesia, khususnya sektor pertambangan, kini mulai diarahkan agar lebih berpihak kepada negara dan kepentingan rakyat.

Zulkifli Hasan, yang akrab disapa Zulhas, menyebut selama 28-30 tahun era reformasi, penguasaan sumber daya alam dinilai lebih banyak dinikmati oleh kepentingan perorangan dan pemilik modal. Sementara itu, negara disebut belum memperoleh manfaat optimal dari kekayaan alam yang dimilikinya.

Pernyataan tersebut disampaikan Zulhas dalam acara Grand Launching dan Kuliah Umum Pertanian Industrial Berkelanjutan di Aruna Universitas Jember, Sabtu (21/11/2026).

Dalam kesempatan itu, Zulhas menggambarkan adanya perubahan arah kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam. Ia menilai, jika sebelumnya pengelolaan tambang lebih banyak berada di tangan kepentingan pribadi, kini pemerintah berupaya memperkuat peran negara.

"Dulu tambang punya perorangan, negara disedekahi. Sekarang dikuasai negara," ujar Zulhas.

Pernyataan tersebut menjadi sorotan karena menyentuh persoalan mendasar mengenai penguasaan dan distribusi manfaat kekayaan alam Indonesia.

Menurut Zulhas, perubahan arah kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan kekayaan nasional memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.

Ia juga mengaitkan kebijakan tersebut dengan agenda pemerintah dalam memperkuat kemandirian ekonomi, terutama melalui program swasembada pangan dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih.

Dorong Kemandirian Pangan dan Ekonomi Desa

Zulhas mengatakan, keberpihakan negara kepada rakyat tidak cukup hanya diwujudkan melalui pengelolaan sumber daya alam. Pemerintah juga perlu memperkuat sektor-sektor strategis yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat.

Salah satunya melalui swasembada pangan yang diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar negeri.

Selain itu, pemerintah mendorong pembangunan Koperasi Desa Merah Putih sebagai salah satu instrumen untuk memperkuat perekonomian masyarakat di tingkat desa.

Melalui program tersebut, pemerintah berharap aktivitas ekonomi desa dapat berkembang dan masyarakat memiliki akses yang lebih luas terhadap kegiatan usaha serta distribusi barang kebutuhan pokok.

Singgung Penyadapan dan Kasus Keracunan MBG

Dalam kesempatan yang sama, Zulhas juga melontarkan pernyataan bernada kelakar mengenai penanganan kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia menyinggung adanya penyadapan yang menurutnya membuat situasi belakangan menjadi lebih baik, termasuk dalam kaitannya dengan pengawasan pelaksanaan program MBG.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Gibran Bisa Balikkan Situasi Politik Jika Dimakzulkan, Ini Kata Mahfud MD

Oleh Redaksi · 22 Nov, 20.11 WIB

BANDA ACEH - Mahfud MD mengungkapkan alasan lebih mendukung Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden dibandingkan melalui mekanisme pemakzulan atau impeachment. Menurut Mahfud, proses pemakzulan yang membutuhkan waktu panjang berisiko membuka peluang terjadinya manuver Politik yang dapat membalikkan situasi.Pandangan tersebut disampaikan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan itu dalam diskusi bersama pakar hukum tata negara Refly Harun di kanal YouTube Refly Harun, Sabtu (21/11/2026).

Dalam perbincangan tersebut, Mahfud menjelaskan bahwa pemakzulan harus melalui sejumlah tahapan persidangan di berbagai lembaga negara. Berdasarkan perhitungannya, seluruh proses tersebut dapat memakan waktu hingga sekitar tujuh bulan.

"Saya sendiri berpendapat mundur, Mas Refly, karena itu kalau ditunggu, ditunda melalui pemakzulan yang prosesnya harus sekian hari, sidang ini, sidang itu, nanti bisa terjadi penipuan lagi," ujar Mahfud.

Ia menilai rentang waktu yang tersedia selama proses pemakzulan dapat dimanfaatkan untuk melakukan berbagai manuver politik. Bahkan, jika proses tersebut dipercepat menjadi satu minggu, menurut Mahfud, peluang terjadinya perubahan situasi tetap terbuka.

"Orang seperti ini kalau dibiarkan terus, kalau waktu yang tersedia untuk pemakzulan taruhlah seminggu misalnya kalau dipercepat, di waktu-waktu itu bisa saja terjadi pembalikan situasi sehingga tidak jadi mundur. Oleh sebab itu, ya saya termasuk yang mengusulkan Gibran mundur, jangan melalui proses pemakzulan," tegasnya.

Mahfud juga mengkhawatirkan proses pemakzulan yang berlangsung berbulan-bulan di MPR dan lembaga terkait lainnya justru memunculkan berbagai interupsi politik. Akibatnya, persoalan pemberhentian wakil presiden berpotensi terus menggantung tanpa kepastian.

Menurut dia, kondisi tersebut dapat merugikan negara, baik dari sisi politik maupun ekonomi. Karena itu, pengunduran diri dinilai menjadi pilihan yang lebih cepat untuk mengakhiri ketidakpastian.

Dalam diskusi yang sama, Refly Harun turut menyampaikan pandangannya mengenai hak pengunduran diri pejabat publik. Ia membedakan pengunduran diri dengan pencalonan jabatan publik yang memiliki sejumlah persyaratan administratif.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Beredar Pernyataan Komjen Pol Marthinus Hukom Siap Periksa Jokowi

Oleh Redaksi · 23 Nov, 22.13 WIB



BANDA ACEH - Sebuah unggahan status yang dikaitkan dengan mantan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol) Marthinus Hukom, tengah menjadi sorotan publik.Dalam narasi yang beredar di X, Marthinus dikabarkan menyatakan kesiapannya untuk memeriksa Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sebelum dirinya memasuki masa purna tugas dari kepolisian.

Berdasarkan tangkapan layar unggahan status yang beredar pada Senin (23/11/2026), tertulis pernyataan yang menyebut bahwa pemeriksaan tersebut akan menjadi bentuk pengabdian terakhirnya sebelum pensiun.

"Kalau khusus memeriksa dia, SAYA SIAAAP. Mumpung belum pensiun, saya ingin melakukan pengabdian terakhir demi menyelamatkan Bangsa dan Negara," demikian bunyi kutipan dalam unggahan status yang dikaitkan dengan Marthinus Hukom tersebut.

Kabar mengenai kesiapan pemeriksaan tersebut muncul menyusul pemberitaan media Tempo terkait pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra.Dalam keterangannya, Yusril menyebutkan bahwa penyidik memiliki peluang untuk memeriksa Joko Widodo apabila dalam proses pengembangan kasus ditemukan fakta hukum serta alat bukti yang memadai.

Pernyataan ini berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal dan indikasi tindak pidana makar terhadap Presiden Prabowo Subianto yang turut menyeret mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

Profil Singkat Komjen Pol Marthinus Hukom

Komjen Pol. Dr. Marthinus Hukom, S.I.K., M.Si. merupakan perwira tinggi Polri lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1991.

Selama berkarier di korps Bhayangkara, ia dikenal luas melalui rekam jejaknya sebagai Kepala Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri serta menjabat sebagai Kepala BNN RI pada periode 2023–2025.

Saat ini, Marthinus Hukom diketahui belum memasuki masa pensiun dan masih tercatat aktif sebagai Perwira Tinggi (Pati) di Markas Besar (Mabes) Polri.

NASIONAL

Publik Menanti Progres Kasus Penyadapan Ilegal LSP

Oleh Redaksi · 22 Nov, 10.25 WIB



BANDA ACEH -Aparat penegak hukum didesak mengusut tuntas penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang diduga melibatkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) bersama sejumlah jenderal polisi.

Benny menilai dugaan penyadapan terhadap kegiatan kepala negara bukan persoalan biasa. Ia bahkan menyebut tindakan tersebut sebagai dugaan makar yang harus diusut secara serius.

"Publik masih terus mengikuti dan menunggu progres penanganan Kapolri Jenderal Listyo Sigit dan sejumlah jenderal polisi yang menyadap Istana dan kegiatan Presiden Prabowo," ujar Benny, Sabtu, 22 November 2026.

Politikus Partai Demokrat itu menyebut peristiwa tersebut sebagai kejadian serius karena menyangkut keamanan dan kewibawaan kepala negara.

"Ini pertama kali terjadi dalam sejarah republik, Kapolri dengan sejumlah jenderal polisi melakukan penyadapan kegiatan kepala negara. Ini jelas bukan penyadapan biasa. Ini tindakan makar," tegasnya.

Benny meminta seluruh pihak yang diduga terlibat dibongkar dan diproses melalui jalur hukum.

"Bongkar semua yang terlibat. Tangkap dan adili segera dalangnya," tandasnya.

NASIONAL

Viral! Siswa Patungan Belikan Mobil untuk Guru, Ternyata Cuma Konten

Oleh Redaksi · 23 Nov, 16.23 WIB



BANDA ACEH - Video viral yang memperlihatkan sejumlah orang mengaku sebagai siswa mengumpulkan uang Rp 218 juta untuk membelikan mobil kepada guru yang pensiun ternyata hanya rekayasa konten. Video yang direkam di SMKN 3 Bandung, Jawa Barat, pada Sabtu (21/11/2026) itu dibuat oleh agensi PT Tautau Kreasi Utama tanpa melibatkan siswa maupun guru sekolah tersebut.Kepala SMKN 3 Bandung, Een Rohaeni, mengungkapkan bahwa pihak sekolah sebelumnya menerima permohonan peminjaman lokasi dari sebuah agensi konten, PT Tautau Kreasi Utama, yang beralamat di kawasan Gegerkalong, Kota Bandung.

Permohonan tersebut disampaikan pada Jumat (20/11/2026). Dalam surat pengajuan, agensi mencantumkan sebanyak 35 orang yang terdiri dari kru dan pemeran untuk keperluan pengambilan gambar pada Sabtu (21/11/2026).

Sekolah kemudian memberikan izin setelah pihak agensi menjelaskan bahwa kegiatan tersebut berkaitan dengan konten pembelajaran. Agensi juga menyampaikan bahwa identitas SMKN 3 Bandung tidak akan digunakan dalam video.

“Karena ada permintaan dari pihak juga untuk tidak mengambil nama SMK 3 Bandung. Katanya, ‘enggak kok, Bu, ini lorong-lorong aja’, gitu,” ujar Een, Senin (23/11/2026).

Akan tetapi, pihak sekolah justru terkejut ketika video hasil produksi tersebut beredar luas di media sosial. Pasalnya, alur cerita yang ditampilkan seolah-olah melibatkan siswa SMKN 3 Bandung yang mengumpulkan uang Rp 218 juta untuk membeli mobil sebagai hadiah perpisahan bagi guru yang pensiun.

Een menegaskan, pihak sekolah tidak pernah terlibat dalam cerita tersebut. Ia juga menyayangkan agensi tidak memberikan naskah maupun hasil rekaman sebelum konten dipublikasikan.

“Yang perlu saya sampaikan bahwa pemain dan guru itu bukan berasal dari SMK 3 Bandung. Dan juga sebelum tayang, itu kami tidak mendapatkan script-nya, kami tidak diberi video untuk dicek ulang mengenai konten tersebut,” jelasnya.

Menanggapi viralnya video tersebut, pihak sekolah telah melakukan klarifikasi kepada Kantor Cabang Dinas (KCD) serta Dinas Pendidikan Jawa Barat.

Een memastikan tidak pernah ada aksi pengumpulan dana oleh siswa SMKN 3 Bandung untuk memberikan hadiah mobil kepada guru yang pensiun. Menurutnya, seluruh cerita dalam video tersebut merupakan bagian dari skenario konten.

“Kami juga kaget gitu, dan tentunya kami sudah menempuh prosedur termasuk klarifikasi bahwa cerita ini tidak ada. Tidak ada siswa kami memberikan hadiah ke guru, itu hanya cerita fiksi saja,” tegasnya.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Kasus Makar, Bareskrim Sita 20 Bendera One Piece hingga Ratusan Kaus Hitam

Oleh Redaksi · 23 Nov, 20.59 WIB



BANDA ACEH - Bareskrim Polri menyita sejumlah barang bukti dalam penanganan kasus dugaan makar yang dikaitkan dengan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Barang bukti tersebut di antaranya 20 bendera One Piece, ratusan kaus hitam, perangkat elektronik, hingga uang tunai Rp735 juta.

Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin mengatakan, penyitaan dilakukan penyidik sebagai bagian dari proses penanganan perkara tersebut.

"Penyidik telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti dan terkait dengan perkara tersebut," kata Asep dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (23/11/2026).

Asep merinci, penyidik menyita 39 barang bukti elektronik yang terdiri atas telepon genggam, laptop, CPU, dan hard disk.

Selain itu, polisi menyita 250 kaus hitam bergambar senjata api dengan tulisan 'All Cops Are Bastard'. Ada pula 251 kaus hitam bertuliskan 'Sadar Dipalak, Sadar Dibakar, Sadar Dimiskinkan'.

"251 pcs kaus warna hitam yang bertuliskan 'Sadar Dipalak, Sadar Dibakar, Sadar Dimiskinkan' bergambar salam tiga jari dengan tagar Indonesia Sadar," kata dia.

Barang bukti lainnya berupa satu buku catatan hasil analisis dan evaluasi (anev) satgas berwarna biru, 20 bendera One Piece, serta uang tunai senilai Rp735 juta.

Sebelumnya, Polri menetapkan enam orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan makar yang dikaitkan dengan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Mereka yakni Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, Eko Hadi, Slamet Uliandi, Tedjo Kusumo, dan Iman Imanuddin.

Dalam perkembangan perkara lainnya, sejumlah perwira tinggi Polri juga disebut menjadi tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo. Tiga di antaranya, yakni Listyo Sigit Prabowo, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta, disebut telah ditahan di Rutan Mako Brimob. Sementara Slamet Uliandi tidak ditahan.

Terbaru, Eko Hadi disebut menyusul Ahrie Sonta yang lebih dahulu dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dari Polri. Putusan PTDH terhadap Ahrie dibacakan pada Selasa (10/11/2026)

NASIONAL

Mutasi Besar-besaran Polri! 117 Kapolres dan Kapolresta Berganti, Ini Daftar Lengkapnya

Oleh Redaksi · 22 Nov, 18.28 WIB

BANDA ACEH - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto melakukan mutasi dan rotasi besar-besaran di lingkungan Polri. Sebanyak 117 pejabat yang tercantum dalam daftar mutasi mendapat penugasan baru sebagai Kapolres hingga Kapolresta di berbagai wilayah Indonesia.

Mutasi tersebut tertuang dalam dua surat telegram rahasia (TR), yakni Nomor ST/2598/XI/KEP/2026 dan ST/2599/XI/KEP/2026 tertanggal 20 November 2026. Kedua surat itu ditandatangani Kapolri atas nama Asisten SDM Kapolri, Irjen Deni Dharmapala.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan, mutasi jabatan merupakan bagian dari penyegaran organisasi. Pergantian posisi di lingkungan kepolisian juga menjadi hal yang wajar dalam dinamika organisasi.

Dia menegaskan, penempatan personel dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip meritokrasi, kompetensi, kapabilitas, dan integritas.

“Penempatan personel dalam jabatan di lingkungan Polri dilaksanakan dengan mempertimbangkan meritokrasi, kompetensi, kapabilitas, dan integritas. Hal ini merupakan bagian dari upaya organisasi untuk memastikan setiap personel dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab secara optimal,” kata Isir dalam keterangannya, Minggu (22/11/2026).

Isir juga meminta para personel yang mendapat jabatan baru segera beradaptasi dan menjalankan tugas secara profesional.

“Setiap jabatan merupakan amanah dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan secara profesional. Kami berharap para pejabat yang mendapat penugasan baru dapat menjaga integritas, meningkatkan kinerja, serta menghadirkan pelayanan kepolisian yang responsif dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Faftar 117 Kapolres dan Kapolresta yang mendapat jabatan baru dalam mutasi Polri November 2026:

1. Kombes Ronny Lumban Gaol diangkat sebagai Kapolres Metro Jakarta Pusat
2. AKBP Davis Busin Siswara diangkat sebagai Kapolresta Pati
3. AKBP Willy Andrian diangkat sebagai Kapolresta Bogor Kota
4. Kombes Irwan Andy Purnamawan diangkat sebagai Kapolresta Sumenep
5. AKBP Yudha Setiawan diangkat sebagai Kapolresta OKU Selatan
6. AKBP Faidil Zikri diangkat sebagai Kapolresta Padang
7. Kombes Imam Tarmudi diangkat sebagai Kapolresta Bukittinggi
8. Kombes Gregorius Liliek Tribhawono Iryanto diangkat sebagai Kapolresta Pontianak
9. Kombes Ary Sudradjat diangkat sebagai Kapolresta Batang
10. AKBP Supriadi Rahman diangkat sebagai Kapolresta Gowa
11. AKBP Rulian Syauri diangkat sebagai Kapolres Manggarai Barat
12. AKBP Emerich Simangungsong diangkat sebagai Kapolres Malang

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Kapolri Mutasi Pejabat Polri, Sejumlah Kapolda Berganti

Oleh Biro Meulaboh · 22 Nov, 12.02 WIB



Lambang Rastra Sewakottama, simbol dedikasi dan pengabdian Kepolisian Negara Republik Indonesia,FOTO/ist

JAKARTA – Kapolri melakukan rotasi dan mutasi sejumlah perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah (Pamen) Polri melalui Surat Telegram Nomor ST/2598/XI/KEP/2026 tertanggal 20 November 2026.

Mutasi tersebut mencakup sejumlah jabatan strategis di lingkungan Mabes Polri, kewilayahan, hingga lembaga pendidikan dan fungsi operasional kepolisian.

Dalam surat telegram tersebut, sejumlah pejabat berpangkat Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol) mendapat penugasan baru. Di antaranya Irjen Pol Alfred Papare yang ditunjuk sebagai Kapolda Papua, menggantikan penugasan sebelumnya.

Selain itu, Irjen Pol Petrus Patrige Rudolf Renwarin dipercaya sebagai perancang peraturan kepolisian utama tingkat I di Divisi Hukum Polri. Sementara Irjen Pol Eko Hadi Santoso dimutasikan sebagai Pati Yanma Polri.

Rotasi juga menyentuh sejumlah jabatan pimpinan kepolisian daerah.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Pilihan Wapres Tak Terduga dari Presiden Prabowo

Oleh Redaksi · 23 Nov, 14.35 WIB



BANDA ACEH - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menyerahkan dua nama calon wakil presiden (wapres) kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI sebelum 25 November 2026.Hingga saat ini, identitas dua sosok yang akan diusulkan tersebut belum diumumkan secara resmi kepada publik.

Menanggapi dinamika bursa calon wapres tersebut, Pakar Komunikasi Politik dari Universitas Padjadjaran (Unpad), Kunto Adi Wibowo, menilai Presiden Prabowo sangat berpeluang mengajukan figur kejutan yang berada di luar daftar nama yang selama ini ramai diperbincangkan publik.

Menurut Kunto, apabila kedua nama yang diajukan seluruhnya berasal dari internal Partai Gerindra, sebagaimana usulan sejumlah kalangan di koalisi pendukung pemerintah belakangan ini, langkah tersebut justru dinilai kurang menarik secara dinamika politik dan berpotensi memicu tanda tanya baru di tengah masyarakat.

"Sangat mungkin, sangat mungkin karena kan kalau dua-duanya dari Gerindra (calon wapres) kayak ya enggak seru gitu, antiklimaks gitu kan. Dan secara komunikasi politik ini akan menimbulkan banyak pertanyaan baru. Emang enggak ada orang lagi dari partai lain? Kan gitu kan," kata Kunto, dikutip dari Kompas TV, Minggu (22/11/2026).

Lebih lanjut, Kunto memperkirakan komposisi dua nama yang akan diserahkan Prabowo ke MPR RI berpeluang melibatkan kader dari partai politik koalisi lainnya atau tokoh dari kalangan profesional. Strategi tersebut dinilainya dapat meredam sorotan yang terlalu terpusat pada satu partai saja.

"Supaya enggak terlalu mencolok di mata publik ya," ucap Kunto.

Konsolidasi Politik untuk Meredam Polemik

Terkait langkah Presiden Prabowo yang menggelar konsolidasi bersama pimpinan partai politik anggota koalisi, Kunto memandang upaya tersebut sebagai strategi komunikasi yang tepat.

Menurutnya, pelibatan pimpinan partai menunjukkan komitmen Presiden dalam menyelesaikan ketidakpastian politik melalui musyawarah lintas partai.

"Akan ada pertemuan gitu kan dan yang kedua menghindari eskalasi polemiknya. Jadi polemik yang tidak berkesudahan soal legitimasi prosedural atau legitimasi hukum gitu. Bahwa ini presiden ingin mengajak ke ranah politik dulu, begitu," tuturnya.

Kunto menambahkan, pendekatan konsolidasi tersebut juga menjadi cara Presiden untuk memegang kembali kendali atas arah agenda publik sekaligus menyelaraskan kepentingan antarpartai koalisi.

“Pak Prabowo ingin kepentingannya bisa secara mulus kemudian disepakati oleh partai-partai. Tapi partai-partai politik tentu punya pertimbangan bagaimana posisi mereka setelah perubahan konstelasi wapres ini mereka tidak dirugikan dan kalau bisa diuntungkan,” pungkasnya.

NASIONAL

Kapolri Suyudi Kocok Ulang Polda di Tengah Skandal Penyadapan dan Dugaan Makar

Oleh Redaksi · 22 Nov, 13.33 WIB

BANDA ACEH — Gerbong mutasi kembali bergerak di tubuh Polri. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto merombak 12 jabatan strategis di tingkat kepolisian daerah. Enam posisi Kapolda dan enam jabatan Wakapolda mengalami pergantian.

Rotasi besar ini berlangsung ketika institusi Bhayangkara tengah menghadapi dua ujian serius, yakni dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan penyidikan dugaan makar merambah sejumlah daerah melalui serangkaian penggeledahan yang menyita perhatian publik.

Mutasi tersebut, tertuang dalam Telegram Rahasia (TR) Nomor ST/2598/XI/KEP/2026 tertanggal 20 November 2026. Surat itu ditandatangani Asisten SDM Kapolri Irjen Pol Deni Dharmapala.

Sebanyak enam perwira tinggi mendapat penugasan baru sebagai Kapolda. Sementara enam jabatan Wakapolda juga mengalami pergantian.

Secara administratif, Polri menyebut rotasi sebagai bagian dari penyegaran organisasi dan pembinaan karier. Namun, di tengah persoalan hukum yang menyeret nama sejumlah personel dan menguji kredibilitas institusi, pergantian pejabat di sejumlah wilayah strategis juga menghadirkan tuntutan lebih besar yakni pembenahan kinerja, profesionalitas, dan akuntabilitas.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menegaskan, penempatan personel dilakukan berdasarkan prinsip meritokrasi, kompetensi, kapabilitas, dan integritas.

"Penempatan personel dalam jabatan di lingkungan Polri dilaksanakan dengan mempertimbangkan meritokrasi, kompetensi, kapabilitas, dan integritas. Hal ini merupakan bagian dari upaya organisasi untuk memastikan setiap personel dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab secara optimal," ujar Johnny dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (22/11/2026).

Pernyataan tersebut, menjadi penegasan resmi institusi bahwa mutasi merupakan bagian dari mekanisme penguatan organisasi. Namun, tantangan Polri saat ini jauh lebih besar daripada sekadar pergantian jabatan.

Perombakan menyentuh sejumlah wilayah strategis, mulai dari Papua, Papua Barat, Bengkulu, Sulawesi Tenggara, DI Yogyakarta, hingga Kalimantan Selatan.

Di Papua, Irjen Petrus Patridge Rudolf Renrawin digantikan Irjen Alfred Papare. Posisi yang ditinggalkan Alfred sebagai Kapolda Papua Barat selanjutnya dipercayakan kepada Irjen Edfrie R. Maith.

Di Bengkulu, jabatan Kapolda yang sebelumnya dipegang Irjen Yudhi Sulistianto Wahid kini dipercayakan kepada Brigjen Agustinus Berlianto Pangaribuan.

Sementara itu, Kapolda Sulawesi Tenggara akan dijabat Irjen Langgeng Purnomo. Ia menggantikan Irjen Himawan Bayu Aji yang mendapat penugasan sebagai Penyidik Tindak Pidana Utama Tingkat I Densus 88 Antiteror Polri.

Untuk DI Yogyakarta, jabatan Kapolda dipercayakan kepada Irjen Abioso Seno Aji.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Seskab Teddy Mulai Jarang Dampingi Prabowo, Benarkah Ada Masalah di Istana?

Oleh Redaksi · 23 Nov, 14.23 WIB



BANDA ACEH - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya kembali menjadi sorotan publik setelah mulai jarang terlihat mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam sejumlah agenda resmi di Istana Kepresidenan. Kondisi tersebut memunculkan berbagai spekulasi mengenai keberadaan hingga posisi Teddy di lingkungan pemerintahan.Perhatian publik terhadap Teddy semakin meningkat setelah mencuatnya kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah petinggi Polri. Dalam beberapa dokumentasi kegiatan Presiden Prabowo, sosok mantan ajudan tersebut tidak terlihat bersama jajaran pejabat lainnya.

Salah satu momen yang memicu pertanyaan terjadi pada 12 November 2026. Dalam foto pertemuan Presiden Prabowo dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang diunggah melalui akun resmi Sekretariat Kabinet, Teddy tidak tampak berada di antara pejabat yang hadir.

Meski demikian, ketidakhadiran Teddy dalam sejumlah foto kegiatan tidak serta-merta menunjukkan adanya perubahan jabatan. Hingga perkembangan informasi terakhir, belum ada pengumuman resmi mengenai pemberhentian dirinya dari posisi Sekretaris Kabinet.

Bahkan, berdasarkan penelusuran fakta ANTARA yang dipublikasikan pada 16 November 2026, kabar mengenai Presiden Prabowo yang mencopot Teddy akibat kasus dugaan penyadapan dinyatakan sebagai informasi hoaks.

Nama Teddy juga masih tercantum dalam daftar pejabat di laman resmi Sekretariat Kabinet ketika dilakukan pemeriksaan pada 12 November 2026.

Di tengah berbagai spekulasi, Teddy masih tercatat menjalankan tugasnya sebagai Sekretaris Kabinet. Pada 11 November 2026, ia terlihat mendampingi Presiden Prabowo dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Nagan Raya, Aceh.

Dalam agenda tersebut, Teddy turut mendampingi Presiden saat meresmikan Masjid Agung Baitul A'la atau yang dikenal sebagai Masjid Giok.

Kemunculan Teddy juga tercatat dalam agenda internasional Presiden Prabowo. Pada 19 November 2026, ia menyampaikan informasi mengenai pertemuan empat mata antara Prabowo dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Shenzhen, China, yang berlangsung di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) 2026.

Teddy menjelaskan bahwa pertemuan kedua kepala negara berlangsung sekitar satu jam dan membahas perkembangan hubungan serta kerja sama ekonomi Indonesia-Rusia.

Sebelumnya, beredar pula kabar bahwa Teddy diberhentikan dari jabatannya maupun diperiksa oleh Polisi Militer TNI terkait kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo.

Namun, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto membantah kabar mengenai pemeriksaan Teddy oleh Polisi Militer. Ia secara tegas menyebut informasi tersebut sebagai hoaks.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Buni Yani: Jokowi-Gibran Cepat atau Lambat akan Masuk Penjara, Kasus Hukum Sudah Sangat Banyak

Oleh Redaksi · 22 Nov, 20.03 WIB

BANDA ACEH - Pegiat media sosial dan akademisj Indonesia, Buni Yani, melontarkan pernyataan keras terkait masa depan Politik Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ia menilai, cepat atau lambat, keduanya berpotensi menghadapi persoalan hukum menyusul berbagai kasus yang menurutnya perlu mendapat perhatian serius.

Buni Yani bahkan meminta Presiden Prabowo Subianto mengambil inisiatif politik untuk melarang Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan membubarkan organisasi-organisasi relawan yang selama ini dikaitkan dengan kekuatan politik Jokowi.

Menurut Buni Yani, persoalan hukum yang dikaitkan dengan Jokowi dan Gibran tidak boleh dipandang sebelah mata.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Prabowo Ditunggu MPR, Dua Nama Cawapres Harus Diserahkan Sebelum Tengah Malam

Oleh Redaksi · 23 Nov, 14.46 WIB



BANDA ACEH - Usai rapat gabungan, Ketua MPR RI Ahmad Muzani meminta Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengusulkan dua nama calon wakil presiden untuk mengisi jabatan yang kosong.Ia menyebut, berdasarkan perhitungan MPR, Presiden harus menyampaikan dua nama tersebut paling lambat Senin (23/11/2026) pukul 23.59 WIB.

“Hitungan kami presiden harus sudah mengisi atau mengusulkan dua nama tersebut hari ini sampai dengan pukul 23.59 WIB,” kata Muzani kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (23/11/2026).

Ia menambahkan, MPR akan segera mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo terkait keputusan pimpinan dan rapat gabungan hari ini, agar proses pengusulan dua nama calon wakil presiden dapat segera dilakukan.

“Kami akan segera mengirim surat kepada presiden atas keputusan rapim dan ragab pada hari ini, agar Presiden segera mempersiapkan dua nama tersebut agar dikirimkan hari ini,” terangnya.

Sidang Paripurna MPR

Lebih lanjut, Muzani menyampaikan, ragab juga memutuskan sidang paripurna MPR dalam rangka pengisian kekosongan jabatan wakil presiden sisa masa jabatan 2024–2029 yang semula dijadwalkan pada Rabu, 9 Desember, akan diselenggarakan pada Jumat, 11 Desember 2026.

Ia menjelaskan, perubahan jadwal tersebut dilakukan setelah MPR menerima berbagai masukan dan kritik terkait perhitungan tenggat waktu 14 hari sebelum pelaksanaan sidang paripurna.

Sebelumnya, pimpinan MPR telah memutuskan sidang paripurna digelar pada 9 Desember 2026. Keputusan itu kemudian diperkuat dalam rapat gabungan dan diumumkan kepada publik.

UU MD3

Namun, jadwal tersebut menuai sorotan karena dinilai tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) serta tata tertib MPR.

Pasalnya, ketentuan mengenai 14 hari sebelum pelaksanaan sidang paripurna dimaknai sebagai 14 hari kerja, sedangkan MPR sebelumnya menggunakan hitungan hari kalender.

Muzani mengatakan, pihaknya telah mendengar dan mengkaji berbagai masukan tersebut. Meski MPR sebelumnya memaknai ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) sebagai hitungan hari kalender, pihaknya memilih mengedepankan prinsip kehati-hatian.

“Sekali lagi, ini justru kami berterima kasih atas semua pandangan, perhatian, opini yang berkembang di seluruh Indonesia tentang persoalan ini dan kami berharap kita semua akan memberikan support, memberikan harapan kepada proses yang sekarang sedang kita kerjakan,” jelas Muzani.

NASIONAL

Prabowo Ajukan Amran dan Sugiono Jadi Cawapres, Ini Alasannya

Oleh Redaksi · 23 Nov, 17.33 WIB



BANDA ACEH -Presiden Prabowo Subianto resmi mengusulkan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono sebagai dua calon wakil presiden (cawapres) untuk mengisi jabatan Wapres RI sisa masa jabatan 2024-2029.

Usulan tersebut disampaikan Prabowo kepada Ketua MPR RI Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 23 November 2026.

Surat berisi dua nama itu selanjutnya akan diverifikasi MPR selama 14 hari kerja sebelum diputuskan dalam Sidang Paripurna pada 11 Desember 2026.

"Sesuai dengan ketentuan konstitusional kita, baru saja saya menyerahkan dua nama yang merupakan kewajiban saya sebagai Presiden Republik Indonesia untuk saya usulkan ke hadapan MPR RI," ujar Prabowo usai menyerahkan surat.

Prabowo menjelaskan, sejumlah pertimbangan mendasari pilihannya mengajukan Amran dan Sugiono. Faktor rekam jejak, prestasi, pengabdian, serta kesetiaan kepada negara menjadi kriteria utama yang diperhitungkan dalam menentukan kedua nama tersebut.

"Pertimbangannya adalah rekam jejak, prestasi, ya, pengabdian, kesetiaan kepada negara, dan, ya, keyakinan saya bahwa mereka akan bekerja sebaik-baiknya," ujarnya.

Dikatakan bahwa bahwa pengusulan kedua nama tersebut bukan berarti hanya Amran dan Sugiono yang dinilai memenuhi kualifikasi sebagai wakil presiden.

Namun, ketentuan konstitusi membatasi Presiden untuk mengajukan dua nama, sementara proses pengambilan keputusan juga harus dilakukan dalam waktu yang terbatas.

"Konstitusi kita menetapkan saya boleh mengusulkan dua nama dan saya diberi waktu yang sangat terbatas, saya tidak bisa terlalu lama konsultasi," jelasnya.

Sebelum mengambil keputusan, Prabowo mengaku telah berkonsultasi dengan partai-partai koalisi pengusung yang berada di parlemen, termasuk Dewan Pimpinan Partai Gerindra.

Dia menegaskan, pengajuan nama Amran dan Sugiono tersebut merupakan keputusan yang telah diambilnya setelah melalui konsultasi.

"Saya yakin mereka dua-duanya akan bekerja sebaik-baiknya untuk bangsa, negara, dan rakyat Indonesia," tandas Prabowo.

NASIONAL

Aseng Ditangkap, Febrie Diamputasi Usai Usik Bisnis Haram Listyo

Oleh Redaksi · 22 Nov, 13.27 WIB

BANDA ACEH – Dugaan konflik kepentingan di balik penindakan mafia pertambangan ilegal kembali menjadi sorotan.

Nama mantan Jampidsus Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, diseret dalam polemik yang menghubungkan penanganan perkara tambang ilegal milik Sudianto alias Aseng dengan dugaan bisnis pertambangan yang disebut-sebut memiliki keterkaitan dengan keluarga mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

Aseng selama bertahun-tahun disorot terkait dugaan aktivitas pertambangan emas dan bauksit ilegal di Kalimantan Barat.

Praktisi dan pengamat militer Sri Radjasa bahkan melontarkan tudingan bahwa pengusaha tersebut diduga memiliki jaringan perlindungan kuat, termasuk dugaan keterkaitan dengan Listyo Sigit dan anak perempuannya.

Dugaan tersebut kembali mencuat setelah Sri Radjasa membahas perkara Aseng dalam sejumlah podcast yang beredar di media sosial.

Ia menyebut bisnis pertambangan yang dikaitkan dengan Aseng tidak hanya berada di Kalimantan Barat, tetapi juga diduga memiliki hubungan dengan aktivitas pertambangan di Halmahera dan Sulawesi.

Dalam podcast @abrahamsamadspeakup, Sri Radjasa secara terbuka menyinggung dugaan keterlibatan anak perempuan Listyo Sigit dalam bisnis pertambangan.

“Kasus Aseng, kasusnya yang tambang di mana itu, illegal mining, ternyata ada nama anaknya Sigit yang perempuan. Sebelumnya di Halmahera dia juga main, main tabrak aja tambang orang-orang lain."

"Dan ini kalau di sini ada 500 tambang, mungkin Sigit terima setoran 400 tambang disetor ke dia. Ngeri ya, penyalahgunaan kewenangan dia sudah sangat luar biasa, di sektor tambang dan di sektor lainnya. Dan berapa tahun dia jadi Kapolri,” kata Sri Radjasa pada Minggu (22/11/2026) di Podcast Abraham Samad.

Pernyataan tersebut semakin tajam ketika Sri Radjasa menghubungkan penindakan Aseng oleh Kejaksaan Agung dengan dugaan konflik kepentingan yang menyeret nama Febrie Adriansyah.

Dia pun menyebut penindakan terhadap Aseng diduga menjadi salah satu pemicu persoalan yang kemudian menyeret mantan Jampidsus tersebut.

“Kenapa Febri (Febrie Adriansyah, mantan Jampidsus Kejagung) harus diamputasi, karena Febri sudah berani mengusik bisnis haramnya Kapolri. Salah satunya Aseng (Sudianto) ditangkap."

"Aseng ini bandar emas ilegal paling gede. Nah, di kubu Aseng ini ada anak Kapolri (Listyo Sigit) yang perempuan, dan itu saya faktanya dari Febri loh.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

Pangdam IM Jalin Silaturahmi dengan Bupati Pidie Jaya, Perkuat Sinergitas TNI dan Pemda

Oleh Redaksi · 22 Nov, 15.17 WIB

PIDIE JAYA – Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda (Pangdam IM) Brigadir Jenderal TNI Mahesa Fitriadi melaksanakan kegiatan silaturahmi dengan Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi, di Pendopo Bupati Pidie Jaya, Kota Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, Minggu (22/11/2026).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya mempererat hubungan silaturahmi, memperkuat komunikasi, serta membangun koordinasi dan sinergitas antara TNI, khususnya Kodam Iskandar Muda, dengan pemerintah daerah (pemda) dalam mendukung pelaksanaan tugas dan pembangunan di wilayah Pidie Jaya.

Kedatangan Pangdam IM disambut hangat oleh Bupati Pidie Jaya, Danrem 011/Lilawangsa, DPRK Pidie Jaya, Kajati Pidie Jaya, Dandim 0102/Pidie, Kapolres Pidie Jaya, Dandeninteldam IM, Danyonif TP …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

EKONOMI

Lebih Murah dari Toko Modern, KDMP Tukangkayu Jual Sembako dan LPG Bersubsidi Tiap Minggu

Oleh Van · 22 Nov, 17.14 WIB

BANYUWANGI — Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Tukangkayu, Kecamatan/Kabupaten Banyuwangi, menggelar kegiatan pasar murah bertajuk Belonjo Murah pada Minggu 22 November 2026.

Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 09:00 hingga 11:00 WIB di depan gerai koperasi ini melibatkan seluruh anggota koperasi serta warga sekitar.

Dalam kegiatan tersebut, KDMP Tukangkayu menyediakan berbagai kebutuhan pokok dari produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang telah disubsidi.

Seluruh komoditas dijual dengan harga yang diklaim jauh lebih murah dibandingkan harga di toko modern maupun toko kelontong.

Adapun daftar harga bahan pokok yang ditawarkan dalam program Belonjo Murah ini meliputi Beras SPHP Rp 55.000, Tabung Gas LPG 3 Kilogram (Kg) Rp 15.000, Gula pasir Rp 15.000, dan MinyaKita 1 liter Rp 15.000.

Ketua KDMP Tukangkayu, Imam Maskun, menjelaskan bahwa program ini merupakan agenda rutin yang diselenggarakan setiap hari Minggu sebagai bentuk pelayanan nyata koperasi kepada warga.

"Karena kegiatan Belonjo Murah ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat," jelas Imam Maskun saat ditemui di lokasi kegiatan.

Lebih lanjut, Imam menambahkan bahwa selain membantu meringankan beban ekonomi warga dalam memenuhi kebutuhan pokok bagi masyarakat.

"Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan perkembangan koperasi sekaligus membangun kepercayaan publik (public trust) masyarakat terhadap eksistensi KDMP Tukangkayu," katanya.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Amnesty Internasional Indonesia Desak Jokowi Diperiksa soal Dugaan Penyadapan

Oleh Redaksi · 23 Nov, 13.57 WIB



BANDA ACEH - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mendesak aparat penegak hukum mendalami dugaan penyadapan terhadap sejumlah tokoh, pengusaha, jurnalis, dan aktivis. Menurutnya, mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu dimintai keterangan untuk mengungkap siapa yang berada di balik praktik penyadapan tersebut.Pernyataan Usman Hamid itu disampaikan dalam wawancara di Kompas TV. Ia menyoroti pernyataan Jokowi pada 2023 di hadapan relawan Projo yang mengaku memiliki data intelijen mengenai gerak-gerik tokoh Politik.

Saat itu, Jokowi menyebut memiliki informasi intelijen, baik dari kepolisian, militer maupun lembaga intelijen negara.

Menurut Usman, pernyataan tersebut semestinya menjadi salah satu pintu masuk bagi aparat untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut.

“Sebenarnya pernyataan itu sendiri perlu ditindaklanjuti oleh kepolisian. Saya kira Bareskrim mengerti. Mestinya Pak Jokowi dimintai keterangan, tentu dengan praduga tidak bersalah,” kata Usman.

Ia menegaskan, pemeriksaan terhadap Jokowi bukan berarti langsung menyimpulkan adanya keterlibatan dalam dugaan penyadapan. Jokowi tetap memiliki hak untuk didampingi pengacara dan membela diri.

Namun, menurut Usman, ada sejumlah hal yang perlu digali, terutama hubungan Jokowi dengan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo serta dinamika politik menjelang dan setelah pergantian pemerintahan.

Usman juga menyinggung posisi Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden yang proses pencalonannya sebelumnya menuai kontroversi konstitusional.

Usman Hamid mempertanyakan tujuan penyadapan yang diduga menyasar kalangan pengusaha, jurnalis, dan aktivis.

Menurutnya, jika penyadapan tersebut benar terjadi, aparat tidak cukup hanya mengungkap dugaan motif politik atau makar. Penegak hukum juga harus menjelaskan siapa yang memerintahkan, siapa targetnya, dan untuk kepentingan apa informasi tersebut dikumpulkan.

“Kalaupun itu ada buktinya, tetap tidak menjelaskan mengapa sampai ada penyadapan terhadap pengusaha. Untuk apa? Untuk kontrol ekonomi atau untuk mengontrol pengusaha?” ujarnya.

Ia juga mempertanyakan kemungkinan penyadapan terhadap jurnalis dilakukan untuk menundukkan media, mengarahkan pemberitaan, atau membatasi kerja jurnalistik.

Bahkan, Usman mengungkapkan bahwa namanya juga disebut masuk dalam daftar pihak yang diduga menjadi sasaran penyadapan.

“Saya juga termasuk di dalam daftar itu. Tapi saya kira kita perlu jawaban yang menyeluruh. Apa arti penyadapan ini?” katanya.

Bagi Usman, persoalan penyadapan bukan hanya menyangkut pelanggaran privasi, tetapi juga ancaman terhadap kebebasan sipil dan demokrasi.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Siapa Cawapres? Bahlil Bocorkan Hasil Pertemuan dengan Prabowo di Hambalang

Oleh Redaksi · 23 Nov, 15.49 WIB



BANDA ACEH - Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengaku telah melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto, guna membahas seputar calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka pada Minggu (22/11/2026) malam. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ini menyampaikan, pertemuan tersebut digelar di kediaman Prabowo di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini turut dihadiri sejumlah ketua umum partai lainnya.

"Semalam saya sudah melakukan pertemuan dengan Bapak Presiden dengan beberapa ketua umum partai. Dan mengenai dengan wapres, kami menyerahkan kepada Bapak Presiden," ujar Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (23/11/2026).

Bahlil mengatakan, dirinya dan Partai Golkar menyerahkan sepenuhnya kuasa terkait pemilihan Wapres baru kepada RI 1. Lantaran Prabowo diklaim sebagai sosok yang paling mengerti kriteria dari seseorang yang nantinya akan diangkat sebagai pendamping.

Oleh karenanya, Bahlil mengaku tidak tahu menahu siapa sosok yang nantinya bakal diangkat sebagai Wakil Presiden Indonesia hingga 2029. Ia pun percaya sepenuhnya kepada Prabowo yang pernah menjabat sebagai Dewan Penasihat Partai Golkar periode 2004-2008.

"Pasti teman-teman akan tanya siapakah orangnya? Yang tahu itu hanya Bapak Presiden dan Tuhan yang tahu. Saya sebagai ketua partai Golkar menyerahkan sepenuhnya kepada Bapak Presiden sebagai Presiden dan Dewan Pembina Partai Golkar 2004-2009. Beliau kan senior saya jadi partai Golkar, jadi ya junior menyerahkan pada senior lah," ucapnya.

Sehingga, Bahlil tidak mau mendahului Prabowo untuk mengumumkan siapa yang bakal terpilih sebagai wapres. Sebagai Ketum Partai Golkar, ia mengaku hanya memiliki kewenangan untuk memberikan saran kepada Presiden.

"Kami punya keyakinan siapapun yang ditunjuk oleh Bapak Presiden untuk menjadi Wakil Presiden dalam menyelesaikan periodenya adalah orang yang terbaik yang telah ditunjuk oleh Bapak Presiden. Golkar sudah pasti mendukung apapun yang diputuskan oleh Bapak Presiden," kata Bahlil.

INTERNASIONAL

Pakai Fasilitas Militer, 7 Perwira AU Malaysia Ditangkap Selundupkan Narkoba ke RI

Oleh Redaksi · 22 Nov, 21.37 WIB

BANDA ACEH - Kepolisian dan militer Malaysia membongkar jaringan penyelundupan narkoba lintas negara yang melibatkan aparat aktif. Sebanyak tujuh perwira Angkatan Udara Kerajaan Malaysia (RMAF) resmi ditangkap usai kedapatan memanfaatkan fasilitas penerbangan militer untuk menyelundupkan barang haram ke luar negeri, dengan tujuan utama Indonesia dan Filipina.Kasus memalukan ini bermula dari penggagalan pengiriman bagasi mencurigakan di Pangkalan Udara Subang pada pekan ini. Menurut Panglima RMAF Jenderal Tan Sri Muhamad Norazlan Aris, para pelaku berupaya mengelabui petugas dengan menyelipkan koper berisi narkotika di antara tumpukan bagasi lain yang telah lolos pemeriksaan mesin pemindai (X-ray).

Kecurigaan muncul ketika seorang petugas bagian pergerakan udara melihat lima tas berbalut plastik dan sebuah kotak tanpa stiker lulus uji keamanan tergeletak di lobi kedatangan dan pengambilan bagasi.

Saat petugas mengecek bagian kotak yang sedikit terbuka, terlihat beberapa botol berlabel pupuk kimia --benda berbahaya yang terlarang masuk ke dalam pesawat.

"Petugas yang berjaga langsung membawa bagasi tersebut ke mesin pemindai untuk diperiksa dan menemukan sejumlah paket tersusun rapi yang tampak mencurigakan. Petugas kemudian meminta personel lain mencari pemilik bagasi guna pemeriksaan lebih lanjut," ujar Norazlan kepada kantor berita Bernama, dikutip Minggu (22/11/2026).

Dilansir Free Malaysia Today, penelusuran petugas mengarah kepada seorang perwira aktif yang bertugas dalam jadwal penerbangan RMAF tersebut. Saat dipanggil ke lokasi untuk pemeriksaan fisik, sang perwira sempat panik dan berusaha mengangkut kembali kelima tas itu ke dalam mobilnya, tetapi sigap dicegah petugas jaga.

Terpojok, tersangka kemudian merobek tas-tas tersebut menggunakan pisau dengan dalih tidak membawa kunci. Dari dalam tas, petugas mendapati bungkusan-bungkusan berwarna merah berisi kristal putih yang diduga kuat narkotika.

Temuan itu segera dilaporkan kepada komandan penjagaan dan Kepala Skuadron 211 pasukan pertahanan darat RMAF, sebelum diteruskan ke tim investigasi kriminal militer dan Departemen Investigasi Kejahatan Narkotika (JSJN) Bukit Aman, Kepolisian Diraja Malaysia.

Hasil uji laboratorium memastikan kristal tersebut merupakan metamfetamina, amfetamina, serta ekstasi (MDMA) dengan bobot total mencapai 96,64 kilogram senilai RM4,83 juta (sekitar Rp17,3 miliar), ditambah 6,98 kilogram cairan kimia prekursor.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

EKONOMI

BSU 2026 Rp900 Ribu: Tak Perlu Daftar, Ini Syaratnya

Oleh Van · 22 Nov, 15.28 WIB

JAKARTA – Pekerja yang berharap mendapatkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 tidak perlu repot mencari formulir pendaftaran. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan bahwa bantuan tersebut tidak dibuka melalui pendaftaran mandiri, melainkan ditentukan berdasarkan data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang kemudian diverifikasi sesuai ketentuan pemerintah.

Program BSU 2026 disiapkan untuk membantu menjaga daya beli pekerja dan buruh di tengah kebutuhan ekonomi. Bantuan ini diberikan sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan, yakni Oktober, November, dan Desember 2026. Pembayaran dilakukan sekaligus sehingga penerima yang memenuhi kriteria berhak memperoleh total Rp900.000.

Penyaluran bantuan direncanakan berlangsung pada November hingga Desember 2026. Meski demikian, pekerja perlu memahami bahwa memenuhi persyaratan belum otomatis menjamin bantuan langsung masuk ke rekening. Penetapan penerima tetap melalui proses pemeriksaan dan validasi data oleh pemerintah.

Kemnaker menyatakan pekerja tidak perlu mendaftarkan diri secara langsung untuk memperoleh BSU. Data calon penerima berasal dari kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang selanjutnya diproses melalui verifikasi berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan.

Dalam keterangannya melalui akun Instagram resmi @kemnaker yang dikutip pada Sabtu, 21 November 2026, Kemnaker mengingatkan pekerja agar tidak sekadar berharap mendapatkan bantuan, tetapi terlebih dahulu memastikan telah memenuhi kriteria yang berlaku.

Dengan mekanisme tersebut, pekerja diminta memastikan status kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, data identitas, serta informasi upah yang tercatat sesuai kondisi sebenarnya.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Connie: Jangan Berhenti di Listyo Sigit, Ungkap Siapa Pemberi Perintah Penyadapan

Oleh Redaksi · 23 Nov, 12.50 WIB



BANDA ACEH -Akademisi dan pengamat pertahanan, Connie Rahakundini Bakrie, meminta dugaan penyadapan yang dikaitkan dengan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo diusut secara menyeluruh.

Menurut Connie, penyelidikan tidak boleh hanya berhenti pada pihak yang diduga menjalankan operasi penyadapan. Hal yang lebih penting adalah mengungkap siapa yang memberikan perintah, bagaimana mekanismenya, serta untuk kepentingan apa tindakan tersebut dilakukan.

Connie menilai, publik perlu berhati-hati dalam menarik kesimpulan terkait dugaan penyadapan yang kemudian dikaitkan dengan perubahan dinamika Politik nasional.

"Pertama kita harus pastikan, apakah penyadapan itu benar-benar terjadi berikut bukti-bukti teknisnya. Apakah ada hasil pemeriksaan forensik digital yang jujur dan dapat dipertanggungjawabkan," kata Connie dalam podcast Refly Harun, dikutip redaksi pada Senin, 23 November 2026.

Dia menjelaskan, setidaknya terdapat sejumlah pertanyaan mendasar yang harus dijawab untuk mengungkap persoalan tersebut.

Pertama, memastikan apakah penyadapan benar-benar terjadi melalui bukti teknis. Kedua, mengidentifikasi pihak yang memiliki kemampuan melakukannya. Ketiga, mengungkap mekanisme operasi, termasuk siapa yang memberikan akses dan perintah.

Keempat, memastikan tujuan penyadapan, apakah untuk memperoleh informasi, memengaruhi kebijakan, mengatur posisi dalam negosiasi, atau bahkan menjadi alat tekanan politik.

Terakhir, mengukur dampak strategis dari informasi yang diperoleh melalui dugaan operasi tersebut.

Connie menekankan, kemampuan seseorang melakukan penyadapan tidak otomatis membuktikan bahwa orang tersebut merupakan aktor utama di balik operasi.

"Karena kemampuan melakukan tidak otomatis berarti menjadi pelaku," ujarnya.

Dia juga menyatakan tidak yakin jika dugaan penyadapan tersebut dilakukan atas inisiatif pribadi Listyo Sigit.

"Kalau end-user-nya di Pak Sigit sendiri, mohon maaf dengan segala hormat, saya pribadi nggak yakin," katanya.

Bahkan, Connie menyebut keyakinan tersebut mencapai 99,9 persen. Namun, dia menegaskan pandangannya masih merupakan analisis pribadi yang harus diuji dengan bukti.

"Saya yakin 99,9 persen. Tidak mungkin kemauannya pribadi ini," lanjutnya.

Connie menduga, jika penyadapan benar-benar terjadi, perlu ditelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang memberikan instruksi. Dia juga membuka kemungkinan bahwa kepentingan pihak pemberi perintah dapat berubah seiring dinamika politik.

"Jangan sampai ini, Listyo Sigitnya selesai, tapi kemudian yang beri perintahnya, orang-orangnya bergembira. Sudah, kita sudah selesai mendapatkan apa yang kita mau," tuturnya.

Meski demikian, Connie mengingatkan agar analisis tersebut tidak dijadikan kesimpulan sebelum seluruh bukti dibuka.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Yusril Nyatakan Siap Dampingi Prabowo Jadi Wapres Gantikan Gibran

Oleh Redaksi · 22 Nov, 08.58 WIB

BANDA ACEH -- Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyatakan kesiapannya apabila dipercaya Presiden Prabowo Subianto menjadi wakil presiden menggantikan Gibran Rakabuming Raka.

Yusril menegaskan, secara pribadi dirinya tidak keberatan jika mendapat kepercayaan untuk menduduki posisi orang nomor dua di Indonesia tersebut.

Ia menilai pengalaman panjangnya di pemerintahan serta latar belakang pendidikan dan keilmuan yang berkaitan dengan urusan kenegaraan menjadi bekal untuk menjalankan tugas sebagai wakil presiden.

Pernyataan tersebut disampaikan Yusril pada Sabtu (21/11/2026).

"Secara pribadi siap, tapi ya terserah kepada Bapak Presiden kalau beliau memberikan kepercayaan," ujar Yusril.

Ia mengatakan, dirinya telah cukup lama berkecimpung dalam pemerintahan sehingga memahami berbagai persoalan yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara.

"Kalau dari segi menjalankan tugas-tugas saya kira sudah cukup lama juga kita ada di pemerintahan ini dan belajarnya juga ilmunya juga enggak jauh-jauh dari-pada ilmu mengurusi negara juga," katanya.

Berbekal Pengalaman dan Ilmu Tata Negara

Yusril menjelaskan, latar belakang keilmuannya memiliki keterkaitan erat dengan tugas-tugas kenegaraan.

Ia memiliki pengalaman dan pengetahuan di bidang hukum tata negara, ilmu Politik, hingga filsafat.

Menurut Yusril, ketiga bidang keilmuan tersebut memberikan pemahaman mengenai sistem pemerintahan, konstitusi, politik, serta bagaimana negara dijalankan.

Bekal tersebut, menurut dia, dapat menjadi modal apabila suatu saat mendapat amanah untuk menjalankan tugas sebagai wakil presiden.

Meski demikian, Yusril menegaskan bahwa keputusan mengenai siapa yang akan menduduki posisi wakil presiden sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.

Pernyataannya tersebut sekaligus menunjukkan bahwa Yusril terbuka terhadap kemungkinan masuk dalam bursa calon wakil presiden apabila terjadi pergantian posisi yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka.

Peluang Menjadi Wapres Bergantung Keputusan Presiden

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Listyo Sigit Cs Terancam Pidana Hukuman Mati

Oleh Redaksi · 23 Nov, 20.52 WIB



BANDA ACEH -Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri menetapkan enam tersangka dalam kasus dugaan makar terhadap Presiden Prabowo Subianto yang semuanya berasal dari internal Polri.

"Penyidik telah menetapkan enam orang tersangka dalam dugaan tindak pidana makar," kata Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin dalam jumpa pers di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan pada Senin malam, 23 November 2026.

Enam tersangka makar tersebut adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Slamet Uliandi, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Brigjen Tedjo Kusumo, dan Kombes Iman Imanuddin.

"Pertama tersangka LSP, kedua SU, tiga EH, keempat ASN, kelima TK, dan keenam tersangka II," kata Asep.

Perkara dugaan makar dipastikan berbeda dengan kasus penyadapan ilegal nomor handphone Presiden Prabowo Subianto yang ditangani Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.

Enam tersangka dijerat dengan Pasal berlapis, mulai dari Pasal 258 UU 1/ 2023 tentang KUHP terkait dugaan penyadapan, Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) UU 1/ 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang ITE, Pasal 332 ayat (1) dan atau ayat (2) UU 1/ 2023 tentang KUHP terkait dugaan akses ilegal, Pasal 20 huruf c dan atau huruf d KUHP terkait dugaan turut serta melakukan tindak pidana atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana, antara lain dengan menyalahgunakan kekuasaan serta Pasal 160 KUHP UU 1/2023 tentang Niat untuk melakukan serangan yang telah diwujudkan dengan persiapan perbuatan tersebut dengan ancaman pidana mati.

NASIONAL

Ternyata Ini Alasan Prabowo Usulkan Sugiono dan Amran Jadi Cawapres

Oleh Redaksi · 23 Nov, 19.31 WIB



BANDA ACEH - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan alasan mengusulkan Sugiono dan Andi Amran Sulaiman sebagai calon Wakil Presiden (cawapres) kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dia menilai keduanya memiliki prestasi, pengabdian, dan kesetiaan kepada negara.

Prabowo menyampaikan pertimbangan tersebut setelah menyerahkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/11/2026).

"Pertimbangannya adalah semata-mata prestasi, ya, pengabdian, kesetiaan kepada negara, dan ya, keyakinan saya bahwa mereka akan bekerja sebaik-baiknya. Saya ingin tekankan, tidak berarti hanya dua orang ini yang memenuhi syarat," ujar Prabowo kepada awak media, Senin (23/11/2026).

Prabowo mengatakan, Indonesia memiliki banyak putra-putri terbaik yang layak menjadi calon wakil presiden. Namun, konstitusi hanya memperbolehkan dirinya mengusulkan dua nama.

"Banyak yang baik, tapi konstitusi kita menetapkan saya hanya boleh mengusulkan dua nama, dan saya diberi waktu yang sangat terbatas. Saya tidak bisa terlalu lama konsultasi. Saya sudah konsultasi dengan partai koalisi pengusung yang ada di parlemen," katanya.

Dia juga mengaku telah berkonsultasi dengan partai-partai koalisi pemerintah dan Dewan Pembina Partai Gerindra sebelum menentukan dua nama tersebut.

"Saya sudah berkonsultasi dengan Dewan Pembina Partai Gerindra. Dan ini keputusan saya, ya. Saya yakin mereka dua-duanya akan bekerja sebaik-baiknya untuk bangsa, negara, dan rakyat Indonesia," katanya.

Sebelumnya, Prabowo menyerahkan langsung dua nama tersebut kepada Ketua MPR Ahmad Muzani. Dua nama yang diusulkan yakni Sugiono dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman

NASIONAL

Kepala Bea Cukai Semarang Digarap KPK di Kasus Korupsi Cukai

Oleh Redaksi · 23 Nov, 12.27 WIB

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

BANDA ACEH -Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Semarang mendapat giliran dipanggil tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pengembangan penyidikan perkara dugaan kerugian keuangan negara di sektor cukai yang melibatkan PT Djarum.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan hari ini, Senin, 23 November 2026, tim penyidik memanggil Budi Prasetyo selaku Kepala KPPBC Semarang sebagai saksi.

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," kata Budi kepada wartawan di Jakarta, Senin siang, 23 November 2026.

Selain itu, kata Budi, tim penyidik juga memanggil satu saksi lainnya, yakni Charda Ika Wijaya selaku Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai (PKC) VII KPPBC Madya Semarang.

Pengembangan penyidikan perkara ini berasal dari perkara pokok yang bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Dalam perkara pokok, KPK mengusut dua klaster, yakni dugaan suap terkait importasi barang serta dugaan penerimaan lainnya atau gratifikasi yang diduga berasal dari proses kepabeanan maupun cukai.

Salah satu pengembangan sebelumnya menetapkan Gatot Heroe Hernanda sebagai tersangka. Gatot ditahan pada 26 Agustus 2026 dalam kapasitasnya sebagai Kepala Subdirektorat Penindakan Direktorat P2 DJBC terkait kepabeanan periode 2025–2026.

Dalam konstruksi perkara yang disampaikan KPK, Gatot diduga menerima uang sebesar Rp3,25 miliar dari total setoran Rp61,9 miliar yang diberikan pemilik Blueray Cargo, John Field, kepada sejumlah pihak di lingkungan Bea dan Cukai selama Juli 2025 hingga Januari 2026.

Sementara itu, pengembangan penyidikan lainnya menjerat Ahmad Dedi alias Dedi Congor, mantan pejabat DJBC. Ia ditetapkan sebagai tersangka pada September 2026 karena diduga menerima aliran uang dari John Field sebesar Rp30 miliar melalui ajudannya yang bernama Alex.

Selanjutnya, KPK kembali menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) umum baru per Oktober 2026 terkait cukai PT Djarum. Sprindik tersebut masih bersifat umum karena penyidik masih mengumpulkan alat bukti dan mendalami peran pihak-pihak terkait.

Dalam pengusutan perkara ini, KPK telah menggeledah Kantor Bea Cukai Kudus, kantor pusat PT Djarum di Kudus, serta enam perusahaan yang diduga terafiliasi dengan perusahaan rokok tersebut. Penyidik juga menggeledah Kantor Bea Cukai Semarang dan Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Tengah.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Respons Dasco usai Namanya Tak Diusulkan Jadi Cawapres oleh Prabowo

Oleh Redaksi · 23 Nov, 19.24 WIB



BANDA ACEH - Wakil Ketua DPRSufmi Dasco Ahmad buka suara setelah namanya tidak masuk dalam daftar usulan calon wakil presiden (cawapres) yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto kepada MPR.

Dasco menegaskan, sejak awal dirinya tidak memosisikan diri untuk mengikuti kontestasi pencalonan wakil presiden. Karena itu, dia tidak mempermasalahkan namanya yang tidak tercantum dalam daftar tersebut.

"Sebenarnya kan saya sudah sampaikan bahwa saya tidak dalam kapasitas untuk ikut dalam bursa cawapres," ujar Dasco saat menjawab pertanyaan awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/11/2026).

Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu sebelumnya mendapat dukungan dari sejumlah tokoh hingga kader internal partainya untuk masuk dalam bursa cawapres. Meski begitu, Dasco tetap menyampaikan apresiasi kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan.

"Tapi kemudian ini ada dukungan-dukungan yang kemudian datang, dan saya ucapkan terima kasih kepada masyarakat, tokoh masyarakat, organisasi, maupun beberapa pengamat dan tokoh Politik yang mendukung saya," tuturnya.

Dasco juga menekankan pentingnya menghormati kewenangan Presiden dalam mengajukan calon. Dia menyatakan akan mengikuti proses selanjutnya sesuai mekanisme konstitusional yang berlaku.

"Sudah saya sampaikan bahwa kewenangan untuk mengajukan calon itu ada pada Presiden. Dan kita harus ikuti itu dan kita menunggu proses selanjutnya," katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menyerahkan dua nama calon wakil presiden (Cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Senin (23/11/2026). Dua nama yang masuk dalam usulan tersebut yakni Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menko PMK Sugiono

LIFESTYLE

Mengenal Suku Baduy, Masyarakat Adat yang Tetap Menjaga Tradisi Leluhur di Tengah Modernisasi

Oleh Van · 22 Nov, 13.14 WIB

BANTEN — Suku Baduy merupakan masyarakat adat yang tinggal di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Banten. Dikenal juga sebagai Urang Kanekes, masyarakat ini mempertahankan tradisi leluhur dan menjalankan kehidupan yang erat dengan alam.

Masyarakat Baduy merupakan bagian dari etnis Sunda dan menggunakan bahasa Sunda dialek Banten dalam kehidupan sehari-hari. Mereka dikenal memegang teguh pikukuh, yakni aturan adat yang menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan.

Wilayah tempat tinggal mereka berada di kawasan Pegunungan Kendeng. Lingkungan alam, hutan, dan ladang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat adat tersebut.

Perbedaan Baduy Dalam dan Baduy Luar

Secara umum, masyarakat Baduy dikenal terbagi menjadi Baduy Dalam dan Baduy Luar. Baduy Dalam dikenal sebagai kelompok yang menjalankan aturan adat lebih ketat, sedangkan Baduy Luar memiliki sejumlah kelonggaran dalam berinteraksi dengan kehidupan modern.

Baduy Dalam tinggal di tiga kampung utama, yakni Cibeo, Cikertawana, dan Cikeusik. Sementara itu, masyarakat Baduy Luar tinggal di kampung-kampung yang mengelilingi kawasan tersebut.

Perbedaan keduanya juga terlihat dari pakaian yang dikenakan. Masyarakat Baduy Dalam identik dengan pakaian dan ikat kepala berwarna putih, sedangkan Baduy Luar umumnya mengenakan pakaian serta ikat kepala berwarna hitam.

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Baduy Dalam membatasi penggunaan teknologi modern, termasuk perangkat elektronik. Baduy Luar relatif lebih terbuka terhadap sejumlah pengaruh dari luar, meskipun tetap menjalankan aturan adat.

Pikukuh, Alam, dan Mata Pencaharian

Pikukuh menjadi pedoman penting yang mengatur hubungan masyarakat Baduy dengan sesama manusia, leluhur, dan lingkungan. Prinsip tersebut tercermin dalam cara mereka menjaga kawasan hutan dan menjalankan kehidupan sederhana.

Bercocok tanam menjadi salah satu mata pencaharian utama masyarakat Baduy, terutama melalui sistem pertanian padi huma atau ladang. Mereka juga membuat berbagai kerajinan, seperti kain tenun, tas koja, serta perlengkapan tradisional lainnya.

Kepercayaan Sunda Wiwitan menjadi bagian dari kehidupan spiritual masyarakat Baduy. Ajarannya berkaitan dengan penghormatan terhadap leluhur dan kepatuhan terhadap pikukuh yang diwariskan secara turun-temurun.

Salah satu tradisi yang dikenal luas adalah Seba Baduy. Dalam kegiatan tahunan tersebut, masyarakat Baduy berjalan kaki menuju pusat pemerintahan untuk bersilaturahmi sekaligus membawa hasil bumi sebagai bentuk penghormatan dan penyampaian pesan kepada pemerintah.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

LINGKUNGAN

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Sukanto Tanoto Dicabut, Pemerintah Didesak Hitung Kerugian Negara

Oleh Redaksi · 22 Nov, 20.35 WIB

BANDA ACEH - Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Gerindra sekaligus Ketua Umum BPP Himpunan Pengusaha KAHMI (HIPKA), Kamrussamad mendesak agar pemerintah segera menghitung kerugian negara pasca disitanya lahan PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) milik taipan Sukanto Tanoto yang berlokasi di Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau."(Kami) mendesak pemerintah segera menghitung kerugian negara dari praktik under invoicing, penggelapan pajak, transfer pricing, kerusakan ekosistem lingkungan, kerusakan tatanan sosial dan budaya masyarakat adat," kata Kamrussamad dalam keterangan yang diterima Inilah.com di Jakarta, Minggu (22/11/2026).

Diketahui, lahan konsesi PT RAPP seluas sekitar 338.536 hektare di Riau telah diambil alih kembali oleh negara. Langkah penindakan ini diumumkan oleh Satgas PKH pada 20 November 2026 menyusul pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT RAPP melalui SK Menteri Kehutanan RI Nomor 971 Tahun 2026.

Kamrussamad lalu membeberkan bahwa kekayaan sumber daya alam Indonesia dikendalikan Sukanto Tanoto dari kantor pusat di Singapura.

"Meskipun pabrik, lahan, dan operasional lapangan PT RAPP sepenuhnya beroperasi di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau Indonesia dan berbadan hukum Indonesia (PT), namun pusat kendali korporasi dan strategi globalnya berada di Singapura. Hal ini menunjukkan komitmen untuk memajukan NKRI jauh dari semangat pendiri bangsa," ungkapnya.

Di samping itu, dia mengingatkan agar pemerintah dapat memitigasi risiko nasib para pekerja yang terlibat dalam bisnis PT RAPP tersebut.

"Kami mengingatkan agar pemerintah memitigasi risiko nasib karyawan, pekerja, supplier, mitra bisnis RAPP agar memastikan keberlangsungan bisnis tersebut dalam kendali negara tetap stabil," jelasnya.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

GP Ansor Dukung Dasco jadi Wapres RI, Dinilai Mampu Jembatani Berbagai Kepentingan

Oleh Redaksi · 23 Nov, 10.17 WIB



BANDA ACEH - Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda (GP) Ansor secara resmi menyatakan dukungan kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad untuk menjadi calon wakil presiden (wapres) menggantikan Gibran Rakabuming Raka. Dasco dinilai memiliki pengalaman Politik yang mumpuni serta kapasitas untuk menjadi penghubung berbagai kepentingan di tengah dinamika politik nasional.

Pernyataan itu disampaikan Ketua Koordinator Bidang Politik dan Pemerintahan PP GP Ansor, H. Muhamad Ainul Yakin dalam konfrensi pers di Jakarta, Senin (23/11).

Menurutnya, kondisi kebangsaan setelah pengunduran diri wapres membutuhkan sosok pendamping Presiden Prabowo Subianto yang memiliki pengalaman sekaligus mampu menjaga stabilitas pemerintahan.

”Kami melihat sepak terjang Prof Dasco sebagai pimpinan DPR telah banyak membantu pemerintah menyelesaikan persoalan,” kata Yakin.

Dia menjelaskan, salah satu keunggulan Dasco adalah pengalaman panjang dalam dinamika politik nasional. Selain itu, Dasco dinilai memiliki kesamaan ideologi dengan Prabowo sehingga keduanya sudah memahami karakter dan pola kerja masing-masing.

Kedekatan tersebut dianggap menjadi modal penting apabila Dasco nantinya dipercaya menduduki kursi orang nomor dua di Indonesia. Dengan demikian, proses penyesuaian terhadap lingkungan kerja pemerintahan tidak membutuhkan waktu panjang.

”Begitu dilantik, langsung kerja,” tegasnya.

Yakin juga menilai, Dasco memiliki kemampuan komunikasi politik yang baik untuk merangkul berbagai kelompok. Mulai dari unsur parlemen, kekuatan politik di luar parlemen, organisasi masyarakat sipil, hingga kalangan dunia usaha.

Kemampuan membangun komunikasi lintas kelompok tersebut dinilai penting agar pemerintahan Prabowo dapat berjalan dengan dukungan yang lebih luas. Dasco dianggap mampu menjadi figur pemersatu di tengah beragam kepentingan politik dan sosial.

Dari sisi keterwakilan wilayah, Dasco yang berasal dari Pulau Sumatera juga dinilai dapat melengkapi latar belakang geografis Presiden Prabowo yang memiliki darah Indonesia Timur dan Jawa.

”Beliau ini mampu menjadi penghubung, mampu menjadi katalisator ke semua elemen,” ujar Yakin.

GP Ansor menegaskan, dukungan terhadap Dasco merupakan sikap politik organisasi yang didasarkan pada kemandirian dalam menyikapi persoalan kebangsaan. Sebagai badan otonom Nahdlatul Ulama (NU), GP Ansor menyatakan memiliki tanggung jawab untuk turut mengawal perjalanan bangsa.

Yakin menyebut, nilai perjuangan Ansor dan Banser dalam menjaga ulama serta keutuhan negara menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan sikap. Karena itu, pihaknya mendorong figur yang dinilai memiliki kapasitas kepemimpinan dan relatif dapat diterima berbagai kelompok politik.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

HIBURAN

Isu Ahmad Dhani Menikah Lagi, Pernyataan Soal Mulan Jameela Viral

Oleh Redaksi · 22 Nov, 21.42 WIB

BANDA ACEH - Musisi Ahmad Dhani menjadi perbincangan pada media sosial setelah muncul isu dirinya telah menikah lagi dengan seorang perempuan yang disebut-sebut berusia sebaya dengan putra sulungnya, Al Ghazali. Di tengah rumor yang belum terkonfirmasi tersebut, video lama Dhani yang membahas rumah tangganya bersama Mulan Jameela kembali viral.Video tersebut memperlihatkan Ahmad Dhani berbincang dengan Gading Marten, Andre Taulany, dan Desta dalam siniar Taulany TV. Dalam percakapan itu, Dhani mengungkapkan, dia pernah berencana bercerai dari Mulan Jameela.

"Jadi setahun yang lalu gue memutuskan mau cerai sama Mulan. Kalau kenapanya tidak usah diceritain," ujar Dhani dalam video tersebut.

Dhani mengaku sempat mengumpulkan ketiga putranya dari pernikahan terdahulu, yakni Al Ghazali, El Rumi, dan Dul Jaelani, untuk membicarakan rencana perceraian tersebut.

Menurut Dhani, Al dan Dul menangis ketika mendengar rencana itu. Namun, ia menilai tangisan keduanya bukan semata karena kemungkinan dirinya berpisah dari Mulan.

Dhani menyebut kedua putranya mengkhawatirkan nasib Safeea dan Ali, anak-anak dari pernikahannya dengan Mulan, yang berpotensi mengalami pengalaman serupa ketika orang tua mereka berpisah.

Dalam perbincangan tersebut, Dhani juga menjelaskan alasan rencana perceraiannya dengan Mulan akhirnya tidak terlaksana.

Menurut pengakuannya, hubungan rumah tangga mereka membaik setelah terjadi perubahan dalam dinamika hubungan suami istri.

Dhani bahkan menyebut dirinya pernah mempersilakan Mulan mengajukan gugatan cerai apabila ingin mengakhiri pernikahan.

"Saya sudah mempersilakan dia kalau memang mau gugat cerai dan ingin mengakhiri pernikahan ini," ungkapnya.

Ia juga menyampaikan pandangan pribadinya mengenai hubungan laki-laki dan perempuan. "Pokoknya jangan memaksa laki-laki untuk tidak menyukai perempuan lain. Dan kalau gue menikah lagi setelah gue bercerai, itu takdir," kata Dhani.

Dalam kesempatan yang sama, Dhani sempat melontarkan pernyataan bahwa dirinya merupakan seorang playboy dan menyebut dirinya sebagai buaya darat, laut, hingga udara.

Kemunculan kembali video tersebut bertepatan dengan ramainya spekulasi mengenai kehidupan pribadi Ahmad Dhani di media sosial.

Sejumlah warganet mengaitkan pernyataan lama Dhani dengan rumor bahwa dirinya telah menikah lagi.

Namun, hingga berita ini disusun, belum ada pernyataan resmi dari Ahmad Dhani maupun Mulan Jameela yang mengonfirmasi kabar tersebut. Identitas perempuan yang disebut-sebut sebagai istri baru Dhani juga belum dapat dipastikan.

NASIONAL

Motif Dugaan Makar Listyo Sigit Cs: Ternyata Pertahankan Jabatan Kapolri

Oleh Redaksi · 23 Nov, 20.55 WIB



BANDA ACEH -Bareskrim Polri mengungkap dugaan motif enam tersangka makar, yakni Listyo Sigit Prabowo (LSP), Slamet Uliandi (SU), Eko Hadi (EH), Ahrie Sonta (ASN), Tedjo Kusumo (TK), dan Iman Imanuddin (II).

Motif dari keenam tersangka adalah mempertahankan jabatan Kapolri melalui upaya melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Demikian dikatakan Kepala Bareskrim Polri Komjen Asep Safrudin di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan pada Senin malam, 23 November 2026.

”Para tersangka diduga telah melakukan permufakatan persiapan dan permulaan pelaksanaan makar dengan motif mempertahankan jabatan Kapolri untuk tujuan konstelasi Politik dengan cara melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto,” kata Asep.

Dalam menjalankan aksinya, Listyo didampingi dan didukung oleh lima orang tersangka lainnya.

”Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri telah menetapkan enam orang tersangka dalam dugaan tindak pidana makar,” kata Asep.

Keenam tersangka dijerat pasal berlapis, mulai dari Pasal 160 KUHP, Pasal 191 KUHP, Pasal 193 ayat (1) KUHP, Pasal 196 ayat (1) KUHP, Pasal 20 huruf a, Pasal 20 huruf b, Pasal 20 huruf c, Pasal 20 huruf d KUHP dengan ancaman terberatnya adalah pidana mati.

”Adapun ancaman hukuman pada pasal dugaan tindak pidana makar tersebut adalah tindak pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun,” kata Asep.

NASIONAL

Bareskrim Tetapkan 6 Tersangka Kasus Makar, Listyo Sigit hingga Iman Imanuddin

Oleh Redaksi · 23 Nov, 21.04 WIB



BANDA ACEH - Polri mengungkap perkembangan terkini kasus dugaan tindak pidana makar terkait penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Bareskrim Polri menetapkan enam orang sebagai tersangka.

Hal itu disampaikan Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan pada Senin (23/11/2026).

“Penyidik Dittipidum Bareskrim Polri telah menentapkan enam orang sebagai tersangka,” kata Asep.

Adapun, keenam tersangka dugaan makar di antaranya eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), Irjen Ahrie Sonta Nasution (ASN) , Irjen Eko Hadi Santoso (EH), Irjen Slamet Uliandi (SU), Brigjen Tedjo Kusumo (TK), dan Kombes Iman Imanuddin (II).

Sebagai informasi, Bareskrim Polri diketahui menetapkan eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Selain Listyo Sigit, Bareskrim juga menetapkan tiga tersangka lainnya yakni Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso dan Irjen Slamet Uliandi.

Untuk tiga tersangka yakni Listyo Sigit Prabowo, Eko Hadi Santoso dan Ahrie Sonta kini ditahan di Rutan Mako Brimob. Sedangkan Slamet Uliandi, ia tak dilakukan penahanan.

Terbaru, Irjen Eko Hadi menyusul Irjen Ahrie Sonta yang telah lebih dulu dipecat tidak dengan hormat (PTDH) dari Polri. Putusan PTDH terhadap Ahrie Sonta dibacakan pada Selasa (10/11/2026) lalu.

NASIONAL

Mahfud MD Duga Titipan Politik di Balik Eksekusi Silfester

Oleh Redaksi · 23 Nov, 10.10 WIB



BANDA ACEH - Belum dieksekusinya terpidana kasus pencemaran nama baik mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Silfester Matutina, kembali menjadi sorotan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) sekaligus mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD.

Mahfud menyoroti belum dilaksanakannya eksekusi terhadap Silfester, yang telah tujuh tahun dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Sorotan itu muncul setelah beredar video Silfester menghadiri peresmian kafe milik anaknya di Bandung beberapa hari lalu.

Padahal, sebagai terpidana yang telah dijatuhi hukuman, Silfester seharusnya menjalani putusan pidana tersebut.

"Loh selama ini ke mana? Kejaksaan gitu ya," ujar Mahfud dalam salah satu diskusi dikutip Senin (23/11/2026).

Mahfud mengaku telah menanyakan langsung kepada pihak internal Kejaksaan mengenai alasan Silfester belum juga dieksekusi. Namun, jawaban yang diterimanya justru mengarah pada pejabat di tingkat atas.

"Nah kalau saya sih Mas politis nih ya. Punya dugaan. Itu kan gini saya tanya ke dalam. Itu kenapa kok tidak ditangkap itu ke direktorat lah. Tanya ke atas Pak. Artinya itu kunci di atas," kata Mahfud.

Dari jawaban tersebut, Mahfud menduga terdapat kemungkinan intervensi atau titipan politik yang menyebabkan eksekusi terhadap Silfester tidak kunjung dilaksanakan.

Ia bahkan menduga perkara tersebut telah menjadi titipan sejak ST Burhanuddin diangkat sebagai Jaksa Agung.

"Oh kalau begitu mungkin ya ketika Pak Jaksa Agung ini mungkin ya kan mungkin boleh ketika Agung itu Pak Burhanudin diangkat jadi jaksa agung mungkin ini dititipkan tolonglah ini kan perkara kecil kan memang perkara khusus gitu ya," ujar Mahfud.

"Bilang siap gitu kan iya lalu diangkat jadi jaksa agung sehingga meskipun dia tahu enggak pernah mengeluarkan instruksi apa pun hal yang sekecil ini tapi akibatnya besar bagi penegakan hukum," lanjutnya.

Menurut Mahfud, perkara Silfester mungkin tergolong kecil jika dilihat dari bobot pidananya. Namun, pembiaran terhadap eksekusi putusan pengadilan justru memiliki dampak besar terhadap kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.

Sebab, ketika seorang terpidana tidak menjalani hukuman sebagaimana putusan pengadilan, persoalannya tidak lagi sebatas individu, tetapi menyangkut konsistensi aparat dalam menjalankan hukum.

Mahfud meminta Kejaksaan Agung tidak membiarkan persoalan tersebut berlarut-larut.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Ternyata Mabes Polri Belum Pastikan Jadwal Sidang Etik Listyo Sigit

Oleh Redaksi · 23 Nov, 19.36 WIB



BANDA ACEH -Mabes Polri belum menetapkan jadwal pasti pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap mantan Kapolri Jenderal Polisi (Purn) Listyo Sigit Prabowo selaku terduga pelanggar dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divhumas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, kepastian tanggal pelaksanaan hingga susunan majelis sidang KKEP masih dalam tahap finalisasi internal.

"Terkait jadwalnya, seperti minggu lalu sudah kami sampaikan. Penyampaian kami adalah pekan depan atau minggu ini. Secara pasti sama-sama nanti kita menunggu untuk kepastian, mulai dari tanggal, pelaksanaan harinya, dan siapa majelisnya," kata Trunoyudo dalam keterangannya di Jakarta, Senin, 23 November 2026.

Merujuk pada Pasal 59 Peraturan Kepolisian (Perpol) tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, kehadiran terduga pelanggar dalam persidangan bersifat wajib.

Meski aturan tersebut membuka opsi kehadiran secara dalam jaringan (daring), keputusan mengenai mekanisme kehadiran tetap berada sepenuhnya di tangan ketua majelis sidang.

"Sidang KKEP wajib dihadiri oleh terduga pelanggar secara langsung atau melalui media elektronik atas persetujuan ketua KKEP," tegasnya.

Trunoyudo memastikan Polri tetap mengedepankan prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law) dalam memproses perkara tersebut.

Sebelum agenda sidang terhadap Listyo Sigit, Polri tercatat telah lebih dulu menggelar sidang etik dalam rangkaian kasus serupa terhadap dua perwira tinggi lainnya, yakni Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso.

NASIONAL

MPR Tetapkan Wapres Tanggal 11 Desember

Oleh Redaksi · 23 Nov, 12.54 WIB



BANDA ACEH - Ketua MPR RI Ahmad Muzani menjelaskan, sidang paripurna MPR untuk menetapkan calon wakil presiden akan dilakukan pada tanggal 11 Desember 2026.

"Semula ditetapkan Sidang Paripurna MPR untuk menetapkan wapres tanggal 9 Desember 2026. Tetapi kita undur menjadi tanggal 11 Desember 2026," kata Muzani di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Senin (23/11/2026).

Muzani juga mengatakan, sore ini MPR RI akan menerima dua nama calon wakil presiden.

"Kita menunggu dua nama cawapres dan sore ini akan diserahkan," kata dia.

Dua nama cawapres yang beredar adalah Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad dan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia, Yusril Ihza Mahendra

ACEH

Perkuat Pemberantasan Narkoba, TNI AL Musnahkan 20,07 Kilogram Sabu

Oleh Van · 22 Nov, 15.01 WIB



Personel TNI AL menunjukkan paket barang bukti hasil penyitaan di sebuah pelabuhan. Tindakan ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum dan keamanan laut.

ACEH TAMIANG – Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 20,07 kilogram hasil pengungkapan Quick Response Team (QRT) Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Lhokseumawe di wilayah pesisir Kabupaten Aceh Tamiang.

Pemusnahan tersebut merupakan tindak lanjut dari keberhasilan personel QRT Lanal Lhokseumawe dalam menggagalkan dugaan penyelundupan narkotika melalui jalur pesisir. Barang bukti yang diamankan terdiri atas 20 paket sabu yang dikemas menggunakan bungkus teh.

Pengungkapan kasus bermula dari informasi masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan di kawasan pesisir Aceh Tamiang.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Amran Sulaiman dan Sugiono Diusulkan Jadi Cawapres, MPR Langsung Verifikasi

Oleh Redaksi · 23 Nov, 17.47 WIB



BANDA ACEH - Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) langsung bergerak untuk melakukan verifikasi usai Presiden Prabowo Subianto menyerahkan dua nama calon wakil presiden (cawapres) untuk sisa masa jabatan hingga 2029. Adapun, dua tokoh yang diusulkan yakni Andi Amran Sulaiman dan Sugiono.

"Dua nama yang diusulkan pertama Andi Amran Sulaiman dan kedua Sugiono," ujar Ketua MPRAhmad Muzani dalam konferensi pers, Senin (23/11/2026).

Muzani menambahkan, kedua calon akan mengikuti tahapan verifikasi, termasuk pemeriksaan kesehatan yang mekanismenya akan dikoordinasikan oleh tim verifikasi.

"Setelah nama ini masuk, maka tim verifikasi yang dibentuk oleh MPR akan segera melakukan pekerjaan dan sore ini akan rapat untuk mempersiapkan verifikasi untuk dua (calon) wakil presiden tersebut," kata dia.

MPR sebelumnya telah memutuskan Sidang Paripurna untuk pengisian jabatan Wakil Presiden digelar pada Jumat, 11 Desember 2026. Jadwal tersebut berubah dari sebelumnya ditetapkan pada 9 Desember 2026.

Perubahan jadwal dilakukan setelah MPR mempertimbangkan ketentuan tenggat waktu pengajuan nama calon wakil presiden serta prinsip kehati-hatian dalam menafsirkan aturan konstitusi

NASIONAL

Jelang Usulan 2 Nama Cawapres, Anas Ungkap Ada Gerakan 'Di Bawah Meja' Parpol

Oleh Redaksi · 23 Nov, 15.59 WIB



BANDA ACEH - Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Anas Urbaningrum menilai terdapat gerakan di bawah meja partai Politik (parpol) menjelang pengusulan dua nama calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka.Menurut Anas, lobi-lobi politik tersebut masih berlangsung meskipun hingga kini belum ada partai politik yang secara terbuka mengajukan kadernya untuk menjadi cawapres pendamping Presiden Prabowo Subianto.

"Menjelang usulan 2 nama Cawapres, memang secara formal tidak ada parpol yang secara resmi (baca : terbuka) mengajukan nama. Tetapi di bawah meja, ternyata tetap ada yang usreg sedemikian rupa," tulisnya di akun X pribadinya, dikutip Senin (23/11).

Ia kemudian mengungkapkan bahwa proses tersebut dilakukan dengan cara yang terselubung.

"Kerjanya ada yg tersampul halus. Memunculkan nama, sambil menyodok yang lain. Termasuk dengan serbuan opini bertubi-tubi. Agak khas ini caranya. Memang detil dan rapi," jelasnya.

Anas menilai Presiden Prabowo seharusnya mampu memahami berbagai manuver politik yang terjadi di balik proses pengusulan cawapres. Ia juga mengingatkan agar Prabowo tetap waspada.

"Dengan mata dan telinganya, juga pengalamannya, Presiden Prabowo (harusnya) tahu dan mengerti persis, serta tidak kehilangan waspada. Kalau saya, terus terang (sudah) agak hafal. Hihihi," tandasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan bahwa hampir seluruh ketua umum partai politik koalisi pemerintah sepakat untuk tidak mengajukan kader dari partai masing-masing setelah dipanggil oleh Presiden Prabowo Subianto.

Partai menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo untuk memilih kader Gerindra yang dinilai paling nyaman dan tepat mendampinginya.

"Hampir semua ketum parpol tidak mengajukan kadernya. Kita sepakat dari Gerindra," ujarnya saat menghadiri Lamsel Fest 2026 di Kalianda, Lampung Selatan, dikutip Minggu (16/11/2026).

NASIONAL

Dunia Politik Disebut Edan! Begini Dahsyatnya Perebutan Kursi Wapres Pengganti Gibran

Oleh Redaksi · 23 Nov, 15.53 WIB



BANDA ACEH - Pegiat media sosial Ferry Koto menilai dinamika perpolitikan Indonesia cukup gila, khususnya terkait perebutan kursi Wakil Presiden setelah Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri.Menurut Ferry, perebutan kursi pengganti Gibran tersebut berlangsung sangat dahsyat. Ia pun menyoroti sikap Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Hasan Nasbi.

Hasan Nasbi dinilai menyiratkan bahwa Gibran membebani Presiden Prabowo Subianto melalui narasinya. Padahal, sebelumnya Hasan sempat keras mengkritik Prabowo ketika menjadi pendukung Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

"Ckckck.... Ternyata perebutan kursi wapres ini sedemikian dahsyat. Sampai Hasan Nasbi yg dulu mencaci maki pak Prabowo hanya karena jadi pendukung pak Jokowi, berbalik dgn narasi yg mengesankan Wapres sebelumnya ndak bisa kerja, membebani Presiden," tulisnya di akun X pribadinya, dikutip Senin (23/11).

Ferry mengatakan, dalam narasi tersebut, Hasan juga memberikan dukungan kepada sosok yang dijulukinya sebagai 'abang' untuk menduduki posisi pengganti Gibran.

"Sambil ia berikan dukungan ke "Bang xxxx" untuk jadi Wapres. Dunia Politik memang edan. Kalau ndak edan ndak bisa menikmati kekuasaan," tandasnya.

Sebelumnya, Hasan Nasbi mengungkapkan ciri-ciri sosok Wakil Presiden idaman untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto memimpin pemerintahan.

Ia menyebut sosok tersebut sebagai 'abang' yang memiliki aktivitas di parlemen dan dinilai berpotensi meringankan beban Prabowo setelah Gibran Rakabuming Raka resmi mundur.

"Kalau saya membayangkan mungkin abang ini ada di posisi eksekutif, kemudian misalnya menjadi salah satu calon Wakil Presiden dan mempunyai kesempatan membantu Presiden sebagai Wakil Presiden, maka saya membayangkan sebagian besar persoalan yang menumpuk di meja Presiden tidak akan lagi membebani Presiden," ujar Hasan melalui kanal YouTube pribadinya, dikutip Senin (23/11).

NASIONAL

MPR Tetapkan Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Digelar Dua Sesi

Oleh Redaksi · 23 Nov, 19.13 WIB



BANDA ACEH -MPR RI menyepakati jadwal pelaksanaan Rapat Paripurna Istimewa untuk pemilihan dan penetapan Wakil Presiden pada Jumat, 11 Desember 2026.

Kesepakatan tersebut diambil dalam Rapat Gabungan Pimpinan MPR RI bersama pimpinan fraksi-fraksi dan Kelompok DPD di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 23 November 2026.

"Tadi dengan masukan banyak pakar tata negara, kajian ahli, dan lain sebagainya, MPR mendengar. Kemudian tadi diputuskan mengubah jadwal semula tanggal 9 menjadi tanggal 11 Desember," jelas Sekretaris Fraksi PKS MPR RI, Johan Rosihan.

Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat (NTB) I itu menjelaskan sidang paripurna MPR pada 11 Desember akan dibagi menjadi dua sesi.

"Sesi pertama adalah rapat paripurna MPR untuk mengesahkan rancangan keputusan berupa tata cara pemilihan kepada semua anggota MPR," ungkapnya.

Sedangkan sesi kedua dilanjutkan dengan proses pemilihan dan penetapan calon Wakil Presiden yang diajukan Presiden.

Dengan adanya penyesuaian jadwal dan tahapan tersebut, proses pemilihan Wakil Presiden diharapkan dapat berlangsung secara tertib, transparan, dan memiliki dasar konstitusional yang dapat dipertanggungjawabkan.

Perubahan jadwal juga menjadi pengingat pentingnya ketelitian dalam menafsirkan ketentuan konstitusi sekaligus kesediaan lembaga negara untuk mendengarkan kritik dan masukan publik

NASIONAL

Ketua DPD Gagas Indonesia Punya 3 Wapres, Wakil Ketua MPR: Kalau Usul yang Benar Lah

Oleh Redaksi · 23 Nov, 12.42 WIB



BANDA ACEH - Wakil Ketua MPRBambang Wuryanto menanggapi usulan Ketua DPD Sultan B Najamudin agar ada tiga Wakil Presiden (Wapres) untuk mendampingi Presiden. Bambang Pacul, sapaan akrabnya, menyampaikan, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 telah mengatur bahwa hanya ada satu Wapres yang mendampingi Presiden.

"Itu UUD '45 hanya satu Wapres. Jadi kalau usulan itu harus mengubah Undang-Undang Dasar '45, dong. Itu namanya amandemen, kan gitu. Dibantu dengan satu wakil presiden," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (23/11/2026).

Bambang meminta Sultan melontarkan usulan yang benar. Apalagi, kata dia, usulan itu dilayangkan oleh pimpinan lembaga tinggi negara.

"Pimpinan tuh ya jangan, (kalau) usul yang benar lah," ujar Bambang.

"Nggak ada lah (urgensi tiga wapres)," kata politisi PDI Perjuangan (PDIP) ini.

Sebelumnya, Ketua DPD Sultan B Najamudin, melontarkan wacana agar Indonesia memiliki lebih dari tiga wapres. Usulan ini disampaikan di tengah proses pencarian sosok wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka yang mengundurkan diri pada 12 November 2026.

Sultan mengusulkan agar ketiga wapres tersebut merepresentasikan wilayah Indonesia bagian Barat, Tengah dan Timur, serta berkantor secara terpisah di Sumatra, Kalimantan dan Papua.

Menurutnya, luasnya wilayah geografis Indonesia serta kompleksitas sosiologis membuat setiap daerah memiliki karakteristik dan tantangan berbeda.

NASIONAL

Jokowi Mulai Jaga Jarak dari Prabowo? Pengamat Bongkar Strategi Politik di Balik PSI

Oleh Redaksi · 23 Nov, 14.27 WIB



BANDA ACEH - Pernyataan Joko Widodo (Jokowi) bahwa tidak ada lagi kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Kabinet Merah Putih dinilai menyimpan strategi Politik. Guru Besar Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Burhanuddin Muhtadi, melihat langkah tersebut sebagai upaya memisahkan citra PSI dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.Menurut Burhanuddin, pemisahan citra atau disasosiasi politik itu berpotensi menguntungkan PSI maupun Jokowi. Terlebih, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo disebut mengalami penurunan dalam beberapa bulan terakhir.

"Mendisasosiasi PSI dengan pemerintah itu menguntungkan karena kita tahu elektabilitas pemerintahan Pak Prabowo sedang turun dalam beberapa bulan ini," ujar Burhanuddin dalam sebuah siniar, Minggu, 22 November 2026.

Dengan tidak memiliki kader di kabinet, PSI dinilai mempunyai ruang lebih luas untuk membangun identitas politik sendiri. Partai yang dipimpin Kaesang Pangarep tersebut juga tidak harus ikut menanggung konsekuensi politik dari kebijakan pemerintahan Prabowo.

Burhanuddin menilai kondisi itu memungkinkan PSI mengambil posisi yang lebih fleksibel. Di satu sisi, partai tersebut masih dapat menjaga kedekatan dengan lingkaran kekuasaan, tetapi di sisi lain memiliki kesempatan membangun citra di luar pemerintahan.

Strategi tersebut juga dinilai memperjelas posisi politik PSI di mata pemerintahan Prabowo. Tanpa keterwakilan kader di kabinet, PSI kini dapat disejajarkan dengan partai yang berada di luar pemerintahan.

Burhanuddin bahkan menyebut posisi PSI saat ini memiliki kemiripan dengan PDI Perjuangan yang juga tidak menempatkan kadernya di Kabinet Merah Putih.

"Yang jelas PSI itu sama dengan PDI Perjuangan," kata Burhanuddin.

Meski demikian, absennya kader PSI di kabinet belum otomatis menggambarkan arah hubungan politik Jokowi, PSI, dan Prabowo ke depan. Pasalnya, sejumlah tokoh yang memiliki hubungan dengan PSI masih menduduki jabatan strategis dalam pemerintahan.

NASIONAL

Elite Gerindra Mendadak Kumpul di Hambalang, Ada Dasco hingga KDM! Prabowo Siapkan Kejutan Cawapres?

Oleh Redaksi · 23 Nov, 08.30 WIB



BANDA ACEH – Elite Gerindra merapat ke Hambalang menemui Prabowo di tengah tenggat penyerahan dua nama cawapres pengganti Gibran kepada MPR yang kian dekat.

Kediaman Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mendadak didatangi sejumlah tokoh penting Partai Gerindra dan pejabat pemerintahan, Minggu (22/11/2026).

Kehadiran para elite tersebut menjadi sorotan karena berlangsung menjelang penyerahan dua nama calon wakil presiden (cawapres) kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.

Sejumlah nama besar terlihat mendatangi Padepokan Garudayaksa di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang.

Di antaranya Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dan Ketua Komisi IV DPR RI yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Titiek Soeharto.

Tak hanya petinggi partai, sejumlah pejabat pemerintahan juga terlihat hadir.

Mereka adalah Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa KDM, serta Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak.

Para tokoh tersebut mulai berdatangan sejak Minggu siang.

Mereka kemudian terlihat meninggalkan kawasan kediaman Prabowo sekitar pukul 18.00 WIB.

Pertemuan ini langsung menarik perhatian karena waktunya berdekatan dengan tenggat pengajuan dua nama calon wakil presiden kepada MPR RI.

Terlebih, kehadiran Dasco, Titiek Soeharto, hingga Dedi Mulyadi memunculkan perhatian terhadap kemungkinan adanya pembahasan penting di lingkungan pemerintahan dan Partai Gerindra.

Namun, hingga para tokoh meninggalkan Hambalang, belum ada keterangan resmi mengenai agenda maupun materi pembicaraan yang dibahas bersama Prabowo.

Belum diketahui pula apakah pertemuan tersebut secara khusus membicarakan proses pengajuan nama pengganti Gibran Rakabuming Raka atau membahas agenda Politik dan pemerintahan lainnya.

NASIONAL

Momen Prabowo Keluarkan Jurus Silat saat Ditanya 2 Nama Cawapres Pengganti Gibran

Oleh Redaksi · 23 Nov, 17.37 WIB



BANDA ACEH - Ada momen unik saat Presiden Prabowo Subianto tiba di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/11/2026). Kedatangan Kepala Negara dalam rangka menyerahkan secara langsung dua nama calon wakil presiden (Cawapres) usulannya.

Momen menarik itu terjadi ketika Prabowo dicecar awak media ihwal dua nama yang dia usulkan kepada MPR. Bukannya langsung menuju ruang pertemuan, dia justru menghampiri awak media yang telah menunggu kedatangannya.

Prabowo terlihat merogoh isi kantongnya seraya ingin menunjukkan kepada awak media jika dia telah membawa kedua nama tersebut.

Sayangnya, Prabowo tak mengungkapkan siapa kedua nama Cawapres tersebut. Dia hanya memastikan akan menyerahkan di ruang pertemuan.

“Aku mau menyerahkan di dalam,” kata Prabowo.

Kemudian dia langsung menunjukkan gaya silatnya sebelum masuk ke dalam ruang pertemuan

NASIONAL

MPR Sebut Prabowo Bakal Setor Dua Nama Cawapres Pengganti Gibran Hari Ini

Oleh Redaksi · 23 Nov, 12.15 WIB



BANDA ACEH -Presiden Prabowo Subianto diagendakan bakal menyetor dua nama usulan calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka pada hari ini, Senin, 23 November 2026.

Hal itu dikonfirmasi langsung oleh Anggota Pokja III Tim Verifikasi MPR RI, Johan Rosihan, kepada wartawan beberapa saat lalu.

"Insyaallah info yang sampai ke kami begitu. Karena itu ada dua Ragab (Rapat Gabungan) hari ini," ungkap Johan.

Adapun Rapat Gabungan (Ragab) MPR RI hari ini dijadwalkan pada pukul 11.00 WIB dengan agenda perubahan jadwal Rapat Paripurna.

"Sore atau malam dengan agenda menerima surat presiden terkait cawapres," kata politikus PKS tersebut.

Pascamundurnya Gibran, merujuk pada Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Presiden mengusulkan dua calon Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Sejauh ini, terdapat tiga nama elite Partai Gerindra yang mencuat dalam bursa calon wakil presiden. Mereka adalah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono, serta Ketua MPR RI Ahmad Muzani.

LINGKUNGAN

Basarnas Sisir Pabrik Terbakar di Cikande, 36 Karyawan Masih Dicari

Oleh Van · 22 Nov, 13.56 WIB

BANTEN — Basarnas terus melakukan penyisiran di area pabrik permen PT Fonusa Agung Mulia yang terbakar di Kawasan Industri Pancatama, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten.

Kebakaran terjadi pada Sabtu, 21 November 2026 sekitar pukul 17.00 WIB dengan api membakar bangunan pabrik dan disertai kepulan asap hitam tebal.

Tim Basarnas Banten dikerahkan untuk membantu proses evakuasi serta pencarian karyawan yang belum diketahui keberadaannya.

36 Karyawan Masih dalam Pencarian

Pembaruan data terbaru Basarnas Banten, disebutkan bahwa ada 15 orang selamat dan 4 orang terluka yang dibawa ke RS Hermina Ciruas dan Klinik Modern.

Kemudian 3 mayat ditemukan oleh petugas, sehingga masih dilakukan 36 orang lainnya, di mana sebelumnya dilaporkan 39 orang dalam pencarian.

“Tiga orang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia,” ujar Kasubsie Operasi dan Siaga Kantor Pencarian dan Pertolongan (SAR) Banten, Rizky Dwianto kepada awak media pada …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id
Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

5 BERITA

ACEH

Perkuat Pencegahan Stunting, Kampong Subulussalam Timur Manfaatkan Pembelajaran Digital E-HDW

Oleh Wahda · 23 Nov, 12.10 WIB



Sesi pelatihan e-learning bagi warga untuk meningkatkan keterampilan digital di Kampong Subulussalam Timur.

SUBULUSSALAM – Pemerintah Kampong Subulussalam Timur, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, terus berupaya meningkatkan kapasitas aparatur kampong dan para kader dalam mendukung program Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (P3S).

Salah satu langkah yang dilakukan yakni melalui pemanfaatan E-HDW (Electronic Human Development Worker) sebagai sarana pembelajaran mandiri berbasis digital.

Kegiatan pembelajaran melalui sistem E-HDW E-Learning tersebut dilaksanakan di Aula Gedung Serbaguna Kantor Kepala Kampong Subulussalam Timur, Jumat (20/11/2026).

Kegiatan ini diprakarsai oleh Kepala Kampong Subulussalam Timur, Wahda, SE, dengan menghadirkan pelatih, Pendamping Desa, unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampong (DPMK), serta pihak Kecamatan Simpang Kiri.

Dalam pelaksanaannya, sejumlah peserta mendapatkan pelatihan dan pendampingan secara digital melalui platform E-HDW E-Learning. Peserta diarahkan untuk mengikuti materi pembelajaran secara mandiri guna meningkatkan pemahaman mengenai pembangunan manusia, khususnya dalam upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting di tingkat kampong.

Pelatihan ini diikuti oleh sejumlah peserta yang terdiri dari Admin Desa, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), Kader Pembangunan Manusia (KPM), serta Kader Posyandu.

Mereka merupakan unsur penting yang memiliki tanggung jawab dalam mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan manusia dan pelayanan masyarakat di tingkat kampong.

Melalui pembelajaran E-HDW, peserta mendapatkan berbagai materi penting terkait pencegahan stunting, mulai dari pemenuhan gizi ibu hamil, kesehatan ibu dan anak, pola asuh keluarga, pemantauan tumbuh kembang balita, pelayanan Posyandu, hingga pendataan dan pemantauan keluarga berisiko stunting.

Kepala Kampong Subulussalam Timur, Wahda SE mengatakan bahwa pembelajaran melalui E-HDW sangat penting untuk meningkatkan kemampuan aparatur kampong dan para kader dalam memahami tugas serta tanggung jawab masing-masing, khususnya dalam mendukung program pencegahan dan percepatan penurunan stunting.

Menurutnya, keberhasilan program penurunan stunting tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan pemerintah, tetapi juga membutuhkan kesiapan sumber daya manusia di tingkat kampong, terutama para kader yang berhadapan langsung dengan masyarakat.

Ia berharap melalui kegiatan pembelajaran tersebut, seluruh peserta dapat memahami materi yang disampaikan dan mengimplementasikannya dalam pelaksanaan tugas di lapangan.

"Melalui E-HDW ini, kita ingin membangun sumber daya manusia kampong yang lebih memahami pentingnya pencegahan stunting. Pengetahuan yang diperoleh jangan hanya berhenti pada kegiatan pembelajaran, tetapi harus diterapkan dalam pelayanan dan pendampingan kepada masyarakat," harap Wahda.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

Bupati Tarmizi Janjikan Solusi bagi Korban Kebakaran di Blang Beurandang

Oleh Biro Meulaboh · 23 Nov, 18.21 WIB



Bupati Tarmizi memberikan perhatian hangat kepada warga saat acara penyerahan bantuan sosial,FOTO/HAI

MEULABOH– Bupati Aceh Barat, Tarmizi SP, MM, bersama Kepala Dinas Sosial, BPBD, dan Baitul Mal mengunjungi sekaligus menyerahkan bantuan kepada korban kebakaran rumah di Kompleks Caritas, Desa Blang Beurandang, Kecamatan Johan Pahlawan, Senin (23/11/26).

Kebakaran yang terjadi pada Minggu (22/11/26) malam itu menghanguskan dua unit rumah warga hingga mengalami rusak berat. Seluruh harta benda milik korban dilaporkan tidak berhasil diselamatkan.

Bupati Tarmizi mengatakan, pemerintah daerah melalui BPBD, Dinas Sosial, dan Baitul Mal telah menyalurkan bantuan kebutuhan sandang dan pangan untuk memenuhi kebutuhan mendesak para korban.

"Tidak ada satu pun harta benda yang dapat diselamatkan. Hari ini pemerintah menyalurkan bantuan sandang dan pangan lengkap untuk kebutuhan masa panik," kata Tarmizi.

Ia menyebutkan, pemerintah daerah juga akan mengupayakan solusi jangka panjang, termasuk kemungkinan membantu perbaikan atau pembangunan kembali rumah warga yang terbakar.

Namun, saat ini terdapat kendala regulasi karena rumah yang terbakar belum masuk kategori bencana maupun rumah tidak layak huni yang dapat memperoleh bantuan.

Karena itu, Pemkab Aceh Barat tengah menggodok Peraturan Bupati (Perbup) bersama Baitul Mal agar ke depan rumah warga yang mengalami kebakaran, baik rusak ringan maupun berat, bisa mendapatkan bantuan secara maksimal.

Tarmizi turut mengingatkan para korban agar tetap tabah menghadapi musibah tersebut. Ia juga meminta keluarga memastikan anak-anak tetap bersekolah dan mendapat pendampingan agar tidak mengalami trauma.

Selain itu, masyarakat diimbau menyimpan nomor kontak pemadam kebakaran di telepon genggam masing-masing agar penanganan kebakaran dapat dilakukan secepat mungkin.

Ia juga mengingatkan warga untuk rutin memeriksa instalasi listrik, termasuk kabel dan stop-kontak di rumah. Jika ditemukan kabel rusak atau colokan longgar, masyarakat diminta segera memperbaiki atau menggantinya guna mencegah kebakaran.[]

Editorial: Biro Meulaboh.

ACEH

ANTARA Gelar Pameran Foto "Bangkit Sumatera" di Museum Tsunami Aceh

Oleh Redaksi · 22 Nov, 15.23 WIB

BANDA ACEH – Perum LKBN ANTARA menggelar pameran foto jurnalistik bertajuk "Bangkit Sumatera" di Museum Tsunami Aceh, pada 22–27 November 2026 sebagai upaya menghadirkan edukasi kebencanaan sekaligus merekam semangat masyarakat dalam bangkit dari bencana.

Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis Perum LKBN ANTARA Virgandhi Prayudantoro mengatakan pameran tersebut menghadirkan kisah ketangguhan masyarakat, solidaritas kemanusiaan, serta perjuangan warga dalam menata kembali kehidupan pascabencana melalui karya foto jurnalistik.

"Di balik setiap musibah dan tantangan yang melanda saudara-saudara kita di Sumatera, selalu ada cerita kepahlawanan warga, kerja keras para relawan, dan semangat pantang menyerah untuk menata kembali kehidupan di masa depan," kata Virgandhi.

Pameran tersebut menyuguhkan 88 foto tunggal dan dua foto cerita jurnalistik karya pewarta foto ANTARA yang merekam berbagai peristiwa bencana, kondisi masyarakat terdampak, upaya penanganan, solidaritas kemanusiaan, hingga proses pemulihan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Virgandhi mengatakan Museum Tsunami Aceh dipilih sebagai lokasi pameran karena memiliki nilai historis dan menjadi ruang refleksi sekaligus edukasi kebencanaan, terutama bagi masyarakat Aceh yang memiliki pengalaman panjang menghadapi bencana.

ACEH

Kinerja Penegakan Hukum Polres Aceh Barat Masuk Dua Besar Polda Aceh

Oleh Biro Meulaboh · 22 Nov, 12.14 WIB

BANDA ACEH – Polres Aceh Barat menempati peringkat kedua dalam persentase penyelesaian perkara di jajaran Polda Aceh untuk periode 1 Januari hingga 15 November 2026. Berdasarkan data aplikasi Daily Operation Reporting System (DORS), capaian Polres Aceh Barat mencapai 135,70 persen.

Posisi pertama ditempati Polres Lhokseumawe dengan capaian 137,86 persen, disusul Polres Aceh Barat di posisi kedua dan Polres Aceh Selatan di peringkat ketiga dengan persentase 128,80 persen.

Capaian tersebut disampaikan dalam kegiatan Gelar Operasional (GO) Polda Aceh yang berlangsung pada 19–20 November 2026. Kegiatan ini menjadi forum evaluasi kinerja kepolisian, termasuk penanganan dan penyelesaian perkara di seluruh wilayah hukum Polda Aceh.

Kapolres Aceh Barat AKBP Agus Sulistianto, S.H., S.I.K., mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja keras, dedikasi, dan sinergi seluruh personel, khususnya jajaran fungsi reserse.

Ia mengapresiasi personel yang telah berkomitmen menangani laporan masyarakat dan menyelesaikan perkara sesuai ketentuan hukum. Menurutnya, capaian itu bukan sekadar angka evaluasi organisasi, melainkan bagian dari tanggung jawab Polri dalam memberikan pelayanan dan kepastian hukum kepada masyarakat.

Meski demikian, Kapolres mengingatkan jajarannya agar tidak berpuas diri. Ia meminta seluruh personel terus meningkatkan kualitas penyelidikan dan penyidikan, mempercepat penanganan perkara tanpa mengabaikan prosedur, serta memastikan setiap laporan masyarakat ditindaklanjuti secara optimal.

Agus menegaskan, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari persentase penyelesaian perkara, tetapi juga dari kualitas penanganan, transparansi proses, kepastian informasi, dan rasa keadilan bagi masyarakat.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

Pembangunan RS Regional dan Jalan Meulaboh-Tutut Masuk Prioritas 2027

Oleh Biro Meulaboh · 23 Nov, 17.29 WIB



Bupati Tarmizi bersama Kadinkes Aceh, FOTO/ist

MEULABOH – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan kesehatan. Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan Pemerintah Aceh, khususnya terkait rencana pembangunan Rumah Sakit (RS) Regional dan penanganan ruas Jalan Meulaboh-Tutut pada Tahun Anggaran 2027.

Bupati Aceh Barat, Tarmizi, S.P., M.M., mengatakan pihaknya telah melanjutkan rangkaian pertemuan dengan menjumpai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Kesehatan Aceh serta jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh, Minggu kemarin.

Dalam pertemuan tersebut, sejumlah aspek teknis dibahas, terutama menyangkut usulan pembangunan RS Regional serta rencana penanganan Jalan Meulaboh-Tutut yang menjadi salah satu kebutuhan penting masyarakat.

"Alhamdulillah, anggaran untuk tahun 2027 sudah ada. Namun, pelaksanaannya tetap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah," ujar Tarmizi.

Khusus untuk pembangunan jalan, Tarmizi menjelaskan bahwa penanganan nantinya akan difokuskan pada sejumlah titik yang kondisinya paling parah. Langkah ini diambil agar keterbatasan anggaran dapat dimanfaatkan secara efektif dengan mendahulukan ruas yang paling membutuhkan perbaikan.

Menurutnya, penentuan titik prioritas menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas infrastruktur sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama pengguna jalan yang selama ini menghadapi kondisi ruas jalan yang membutuhkan perhatian serius.

Sementara itu, pembahasan teknis pembangunan RS Regional juga menjadi bagian dari langkah pemerintah daerah dalam memperkuat fasilitas dan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat Aceh Barat dan sekitarnya.

Melalui koordinasi dengan jajaran Pemerintah Aceh, Pemkab Aceh Barat berharap berbagai usulan pembangunan tersebut dapat dipersiapkan dengan matang sehingga pelaksanaannya pada Tahun Anggaran 2027 berjalan sesuai perencanaan dan kemampuan anggaran yang tersedia.[]

Editorial: Biro Meulaboh.

ACEH

Pangdam IM Resmi Melantik 626 Prajurit Dikmata Infanteri TNI AD Gelombang III TA 2026

Oleh Redaksi · 23 Nov, 13.24 WIB



BANDA ACEH, BANDA ACEH – Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda (Pangdam IM), Brigadir Jenderal TNI Mahesa Fitriadi, S.A.P., M.M., bertindak sebagai Inspektur Upacara pada Penutupan Pendidikan Pertama Tamtama (Dikmata) Infanteri TNI Angkatan Darat Gelombang III Tahun Anggaran 2026 yang berlangsung di Rindam Iskandar Muda, Senin (23/11/2026).

Dalam upacara tersebut, sebanyak 626 siswa secara resmi dilantik menjadi prajurit Tamtama TNI AD dengan pangkat Prajurit Dua (Prada), setelah berhasil menyelesaikan seluruh rangkaian pendidikan pertama dengan aman dan lancar.

Dalam amanatnya, Pangdam IM menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi kepada seluruh prajurit yang telah menyelesaikan pendidikan. Ia menegaskan bahwa keberhasilan tersebut merupakan awal dari perjalanan pengabdian sebagai prajurit TNI AD yang harus senantiasa menjunjung tinggi disiplin, loyalitas, profesionalisme, serta memiliki jiwa patriotisme dan semangat pengabdian kepada bangsa dan negara.

Pangdam IM juga menekankan agar seluruh prajurit senantiasa berpedoman pada Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI, menjunjung tinggi hukum dan etika keprajuritan, serta menghindari segala bentuk pelanggaran yang dapat mencoreng nama baik institusi TNI AD.

Selain itu, para prajurit Tamtama remaja diingatkan untuk terus meningkatkan kemampuan dan keterampilan militer, menjaga kebugaran fisik dan mental, serta senantiasa mengutamakan kepentingan tugas di atas kepentingan pribadi dan manunggal bersama rakyat.

Pada kesempatan tersebut, Pangdam IM turut menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Danrindam Iskandar Muda beserta seluruh staf pengajar dan pelatih atas dedikasi serta kerja keras dalam menyelenggarakan pendidikan sehingga berjalan dengan baik dan lancar.

Upacara penutupan ini menjadi momentum penting bagi 626 prajurit Tamtama remaja untuk memulai babak baru pengabdian sebagai garda terdepan pertahanan negara, dengan tekad menjadi prajurit TNI AD yang tangguh, profesional, berkarakter, dan selalu dicintai rakyat.[]

ACEH

Mualem Terbitkan Seruan Sambut Milad GAM ke-50

Oleh Redaksi · 23 Nov, 10.58 WIB





GUBERNUR ACEH

SERUAN MENYAMBUT PERINGATAN MILAD GAM KE-50
UNTUK PERDAMAIAN, PEMULIHAN DAN PEMBANGUNAN ACEH

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Peringatan Milad GAM ke-50 pada 4 Desember 2026 hendaknya menjadi momentum mengenang sejarah, mendoakan para syuhada, mempererat persaudaraan serta meneguhkan komitmen membangun Aceh.

Saya mengajak seluruh jajaran KPA dan masyarakat Aceh untuk melaksanakan peringatan milad secara sederhana dan khidmat, terpusat di lokasi-lokasi yang telah ditentukan, tanpa pawai demi menjaga keamanan, ketertiban dan suasana kondusif.

Kegiatan peringatan milad agar mengutamakan doa bersama, santunan anak yatim, bantuan bagi keluarga terdampak bencana serta gotong royong dalam rangka merawat dan menjaga lingkungan.

Aspirasi Kekhususan Aceh termasuk perpanjangan Dana Otonomi Khusus, bendera dan Kekhususan Aceh tetap kita perjuangkan.

Mari sambut peringatan Milad GAM ke-50 dengan saling menghormati, menjaga persatuan dan perdamaian, bekerja nyata bagi pemulihan pascabencana serta mewujudkan masa depan Aceh ke arah yang lebih baik.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

GUBERNUR ACEH,

MUZAKIR MANAF

BANDA ACEH, BANDA ACEH – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), menerbitkan seruan agar menyambut peringatan Milad Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ke-50 untuk perdamaian dan pembangunan Aceh. Seruan tertulis di atas kop resmi Gubernur Aceh tersebut diterbitkan pada Senin (23/11/2026).

"Peringatan Milad GAM ke-50 pada 4 Desember 2026 hendaknya menjadi momentum mengenang sejarah, mendoakan para syuhada, mempererat persaudaraan, serta meneguhkan komitmen membangun Aceh," kata Mualem dalam seruan tertulis sebagaimana disampaikan Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi kepada media, Senin.

Mualem mengajak seluruh jajaran Komite Peralihan Aceh (KPA) dan masyarakat Aceh melaksanakan peringatan milad secara sederhana dan khidmat. Kegiatan diminta terpusat di lokasi-lokasi yang telah ditentukan tanpa pawai, demi menjaga keamanan, ketertiban, dan suasana kondusif.

Selain itu, Mualem mengimbau agar kegiatan peringatan milad mengutamakan doa bersama, santunan anak yatim, bantuan bagi keluarga terdampak bencana, serta gotong royong dalam rangka merawat dan menjaga lingkungan.

Mualem menambahkan, aspirasi kekhususan Aceh, termasuk perpanjangan Dana Otonomi Khusus (Otsus), bendera, dan kekhususan Aceh lainnya tetap akan diperjuangkan.

"Mari sambut peringatan Milad GAM ke-50 dengan saling menghormati, menjaga persatuan dan perdamaian, bekerja nyata bagi pemulihan pascabencana, serta mewujudkan masa depan Aceh ke arah yang lebih baik," kata Mualem.[]

KOMUNITAS

Teuku Kamaruzzaman Pimpin IKAKUM USK, Alumni Ditarget Berperan dalam Kebijakan Publik

Oleh Van · 22 Nov, 16.21 WIB

BANDA ACEH – Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (IKAKUM USK) memasuki babak baru kepengurusan periode 2026–2031. Namun, pelantikan yang berlangsung Sabtu, 21 November 2026, bukan sekadar pergantian pengurus, melainkan membawa tuntutan agar alumni mampu mengambil peran nyata dalam pembentukan kebijakan publik, penguatan penegakan hukum, dan pembangunan solidaritas lintas profesi.

Teuku Kamaruzzaman, S.H., yang dikenal dengan sapaan Ampon Man, resmi dilantik sebagai Ketua IKAKUM USK untuk lima tahun ke depan. Pelantikan berlangsung di Pascasarjana Fakultas Hukum USK, Darussalam, Banda Aceh, bersamaan dengan Kenduri Maulid Nabi Muhammad SAW.

Kegiatan tersebut dihadiri alumni Fakultas Hukum USK dari beragam bidang profesi. Mereka berasal dari lingkungan peradilan, kejaksaan, birokrasi, advokat, notaris, TNI, Polri, akademisi, politik, parlemen, dunia usaha, pendidikan, BUMN, perbankan, hingga kalangan tokoh masyarakat dan adat.

Dekan Fakultas Hukum USK, Prof. Dr. Zahratul Idami, S.H., M.Hum., memimpin pelantikan pengurus. Selain Teuku Kamaruzzaman sebagai ketua, kepengurusan inti diisi Khairani Arifin, S.H., M.H. sebagai Ketua Harian, Amrina Habibi, S.H., M.H. sebagai Sekretaris Umum, serta Alfaraby, S.H. sebagai Bendahara Umum.

Wakil Rektor III USK, Dr. Rina Suryani Oktari, S.Kep., M.Si., FRSPH, dalam sambutannya menyampaikan harapan agar kepengurusan IKAKUM USK periode 2026–2031 dapat memperkuat kontribusi terhadap visi universitas. Sinergi alumni dinilai penting untuk mendukung USK menjadi universitas sosio-teknopreneur yang inovatif, mandiri, serta memiliki reputasi di tingkat global.

Rina juga mengharapkan organisasi alumni dapat membuka hubungan yang lebih erat antara mahasiswa dengan dunia profesional dan kehidupan sosial, sehingga manfaatnya tidak berhenti di lingkungan kampus, tetapi menjangkau tingkat lokal, regional, nasional hingga internasional.

"Keberadaan IKAKUM USK diharapkan dapat menjadi penghubung mahasiswa USK dengan dunia kerja dan kehidupan bermasyarakat, serta memberi manfaat dalam lingkup lokal, regional, nasional hingga internasional," demikian pesan yang disampaikan dalam sambutannya pada 21 November 2026.

Dekan FH USK, Zahratul Idami, menegaskan bahwa keberadaan alumni merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan kemajuan perguruan tinggi. Hubungan antara almamater dan alumni, menurutnya, harus terus dipelihara melalui kontribusi, kolaborasi, serta penguatan silaturahmi lintas generasi.

Ia mengajak seluruh keluarga besar Fakultas Hukum USK untuk bersama-sama membangun fakultas yang unggul dengan dukungan alumni yang memiliki …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

EKONOMI

3 BERITA

EKONOMI

Affordable Digital PR and Media Placements: How Businesses Can Build Visibility Without Overspending

Oleh Redaksi · 23 Nov, 19.43 WIB



In today's competitive digital landscape, businesses need more than a well-designed website to establish their presence online. Building brand awareness, earning credibility, and reaching the right audience require a consistent marketing strategy. Digital PR and media placements have become valuable tools for companies looking to strengthen their online visibility and connect with potential customers. However, high-quality media placements can often come with expensive pricing, making them difficult to access for startups, small businesses, marketing agencies, and growing brands. This is where affordable digital PR solutions can make a meaningful difference.

NextFlow PR is a newly established digital PR agency focused on making media placements and promotional opportunities more accessible to businesses through competitive pricing, a broad publisher network, and customized promotional solutions

Why Digital PR Matters for Modern Businesses

Digital PR is an important part of a company's online marketing strategy. By securing placements on relevant publications and media platforms, businesses can introduce their products, services, and expertise to audiences who may not otherwise discover their brandMedia coverage can support several marketing objectives, including brand recognition, referral traffic, reputation building, and search engine visibility. Publishing content on established websites also gives businesses opportunities to communicate their expertise and create a stronger digital footprint.

For companies operating in competitive industries, strategic media placements can help differentiate their brand from competitors. Rather than relying exclusively on paid advertisements or social media campaigns, businesses can expand their reach through relevant editorial and sponsored content opportunities.

The Challenge of Expensive Media Placements

One of the biggest challenges businesses face when investing in digital PR is the cost of premium publications. Established media websites often charge substantial fees for sponsored articles, editorial collaborations, and promotional placements. For small businesses and startups, these expenses can quickly exceed their marketing budgets. Even marketing agencies managing multiple clients may struggle to maintain competitive pricing while purchasing placements from expensive publishers.

The challenge is not simply finding websites that accept promotional content. Businesses need access to publishers that match their industry, target audience, marketing objectives, and budget.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

Wagub Aceh Hadiri Pelantikan Pengurus FOSKADJA Periode 2026–2029

Oleh Redaksi · 22 Nov, 14.56 WIB

BANDA ACEH – Wakil Gubernur (Wagub) Aceh, Fadhlullah menghadiri pelantikan pengurus Forum Silaturrahmi dan Komunikasi Alumni Dayah Jeumala Amal (FOSKADJA) periode 2026–2029 yang dirangkai dengan Khanduri Maulid Nabi Muhammad SAW, di Anjong Mon Mata, Minggu (22/11/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Fadhlullah menyampaikan sambutan yang mengapresiasi terselenggaranya kegiatan sekaligus mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus FOSKADJA yang baru dilantik. Ia berharap kepengurusan periode 2026–2029 dapat menjalankan amanah dengan baik serta membawa organisasi menjadi lebih solid dan memberikan manfaat yang lebih luas.

"Atas nama Pemerintah Aceh, kami menyampaikan selamat dan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini. Kami juga mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus FOSKADJA yang baru dilantik," ujar Fadhlullah.

Menurutnya, FOSKADJA memiliki peran penting bukan hanya sebagai wadah mempererat hubungan ant alumni, tetapi juga sebagai ruang untuk menyatukan gagasan, pengalaman, dan potensi para alumni dalam memberikan kontribusi bagi masyarakat.

Ia juga berharap para alumni Dayah Jeumala Amal dapat terus membawa nilai-nilai keislaman, akhlak mulia, dan kemandirian yang diperoleh selama menempuh pendidikan untuk diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Fadhlullah turut mendorong kepengurusan baru agar memperkuat konsolidasi organisasi, membangun komunikasi yang erat antargenerasi alumni, serta menghadirkan berbagai kegiatan yang bermanfaat. Para alumni diharapkan dapat mengambil peran dalam mendukung pembangunan Aceh, khususnya di bidang pendidikan, sosial, ekonomi, dan keagamaan.

"Para alumni hendaknya dapat menjadi bagian dari solusi atas berbagai persoalan masyarakat, sekaligus turut mendukung pembangunan Aceh melalui bidang pendidikan, sosial, ekonomi, keagamaan, dan bidang lainnya," katanya.

Ia juga menyampaikan bahwa momentum Khanduri Maulid Nabi Muhammad SAW menjadi pengingat bagi seluruh hadirin untuk meneladani akhlak Rasulullah, terutama dalam hal kejujuran, amanah, persaudaraan, kepedulian, dan keteladanan.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir Tgk. H. M. Daud Hasbi, M.Ag (Abi Daud Hasbi), Direktur Dayah Jeumala Amal Drs. Tgk. Hamdani AR, Ketua Umum beserta jajaran pengurus FOSKADJA, para alumni Dayah Jeumala Amal, serta sejumlah tamu undangan dan masyarakat yang mengikuti rangkaian kegiatan.

Menutup sambutannya, Fadhlullah berharap FOSKADJA terus berkembang menjadi organisasi yang solid dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Dayah Jeumala Amal, masyarakat, serta Aceh secara keseluruhan.[]

EKONOMI

Pendaftaran CPNS 2026 Direncanakan Mulai 27 November, Kebutuhan ASN Capai 167.113

Oleh Van · 23 Nov, 18.01 WIB



Para peserta tampak fokus mengikuti sesi pelatihan dengan saksama di ruang kelas.

JAKARTA — Pendaftaran CPNS 2026 direncanakan mulai 27 November 2026. Pemerintah menetapkan kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) tahun ini sebanyak 167.113 orang.

Rencana tersebut disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 23 November 2026.

Rini menjelaskan, proses pengadaan ASN telah memasuki tahap koordinasi melalui Panitia Seleksi Nasional (Panselnas). Penetapan formasi CPNS akan dilakukan setelah pembahasan pleno.

"Untuk tahun 2026, kebutuhan ASN ditetapkan sejumlah 167.113. Kebutuhan ini juga mempertimbangkan pendapat dari Menteri Keuangan berdasarkan surat tanggal 21 April tahun 2026," ungkap Rini.

Jadwal Seleksi CPNS 2026

Pemerintah merencanakan pengumuman seleksi pada pekan keempat November 2026. Pendaftaran kemudian dijadwalkan mulai akhir November.

"Untuk pengadaan CPNS prioritas nasional tahun 2026, pendaftaran direncanakan mulai akhir November, seleksi administrasi pada bulan Desember dan seleksi kompetensi pada awal 2027," kata Rini.

Seleksi administrasi direncanakan berlangsung pada Desember 2026. Sementara itu, tahapan seleksi kompetensi dasar (SKD) dan seleksi kompetensi bidang (SKB) dijadwalkan pada Januari hingga Maret 2027.

Formasi Prioritas Nasional

Rini menyebut pemenuhan kebutuhan ASN 2026 dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama diarahkan untuk mendukung Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dan sektor prioritas nasional sesuai RPJMN 2025–2029.

Bidang yang menjadi prioritas antara lain guru Sekolah Nasional Terintegrasi, Sekolah Unggul Garuda, dosen, tenaga kesehatan, kehutanan, audit internal, serta pengawasan koperasi.

Sementara itu, kelompok kedua mencakup pemenuhan kebutuhan ASN pada bidang lainnya dengan menerapkan prinsip zero growth atau menjaga jumlah pegawai agar tetap stabil.

"Dengan demikian, pengadaan untuk 2026 diarahkan untuk mendukung kebutuhan strategis dan pembangunan nasional dengan tetap memperhatikan kebutuhan dan komposisi aparatur secara proporsional," jelas Rini.

Pemerintah masih mematangkan tahapan pengadaan melalui koordinasi kementerian dan lembaga terkait. Badan Kepegawaian Negara (BKN) bertugas mengoordinasikan teknis seleksi ASN secara nasional.

Selain pengadaan tahun 2026, pemerintah juga menyiapkan pemenuhan kebutuhan ASN pada 2027. Fokusnya diarahkan pada sektor pelayanan dasar, khususnya tenaga guru, dengan pengumuman tahap pertama direncanakan pada Maret 2027.(*)

INTERNASIONAL

Niatnya jadi Supir Taksi di Arab, Pemuda Cimahi Malah Berakhir di Medan Perang Ukraina

Oleh Redaksi · 22 Nov, 12.26 WIB

BANDA ACEH - Niat mencari penghasilan di luar negeri justru membawa seorang pemuda asal Cimahi, Jawa Barat, ke situasi yang jauh dari rencana awal. FS (29) yang semula ingin bekerja sebagai sopir taksi di Arab Saudi kini dikabarkan berada di Rusia dan diduga menjadi tentara yang terlibat dalam perang melawan Ukraina.Kisah ini mencuat setelah keluarga FS meminta bantuan pemerintah untuk memulangkannya ke Indonesia. Mereka mengaku kehilangan kontak dengan pria tersebut sejak 29 Oktober 2026.

Berdasarkan penuturan kakak kandung FS, Agris Yuni, adiknya awalnya memang berniat mengadu nasib ke Arab Saudi. Ia bahkan sudah mengikuti serangkaian tes untuk menjadi pengemudi taksi dan dinyatakan lolos.

Namun, rencana tersebut sempat batal karena FS merasa tidak sanggup membayar biaya administrasi yang harus dilunasi calon pekerja.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

EKONOMI

Bank Aceh Siapkan Pembiayaan Resi Gudang Nilam, Meluncur Kuartal I 2027

Oleh Redaksi · 23 Nov, 08.50 WIB



Momen penyerahan plakat dalam pertemuan resmi di Bank Aceh sebagai simbol kerja sama.

Perluas Akses Permodalan Petani dan UMKM, Perkuat Rantai Nilai Komoditas Unggulan Aceh

BANDA ACEH – Petani dan pelaku usaha komoditas nilam di Aceh berpeluang memperoleh alternatif akses pembiayaan melalui pengembangan skema Pembiayaan Sistem Resi Gudang (SRG) yang tengah dipersiapkan oleh PT Bank Aceh Syariah.

Inisiatif ini ditargetkan dapat diluncurkan pada kuartal I tahun 2027 sebagai bagian dari upaya memperluas pembiayaan sektor produktif dan mengoptimalkan potensi komoditas unggulan daerah.

Rencana pengembangan tersebut menjadi salah satu agenda pembahasan dalam pertemuan bilateral antara Bank Aceh, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan International Labour Organization (ILO) yang berlangsung di Kantor Pusat Bank Aceh, Banda Aceh, Jumat (20/11/2026).

Pertemuan tersebut dihadiri Direktur Utama Bank Aceh Fadhil Ilyas; Asisten Deputi Pengembangan Inklusi Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Erdiriyo; Project Manager Promise III Impact ILO Jakarta Djauhari Sitorus; Direktur Bisnis Bank Aceh Erwin Konadi; Direktur Dana dan Jasa M. Hendra Supardi; Pemimpin Divisi UMKM Ziaur Rahman; Pemimpin Divisi Digitalisasi dan Layanan (DIG) Syahrul Ramadhan; serta Pemimpin Divisi Sekretariat Perusahaan Ilham Novrizal.

Pembiayaan Srg Nilam, membuka alternatif Akses Permodalan Bagi Pelaku Usaha

Sistem Resi Gudang merupakan salah satu instrumen yang dapat mendukung akses pembiayaan bagi pelaku usaha berbasis komoditas. Melalui sistem ini, komoditas yang disimpan di gudang dan telah diterbitkan resi gudangnya sesuai ketentuan dapat dimanfaatkan sebagai dasar untuk memperoleh pembiayaan.

Bagi petani dan pelaku usaha nilam, pengembangan skema pembiayaan ini diharapkan dapat menghadirkan alternatif sumber permodalan dengan memanfaatkan hasil produksi yang tersimpan di gudang. Dengan demikian, pelaku usaha memiliki peluang untuk mengelola kebutuhan modal secara lebih fleksibel tanpa harus selalu bergantung pada penjualan komoditas secara langsung setelah panen.

Lebih dari sekadar akses pembiayaan, pengembangan SRG juga diharapkan dapat mendorong pengelolaan komoditas yang lebih terstruktur, meningkatkan posisi tawar produsen, serta memperkuat rantai nilai usaha nilam dari tingkat petani hingga pelaku industri.

Inisiatif ini menjadi bagian dari arah pengembangan bisnis Bank Aceh dalam memperluas pembiayaan sektor riil, khususnya pada sektor-sektor produktif yang memiliki potensi ekonomi dan keunggulan daerah.

Kolaborasi Dengan ILO Untuk Penguatan Kapasitas UMKM

Selain membahas rencana pengembangan pembiayaan SRG nilam, pertemuan bilateral tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi Bank Aceh dengan International Labour Organization (ILO), khususnya dalam …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

HIBURAN

3 BERITA

HIBURAN

Link Video Budhe Brondong Viral, Ternyata Ada ‘Saudara Nginep 2’ di YouTube

Oleh Redaksi · 23 Nov, 21.33 WIB



BANDA ACEH - Nama “Budhe Brondong” mendadak memiliki dua makna berbeda di jagat digital. Di satu sisi, julukan itu ramai dikaitkan dengan kasus dugaan produksi konten pornografi yang menyeret Ce Crystine, perempuan asal Blitar, Jawa Timur. Di sisi lain, istilah serupa muncul dalam serial animasi komedi Saudara Nginep 2 di kanal YouTube Rizky Riplay. Di tengah perburuan tautan video oleh warganet, masyarakat perlu membedakan kedua konten tersebut sekaligus mewaspadai ancaman penipuan digital atau phishing.Fenomena ini memperlihatkan bagaimana satu istilah dapat berkembang menjadi kata kunci populer dengan konteks yang sangat berbeda. Pencarian “Budhe Brondong”, “Ce Crystine”, hingga “link video full” ramai diperbincangkan di media sosial, terutama X, TikTok, dan Instagram.

Padahal, tidak semua hasil pencarian yang menggunakan istilah tersebut mengarah pada konten yang sama.

Budhe Brondong Ce Crystine dan Kasus yang Menghebohkan Blitar

Nama Ce Crystine merujuk pada perempuan berinisial K, 38, asal Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar. Sosok tersebut menjadi sorotan setelah dikaitkan dengan dugaan produksi dan pemasaran konten bermuatan pornografi melalui layanan berlangganan berbayar.

Dalam perkara tersebut, K bersama suaminya berinisial PEK, 40, diamankan Satreskrim Polres Blitar Kota di sebuah rumah kos di Denpasar, Bali.

Pengungkapan kasus bermula dari patroli siber kepolisian yang menemukan materi bermuatan asusila di internet. Hasil penelusuran kemudian mengarah pada dugaan aktivitas produksi konten di sebuah penginapan di Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar.

Pasangan tersebut diduga menjalankan bisnis konten eksklusif sejak Maret 2025 hingga November 2026.

Dari aktivitas itu, keduanya diperkirakan memperoleh pendapatan Rp 20 juta hingga Rp 30 juta per bulan. Akumulasi keuntungan yang dilaporkan mencapai sekitar Rp 400 juta.

Informasi inilah yang kemudian membuat nama Ce Crystine semakin ramai dicari warganet.

Benarkah Ada Tiga Part Video Budhe Brondong?

Selain mencari identitas Ce Crystine, sebagian pengguna media sosial juga memburu informasi mengenai klaim video yang disebut memiliki tiga bagian atau three parts.

Isu tersebut berkembang melalui berbagai unggahan di X dan platform lainnya.

Namun, hingga informasi yang tersedia, belum ada konfirmasi resmi yang memastikan bahwa video yang ramai dibicarakan benar-benar terdiri atas tiga bagian seperti klaim sejumlah akun.

Warganet perlu membedakan informasi yang berasal dari pengungkapan kepolisian dengan rumor yang berkembang di media sosial.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

HIBURAN

Bagaimana Animasi Digital Mengubah Cara Orang Menikmati Hiburan Online

Oleh Redaksi · 23 Nov, 18.30 WIB



Hiburan online saat ini terlihat sangat berbeda dibandingkan dengan beberapa tahun lalu. Dahulu, situs web lebih banyak mengandalkan gambar statis, video sederhana, dan grafis dasar. Kini, animasi digital menghadirkan gerakan, karakter interaktif, serta efek visual kreatif di berbagai platform hiburan.

Perubahan ini bukan hanya tentang membuat tampilan layar menjadi lebih menarik. Animasi digital juga memengaruhi cara orang berinteraksi dengan konten, memahami informasi, dan menikmati aktivitas online. Mulai dari layanan streaming hingga game seluler, fitur animasi semakin menjadi bagian penting dari pengalaman digital sehari-hari.

Bagaimana Animasi Digital Membuat Hiburan Online Lebih Interaktif

Animasi digital memungkinkan situs web dan aplikasi memberikan respons visual terhadap tindakan pengguna. Alih-alih hanya menampilkan gambar diam, platform dapat menghadirkan elemen bergerak, latar belakang yang berubah, serta respons animasi yang interaktif.Detail kecil tersebut membantu pengguna memahami apa yang sedang terjadi di layar mereka. Selain itu, animasi dapat membuat aktivitas digital terasa lebih alami dan menyenangkan.

Mengubah Tindakan Sederhana Menjadi Pengalaman Visual

Bayangkan ketika seseorang membuka game di ponsel. Karakter mungkin melambaikan tangan, tombol berubah bentuk, atau rangkaian animasi memperkenalkan level berikutnya.Efek serupa juga dapat ditemukan dalam berbagai bentuk hiburan digital, seperti:

• Platform streaming dengan menu dan pratinjau animasi.

• Game seluler yang menampilkan karakter bergerak dan lingkungan interaktif.

• Aplikasi pendidikan yang menjelaskan konsep melalui contoh animasi.

• Situs hiburan online yang menggunakan efek visual untuk menggambarkan berbagai aktivitas.

Perbedaan utamanya adalah animasi memberikan umpan balik visual secara langsung sehingga pengguna tidak perlu menebak apakah tindakan mereka berhasil dilakukan.

Mengapa Animasi Penting dalam Game Online

Game online merupakan salah satu bidang yang sangat bergantung pada animasi digital. Pengembang menggabungkan grafis bergerak, efek suara, dan elemen interaktif untuk menciptakan pengalaman bermain yang lebih responsif.Animasi juga membantu menyampaikan petunjuk permainan, menunjukkan tindakan yang telah selesai, serta membedakan berbagai tahapan permainan.

Membuat Fitur Permainan Lebih Mudah Dipahami

Dalam banyak game online, animasi memiliki fungsi praktis yang lebih luas daripada sekadar mempercantik tampilan.Sebagai contoh, gerakan karakter dapat menunjukkan arah yang perlu diikuti pemain. Simbol yang berubah mungkin menandakan bahwa suatu tindakan telah selesai, sementara tutorial animasi membantu menjelaskan kontrol permainan yang belum dikenal.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

HIBURAN

Crazy Rich Muhammad Fitno Ternyata Mangkir dari Panggilan KPK

Oleh Redaksi · 23 Nov, 10.05 WIB



BANDA ACEH -Pengusaha asal Kepulauan Bangka, Muhammad Fitno, ternyata mangkir dari panggilan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas pembiayaan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, sedianya Muhammad Fitno bersama seorang saksi lainnya, yakni Adhary Mahaputra selaku pihak swasta, dipanggil tim penyidik pada Kamis, 19 November 2026.

"Dalam penjadwalan tersebut, saksi tidak hadir," kata Budi kepada RMOL, Senin, 23 November 2026.

Untuk itu, kata Budi, tim penyidik memastikan akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap kedua saksi dimaksud.

"Penyidik akan jadwalkan ulang pemeriksaannya, karena keterangan saksi untuk membantu dalam pengungkapan perkara," pungkas Budi.

Sejak Maret 2024, KPK telah melakukan penyelidikan terkait dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit oleh LPEI kepada 11 debitur, dan beberapa perusahaan di antaranya sudah naik ke tahap penyidikan. Adapun total kredit yang diberikan, yang juga menjadi potensi kerugian keuangan negara, mencapai kurang lebih Rp11,7 triliun.

Dalam perkara dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit dari LPEI ke Bara Jaya Utama (BJU) Grup, KPK telah menahan satu tersangka selaku pemilik PT Sakti Mait Jaya Langit (SMJL) dan PT Mega Alam Sejahtera (MAS), Hendarto (HD), pada Kamis, 28 Agustus 2025.

Dalam perkaranya, kedua perusahaan tersebut mendapatkan pembiayaan atau fasilitas kredit dari LPEI berupa Kredit Investasi Ekspor (KIE) dan Kredit Modal Kerja Ekspor (KMKE).

Pada periode Oktober 2014 hingga Oktober 2015, PT SMJL mendapatkan fasilitas KIE sebanyak dua kali dengan total mencapai Rp950 miliar. Dana itu digunakan untuk refinancing kebun kelapa sawit dengan luas lahan inti sekitar 13.075 hektare di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, dengan jangka waktu 9 tahun sejak 25 November 2014 sampai 25 Oktober 2023.

Sementara itu, PT SMJL juga mendapat KMKE senilai Rp115 miliar yang diperuntukkan bagi refinancing kebun kelapa sawit milik perusahaan. Kemudian, pada April 2015, PT MAS mendapat fasilitas dari LPEI sebesar 50 juta Dolar AS atau sekitar Rp670 miliar berdasarkan kurs saat itu.

Namun, peruntukan kebutuhan operasional PT SMJL tercatat hanya sebesar Rp17 miliar atau sekitar 3,01 persen dari total pinjaman. Sedangkan kebutuhan operasional PT MAS hanya senilai 8,2 juta Dolar AS atau sekitar Rp110 miliar berdasarkan kurs 2015 (sekitar 16,4 persen dari total pinjaman).

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

LINGKUNGAN

4 BERITA

LINGKUNGAN

Pidie Jaya Kembali Diterjang Banjir

Oleh Van · 23 Nov, 16.56 WIB

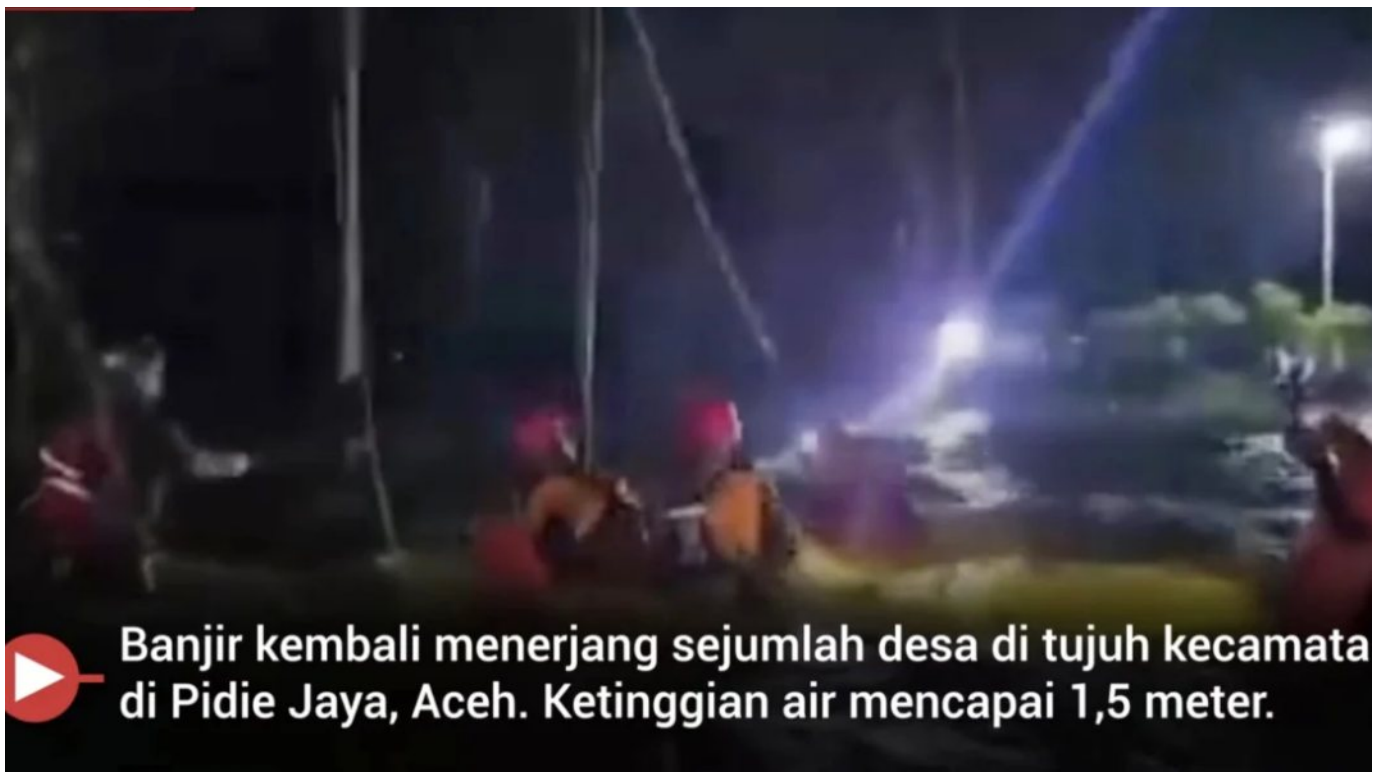

Banjir setinggi 1,5 meter merendam pemukiman warga di Pidie Jaya, Aceh. Tim SAR berupaya melakukan evakuasi di tengah kegelapan.

PIDIE JAYA — Bencana banjir kembali melanda Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, setelah hujan berintensitas tinggi mengguyur wilayah tersebut pada Minggu malam, 22 November 2026. Luapan sejumlah sungai menggenangi permukiman di tujuh kecamatan, dengan ketinggian air di beberapa titik mencapai 150 sentimeter.

Gampong Dayah Usen, Kecamatan Meurah Dua, menjadi salah satu kawasan yang mengalami dampak paling parah. Jebolnya tanggul sungai menyebabkan air mengalir deras ke perkampungan, mengancam keselamatan warga dan memaksa tim SAR gabungan bergerak melakukan evakuasi ke lokasi yang lebih aman.

Banjir dilaporkan melanda Kecamatan Bandar Baru, Panteraja, Trienggadeng, Meureudu, Meurah Dua, Ulim, dan Bandar Dua. Sedikitnya 16 gampong terdampak luapan air, sementara kondisi di sejumlah titik masih membutuhkan pemantauan intensif petugas.

Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) menyebut hujan deras yang berlangsung pada Minggu malam menyebabkan debit sejumlah sungai meningkat dan meluap ke kawasan permukiman. Sungai yang terdampak antara lain Krueng Jeulanga-Ulim, Krueng Meureudu, Krueng Beuracan, dan Krueng Putu.

Ketinggian genangan bervariasi, mulai sekitar 20 sentimeter hingga 1,5 meter. Situasi semakin berbahaya di kawasan Dayah Usen karena air yang menerobos akibat tanggul jebol mengalir cukup deras, sehingga proses penyelamatan warga menjadi prioritas tim gabungan.

Dalam penanganan bencana tersebut, petugas SAR, BPBD, TNI-Polri, relawan, serta unsur masyarakat turut dikerahkan. Tim melakukan evakuasi dan membantu warga yang berada di kawasan terdampak, terutama lokasi yang terendam cukup dalam dan berisiko dilalui.

Selain kerusakan dan genangan, banjir juga dilaporkan menyebabkan dua warga terdampak. Seorang warga berusia 41 tahun mengalami luka lecet pada bagian dada kiri setelah terbentur balok ketika berupaya menolong korban yang hanyut. Sementara seorang remaja berusia 17 tahun yang sempat terbawa arus dilaporkan dalam keadaan sadar dan stabil.

Laporan terbaru menyebutkan debit air di sejumlah lokasi mulai berangsur turun. Meski demikian, masyarakat tetap diminta waspada terhadap potensi banjir susulan, mengingat hujan di wilayah hulu dapat kembali meningkatkan volume aliran sungai dan memperburuk kondisi tanggul yang rusak.

Banjir yang kembali terjadi di Pidie Jaya juga menjadi peringatan serius bagi penanganan infrastruktur pengendali air di kawasan rawan bencana. Kerusakan tanggul yang berulang, khususnya di Dayah Usen, memperlihatkan bahwa perlindungan permukiman belum sepenuhnya mampu menghadapi derasnya aliran sungai ketika hujan ekstrem melanda.(*)

LINGKUNGAN

Bahlil Lahadalia: Hanya Orang Tidak Waras yang Keluarkan Izin Tambang di Taman Nasional

Oleh Redaksi · 23 Nov, 17.43 WIB



BANDA ACEH -Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan tidak akan menerbitkan izin pertambangan di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon, Banten.

"Saya juga kaget. Mana? Dan tidak ada satu pun, jangankan IUP (Izin Usaha Pertambangan), WIUPK (WIUPK)-nya saja belum ada yang dikeluarkan," kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Senin, 23 November 2026.

Ia menjelaskan, penetapan wilayah pertambangan dilakukan untuk mengidentifikasi potensi cadangan mineral di suatu daerah. Namun, keberadaan cadangan tidak otomatis menjadi dasar penerbitan izin usaha pertambangan.

Bahlil menegaskan, penerbitan izin harus melalui tahapan yang berlaku, mulai dari penetapan wilayah pertambangan hingga penerbitan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) dan Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Ia bahkan menyebut hanya orang tidak waras yang berani mengeluarkan izin tambang di kawasan konservasi tersebut.

"Hanya orang tidak waras yang mengeluarkan izin di taman nasional itu," cetusnya.

Bahlil juga menepis anggapan bahwa dirinya akan membiarkan kawasan konservasi tersebut menjadi lokasi pertambangan. Ia mengaku memahami pentingnya menjaga alam karena tumbuh dan besar di kampung.

"Saya begini-begini orang kampung yang tahu menjaga alam, loh. Cinta alam," ujar Bahlil.

Ia bahkan menceritakan kegemarannya memancing, berkebun, dan memelihara burung untuk menegaskan kedekatannya dengan alam.

"Jadi, tolong jangan ajari saya tentang bagaimana cara menjaga hewan-hewan. Rumah saya di kampung sana masih ada burung-burung semua," kata Bahlil.

Bahlil memastikan tidak akan memberikan izin jika ada pihak yang mengusulkan kegiatan pertambangan di kawasan tersebut.

"Kalau ada yang mau mengeluarkan izin, saya pastikan saya tidak kasih," tandas Bahlil.

Sebelumnya, penetapan sebagian wilayah perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) menjadi sorotan setelah tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten. Penetapan WUP tersebut berbeda dengan penerbitan izin untuk melakukan kegiatan pertambangan.

LINGKUNGAN

Puskesmas Lamno Nilai Bantuan Ikan DKP Aceh Bermanfaat bagi Ibu Hamil dan Balita

Oleh Hamdani · 23 Nov, 15.58 WIB



Penyaluran bantuan ikan DKP Aceh untuk ibu hamil dan balita di UPTD Puskesmas Lamno, Kecamatan Jaya, Aceh Jaya.

ACEH JAYA – Program bantuan ikan yang disalurkan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh dinilai memberikan manfaat bagi upaya pemenuhan gizi masyarakat, khususnya ibu hamil serta bayi dan balita yang membutuhkan perhatian khusus.

Hal tersebut disampaikan Kepala UPTD Puskesmas Lamno, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya, dr. Rina Afriani, M.K.M., Senin (23/11/2026). Ia mengatakan, bantuan ikan merupakan program yang sangat baik dan bermanfaat karena ikan merupakan sumber protein hewani yang berperan penting dalam menjaga kesehatan ibu hamil serta mendukung pertumbuhan dan perkembangan bayi dan balita.

"Program ini juga menjadi wujud perhatian pemerintah terhadap upaya perbaikan gizi masyarakat, sekaligus mendukung pencegahan stunting sejak dini," ujar dr. Rina.

Ia menjelaskan, dukungan Puskesmas Lamno terhadap program tersebut dilatarbelakangi masih adanya ibu hamil serta bayi dan balita yang membutuhkan perhatian dalam pemenuhan kebutuhan gizi. Ikan dinilai menjadi pilihan pangan bergizi karena mengandung protein hewani yang dibutuhkan tubuh dan relatif mudah diolah menjadi beragam menu makanan keluarga.

Dalam proses penetapan penerima manfaat, katanya lagi, Puskesmas Lamno melakukan pendataan dengan melibatkan petugas kesehatan, kader posyandu, serta berkoordinasi dengan aparatur gampong. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bantuan menjangkau kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Menurut dr. Rina, penerima bantuan diprioritaskan kepada ibu hamil yang berisiko mengalami masalah gizi serta bayi dan balita dengan permasalahan pertumbuhan, seperti berat badan kurang, berat badan tidak mengalami kenaikan, maupun kondisi gizi kurang. Penentuan sasaran tersebut mengacu pada data dan kondisi faktual di lapangan.

Ia menilai, manfaat program tidak hanya terletak pada bantuan pangan yang diterima masyarakat, tetapi juga pada meningkatnya kesadaran keluarga mengenai pentingnya mengonsumsi ikan sebagai bagian dari pemenuhan gizi seimbang.

Karena itu, dr. Rina berharap program bantuan ikan DKP Aceh dapat terus berlanjut dengan cakupan penerima yang semakin luas. Menurutnya, penguatan koordinasi lintas sektor, mulai dari DKP, Dinas Kesehatan, puskesmas, posyandu hingga pemerintah gampong, menjadi penting agar pelaksanaannya semakin efektif dan tepat sasaran.

"Harapan kami, program ini dapat terus berlanjut dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan status gizi masyarakat, mendukung upaya penurunan angka stunting, serta mewujudkan generasi Aceh yang sehat dan berkualitas," tutupnya.[]

LINGKUNGAN

Banjir Kembali Rendam Tiga Desa di Trumon Raya, Puluhan Warga Mengungsi

Oleh Redaksi · 23 Nov, 09.13 WIB



BANDA ACEH, ACEH SELATAN – Hujan deras yang mengguyur wilayah Trumon Raya, Kabupaten Aceh Selatan, kembali memicu banjir di tiga desa, Minggu (22/11/2026). Personel gabungan TNI dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) disiagakan untuk memantau perkembangan debit air serta membantu warga terdampak.

Tiga desa yang terdampak banjir yakni Desa Lhok Raya dan Cot Bayu di Kecamatan Trumon Tengah, serta Desa Padang Harapan di Kecamatan Trumon.

Berdasarkan pemantauan personel di lapangan hingga Minggu pagi, kondisi banjir di ketiga desa menunjukkan perkembangan berbeda. Di Desa Lhok Raya, genangan air yang sebelumnya merendam rumah warga dan badan jalan mulai berangsur surut. Sementara itu, debit air di Desa Cot Bayu dan Padang Harapan masih meningkat akibat tingginya intensitas hujan.

Di Desa Lhok Raya, banjir berdampak pada 11 rumah yang dihuni 11 kepala keluarga (KK) atau 35 jiwa. Ketinggian air yang menggenangi rumah warga berkisar 5 hingga 25 sentimeter, sedangkan badan jalan desa tergenang sekitar 5 hingga 10 sentimeter. Sebanyak 11 KK atau 35 jiwa telah mengungsi sementara ke Kompi Brimob untuk menghindari risiko banjir.

Sementara itu, di Desa Cot Bayu, genangan air menutupi akses jalan menuju desa sepanjang kurang lebih 800 meter dengan ketinggian 30 hingga 80 sentimeter. Debit air dilaporkan masih berangsur naik. Banjir juga menggenangi bagian depan 34 rumah warga yang dihuni 34 KK atau 136 jiwa.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 21 KK atau 69 jiwa telah mengungsi sementara. Sebagian warga menempati KDKMP Desa Cot Bayu, sedangkan lainnya mengungsi ke rumah keluarga maupun kerabat.

Banjir juga melanda Desa Padang Harapan, Kecamatan Trumon. Genangan air menutupi akses jalan menuju desa sepanjang kurang lebih satu kilometer dengan ketinggian berkisar 30 hingga 65 sentimeter.

Selain menggenangi akses jalan, banjir berdampak pada 23 rumah yang dihuni 23 KK atau 83 jiwa. Sebanyak 15 KK atau 75 jiwa telah mengungsi sementara di Puskesmas Pembantu (Pustu) Desa Padang Harapan.

Koordinator Lapangan Posko Lapangan Penanggulangan Darurat Bencana (PDB) Aceh Selatan, Kapten Inf Ali Sadikin, menjelaskan banjir yang kembali melanda ketiga desa tersebut dipicu tingginya curah hujan di kawasan Trumon Raya.

Menurut dia, personel gabungan TNI dan BPBD terus berada di lapangan untuk memantau situasi, membantu masyarakat terdampak, serta melakukan …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ANEKA BERITA

7 BERITA

ISLAM

Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Jadi Ajang Kompetisi

Oleh rutyuyun · 23 Nov, 20.36 WIB



Kontras tajam antara seremoni penghargaan pemerintah dan aspirasi rakyat yang menyuarakan ketidakadilan. Gambar ini menyoroti kesenjangan antara prestasi birokrasi dengan realitas sosial masyarakat.

EMENDAGRI berpendapat, bahwa pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan daerah.

Untuk mendorong peningkatannya, pemerintah daerah (pemda) perlu terus berinovasi, mengoptimalkan potensi wilayah, serta menciptakan iklim usaha yang mampu menarik investasi dan membuka lapangan kerja.

Untuk itu, Kemendagri mendorong terciptanya iklim kompetitif antarpemda melalui pemberian penghargaan dan insentif bagi daerah berprestasi.

Upaya ini diharapkan dapat memacu daerah untuk meningkatkan kinerja, termasuk dalam mengembangkan potensi ekonomi masing-masing.

Tujuan pemberian insentif menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian adalah menciptakan persaingan positif antardaerah, sekaligus mendorong daerah lain agar bekerja lebih keras meningkatkan capaian pembangunan.

Intinya, daerah yang belum beruntung karena belum berprestasi harus bekerja lebih keras lagi.

Pelaksana Tugas Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri, Raden Gani Muhamad menyebut inovasi harus menjadi bagian dari cara pemerintah bekerja.

Inovasi yang didukung ekosistem adaptif, inklusif, dan berkelanjutan dapat membantu daerah merespons perubahan serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

Di antaranya, pengembangan inovasi sektor pertanian, pengolahan hasil pertanian, UMKM, dan pariwisata.

Pada Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch III Regional Sumatera, Pemkot Pekanbaru Riau, yang berhasil meraih Juara I kategori Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dalam dan berhak memperoleh bantuan pemerintah sebesar Rp 2 miliar.

Hal itu karena pertumbuhan ekonomi kota Pekan Baru mencapai 7,3 persen. Realisasi investasi sepanjang Januari-September 2026 tercatat sebesar Rp 9,28 triliun, dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 8.534 orang.

Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho menyebut penghargaan tersebut menjadi tambahan dukungan bagi pembangunan kota sekaligus penyemangat untuk memperkuat kerja sama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Paradoks Kapitalisme Dalam Menyejahterakan Rakyat

Mengapa Pemkot Bali tidak mendapatkan juara?

Padahal dari sisi pariwisata sangatlah maju.

Dunia lebih mengenal Bali dibandingkan Ibukota jakarta atau kota-kota wisata lainnya di Indonesia.

Dengan potensinya yang demikian besar, nyatanya belum mengantar Bali menuju daerah yang berhak memboyong dana apresiasi pemerintah pusat.

Bagaimana dengan kota dan wilayah lainnya yang dari sisi kualitas SDA rendah karena pendidikan tidak terakses sempurna, bukan wilayah industri, bukan wilayah pariwisata unggulan, tak punya potensi tambang hingga memiliki daerah 3 T (Tertinggal,Terdepan dan Terluar) yang belum tersentuh teknologi samasekali, tentulah berat bebannya.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

LIFESTYLE

Alasan Memilih Atap UPVC di Jakarta untuk Berbagai Kebutuhan

Oleh Redaksi · 23 Nov, 19.34 WIB



Cuaca Jakarta sepanjang 2026 mengalami perubahan ekstrem. Pada akhir April, BMKG mencatat suhu mencapai 35–36 °C di Jakarta Utara dan sekitarnya. Memasuki penghujung tahun, BMKG justru memperingatkan potensi hujan ekstrem hingga awal 2027. Dan kondisi cuaca seperti ini diprediksi terus berlanjut dalam beberapa tahun ke depan. Kondisi ini membuat pemilik bangunan perlu mempertimbangkan material atap yang mampu menghadapi paparan panas dan hujan. Bagi Anda yang sedang mencari atap upvc Jakarta, penting untuk memahami karakteristik material sebelum membeli. Ecoroof menawarkan dua tipe atap UPVC, yaitu single layer dan double layer, yang dapat dipertimbangkan untuk berbagai kebutuhan bangunan.

Panas Terik Disusul Potensi Hujan Ekstrem

BMKG memprediksi awal musim hujan 2026/2027 mundur di 529 zona musim atau 61,08 persen wilayah Indonesia. Puncak musim hujan diperkirakan berlangsung pada Desember hingga Februari. Sebelumnya, 25 provinsi juga mengalami hari tanpa hujan ekstrem akibat pengaruh El Niño kategori sangat kuat dan Indian Ocean Dipole (IOD). Perubahan cuaca tersebut membuat pemilik bangunan perlu memperhatikan ketahanan material atap. Paparan panas berkepanjangan dan hujan deras menjadi dua faktor yang perlu dipertimbangkan, selain ketahanan terhadap korosi dan kenyamanan pengguna bangunan.

Mengenal Atap UPVC Single Layer dan Double Layer

Ecoroof menyediakan dua tipe atap UPVC (unplasticized polyvinyl chloride), yaitu single layer dan double layer. Keduanya memiliki konstruksi dan spesifikasi berbeda yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan bangunan. Single layer merupakan lembaran atap bergelombang tunggal dengan pilihan ketebalan 1,2 mm dan 1,5 mm. Produk ini tersedia dalam profil ECO TR 765 dan ECO TR 1000, dengan panjang maksimum 6 meter dan tinggi gelombang 28 mm.

Sementara itu, double layer memiliki konstruksi dinding ganda dengan rongga di bagian dalam. Tipe ini tersedia dalam profil gelombang 770, 860, dan 1075 serta dilengkapi sistem interlock. Struktur berongganya dirancang untuk membantu meredam suara hujan, sehingga dapat menjadi pertimbangan bagi bangunan yang membutuhkan kenyamanan akustik.

Kedua produk tersebut diproduksi oleh PT Intec Persada, perusahaan yang telah memproduksi material UPVC sejak 2016 dengan fasilitas pabrik di Tangerang dan Jawa Timur. Ecoroof memasarkan produknya sebagai solusi atap yang tahan karat dan dirancang untuk menghadapi berbagai kondisi cuaca.

6 Contoh Kebutuhan Atap UPVC di Jakarta

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

EDUKASI

Patroli Skala Besar di Jaktim Amankan 10 Pelajar, Polisi Sita 5 Celurit

Oleh Van · 23 Nov, 17.51 WIB



Simbol hilangnya kebebasan, borgol ini menggambarkan konsekuensi dari sebuah tindakan hukum.

JAKARTA — Polres Metro Jakarta Timur mengamankan 10 pelajar SMK dalam patroli skala besar pada Sabtu malam, 21 November 2026, hingga Minggu dini hari, 22 November 2026. Polisi turut menyita lima bilah celurit dan empat sepeda motor.

Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Hendri Umar mengatakan seluruh pelajar beserta barang bukti dibawa ke Polres untuk pemeriksaan lebih lanjut.

"Untuk yang diamankan ada 10 orang pelajar SMK, berikut barang buktinya seperti 5 bilah senjata tajam jenis celurit, 4 motor. Semuanya kami amankan ke Polres untuk pemeriksaan lebih lanjut," kata Hendri, Senin, 23 November 2026.

Sebanyak tujuh pelajar diamankan di kawasan Pasar Deprok karena diduga hendak melakukan tawuran. Sementara tiga pelajar lainnya diamankan di lokasi berbeda.

Patroli Libatkan 214 Personel Gabungan

Hendri menjelaskan kelompok pelajar tersebut awalnya berkonvoi menggunakan tujuh sepeda motor dengan berboncengan. Mereka kemudian berusaha melarikan diri saat petugas patroli mendekati lokasi.

"Mereka awalnya konvoi dengan 7 motor boncengan, kemudian pada saat anggota patroli menghampiri mereka melarikan diri dan tujuh pelajar diamankan saat akan diduga tawuran di Pasar Depok. Untuk tiga lainnya diamankan di tempat lain," jelasnya.

Patroli dipimpin langsung Hendri dengan melibatkan 214 personel gabungan. Personel tersebut berasal dari unsur Polri, TNI, pemerintah kecamatan, serta elemen masyarakat.

Sejumlah titik yang disisir meliputi kawasan Telkom Jatinegara, Pos Pantau Pasar Deprok, Pos Pantau Rumah Dinas Lurah CBS, Pintu Tol Pedati, Jembatan Serong, hingga Tongtek Jatinegara Barat.

Dalam arahannya, Hendri meminta seluruh personel meningkatkan kesiapsiagaan, terutama di wilayah Jatinegara yang dinilai memiliki potensi tawuran antarwarga maupun kelompok.

"Patroli ini merupakan langkah preventif untuk mencegah kejahatan jalanan dan tawuran. Saya minta seluruh personel tetap waspada, mengedepankan sikap humanis, serta segera melaporkan apabila ditemukan kejadian menonjol," jelasnya.

Polisi Imbau Orang Tua Awasi Aktivitas Anak

Patroli gabungan tersebut difokuskan untuk mengantisipasi sejumlah tindak kriminalitas, mulai dari pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, pencurian kendaraan bermotor, hingga aksi tawuran.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto turut mengimbau para orang tua agar meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas anak-anak, khususnya pada malam hari.

"Apabila mengetahui adanya tindak kriminalitas atau gangguan Kamtibmas, masyarakat diharapkan segera melapor kepada pihak kepolisian melalui layanan Call Center 110 agar dapat segera ditindaklanjuti," kata …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

EDUKASI

Pengalaman 27 Tahun, Dr. Mukhsinuddin Maju Calon Ketua STAIN Meulaboh

Oleh Biro Meulaboh · 23 Nov, 17.57 WIB



Calon Ketua STAIN Meulaboh, Dr. H. Mukhsinuddin, S. Ag. M.M,FOTO/ist

MEULABOH – Dr. H. Mukhsinuddin, S.Ag., M.M., resmi mendaftarkan diri sebagai bakal calon Ketua STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh untuk periode 2027–2031. Berkas pendaftarannya diterima panitia seleksi pada Senin (23/11/26) di Meulaboh, Aceh Barat.

Pencalonan tersebut dilakukan menjelang berakhirnya masa jabatan Ketua STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh periode 2023–2027 pada Februari 2027 mendatang.

Mukhsinuddin mengatakan, pencalonannya didasarkan pada komitmen untuk membawa kampus tersebut semakin maju melalui tiga visi utama, yakni membangun kampus bermutu, berdaya saing, serta berkarakter dengan landasan iman dan takwa (imtaq) serta ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek).

"Saya ingin membangun kampus yang bermutu, berdaya saing dengan perguruan tinggi lainnya, serta memiliki karakter yang berlandaskan imtaq dan iptek," ujarnya saat diwawancarai di Meulaboh.

Ia mengaku telah mengabdi di STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh selama lebih dari 27 tahun. Sepanjang pengabdiannya, Mukhsinuddin pernah menjabat Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Wakil Ketua Bidang Akademik dan Kelembagaan, serta kini dipercaya sebagai Ketua Program Studi Magister Ekonomi Syariah (MES).

Selain itu, ia juga mendapat amanah sebagai Ketua Panitia Transformasi STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Teungku Dirundeng Meulaboh.

Menurutnya, keikutsertaannya dalam penjaringan calon ketua merupakan ikhtiar untuk membangun kampus melalui kebersamaan dan memperkuat peran perguruan tinggi kebanggaan masyarakat Barat Selatan Aceh tersebut.

Ia juga menyebut dukungan sahabat, alumni, keluarga, dan berbagai pemangku kepentingan menjadi salah satu dorongan untuk mengikuti proses pencalonan.

Mukhsinuddin berharap seluruh tahapan seleksi berjalan lancar dan meminta doa serta dukungan dari civitas akademika maupun masyarakat agar niatnya memajukan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh dapat terwujud.[]

Editorial: Biro Meulaboh.

LIFESTYLE

Harta Amran Sulaiman Jauh Lebih Kaya dari Sugiono

Oleh Redaksi · 23 Nov, 19.09 WIB



BANDA ACEH -Presiden Prabowo Subianto resmi mengusulkan dua nama kandidat Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Senin, 23 November 2026.

Dua nama yang diusulkan tersebut adalah Andi Amran Sulaiman yang saat ini menjabat Menteri Pertanian dan Sugiono yang saat ini menjabat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK). Usulan itu disampaikan langsung Prabowo kepada MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

"Bersama ini saya mengusulkan dua calon Wakil Presiden Republik Indonesia yaitu, Satu, Andi Amran Sulaiman. Dua, Sugiono. Berkenaan dengan hal tersebut, saya mengharapkan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dapat menindaklanjuti usulan dimaksud," kata Ketua MPR, Ahmad Muzani, membacakan surat dari Presiden Prabowo.

Dari sisi harta kekayaan, penelusuran RMOL di website Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Amran tercatat memiliki kekayaan jauh lebih besar dibandingkan Sugiono.

Berdasarkan LHKPN periodik 2025, kekayaan Amran mencapai Rp1.721.413.658.505 (Rp1,72 triliun). Sementara itu, total kekayaan Sugiono tercatat sebesar Rp13.153.336.184 (Rp13,15 miliar). Dengan demikian, terdapat selisih kekayaan keduanya sebesar Rp1.708.260.322.321 atau sekitar Rp1,7 triliun. Kekayaan Amran tercatat sekitar 130 kali lipat dibandingkan Sugiono.

Berdasarkan data LHKPN KPK, Amran menyampaikan laporan periodik 2025 pada 14 Maret 2026. Laporan tersebut berstatus verifikasi administratif lengkap dan mencatat jabatannya sebagai Menteri Pertanian.

Harta kekayaan Amran terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp304.120.937.750 (Rp304,12 miliar), alat transportasi dan mesin Rp18.664.760.000 (Rp18,66 miliar), harta bergerak lainnya Rp2.814.812.500 (Rp2,81 miliar), surat berharga Rp1.113.894.000.000 (Rp1,11 triliun), kas dan setara kas Rp595.749.878.155 (Rp595,74 miliar), serta harta lainnya Rp38.520.100 (Rp38,52 juta).

Dalam laporan tersebut, Amran juga mencatat utang sebesar Rp313.869.250.000 (Rp313,86 miliar). Setelah dikurangi utang, total kekayaan bersihnya mencapai Rp1.721.413.658.505 (Rp1,72 triliun).

Dari 60 bidang tanah dan bangunan yang dilaporkan, sejumlah aset bernilai besar berada di Jakarta Selatan dan Makassar. Di antaranya tanah seluas 7.000 meter persegi di Jakarta Selatan senilai Rp62.817.371.863 (Rp62,81 miliar), tanah seluas 3.275 meter persegi di Makassar senilai Rp49,125 miliar, serta tanah seluas 460.000 meter persegi di Makassar senilai Rp23 miliar.

Untuk alat transportasi dan mesin, Amran melaporkan 10 kendaraan dengan total nilai Rp18.664.760.000 (Rp18,66 miliar).

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ISLAM

Hujan Turun, Bara Tetap Menyala: Rakyat Terancam Krisis Pangan dan Air

Oleh Eviyanti · 23 Nov, 15.25 WIB



Jejak kehancuran akibat kebakaran hutan yang menyisakan asap dan tanah gersang bagi warga sekitar.

USIM hujan mulai membawa harapan bagi wilayah yang dilanda kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Namun, turunnya hujan ternyata belum sepenuhnya mampu memadamkan kebakaran, terutama di lahan gambut.

Seperti dikutip dari media online Detik.com, Senin (2/11/2026), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan jumlah titik karhutla di Indonesia mulai menurun akibat hujan.

Meski demikian, api yang berada di bawah permukaan tanah gambut masih berpotensi memicu kebakaran baru.

Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menyampaikan bahwa total luas lahan yang terbakar mencapai 742 hektare.

Penurunan kebakaran terjadi di Kalimantan. Namun, bara api di bawah permukaan tanah belum sepenuhnya padam meskipun hujan telah turun.

Peristiwa ini menjadi peringatan bahwa karhutla tidak bisa dianggap selesai hanya karena intensitas hujan meningkat.

Kebakaran yang terjadi di kawasan hutan dan lahan gambut dapat menimbulkan pencemaran udara, gangguan kesehatan, kerusakan ekosistem, serta terganggunya sumber air dan lahan pertanian.

Jika tidak ditangani secara menyeluruh, kondisi ini berpotensi mengancam ketersediaan pangan dan air bersih bagi masyarakat.

Karhutla yang terus berulang menunjukkan adanya persoalan serius dalam tata kelola hutan dan lingkungan.

Mengapa bencana ini terus terjadi?

Salah satu persoalan yang perlu dikritisi adalah pengelolaan sumber daya alam yang lebih mengutamakan kepentingan ekonomi dibandingkan kelestarian lingkungan dan keselamatan rakyat.

Dalam sistem kapitalisme, sumber daya alam kerap dipandang sebagai komoditas yang dapat dieksploitasi untuk menghasilkan keuntungan.

Ketika pengawasan dan penegakan hukum tidak berjalan optimal, kerusakan lingkungan berpotensi terus berulang.

Akibatnya, masyarakat menjadi pihak yang paling menanggung dampak, mulai dari gangguan kesehatan hingga ancaman kehilangan sumber penghidupan.

Padahal, hutan merupakan bagian penting dari keseimbangan ekosistem.

Kerusakannya tidak hanya berdampak pada lingkungan sekitar, tetapi juga dapat mengganggu kehidupan masyarakat secara luas.

Oleh karena itu, penanganan karhutla tidak cukup hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi harus menyentuh akar persoalan, termasuk tata kelola lahan dan pengawasan terhadap aktivitas manusia.

Lalu bagaimana dalam pandangan Islam?

Dalam Islam, negara berkedudukan sebagai ra'in (pengurus dan pelindung rakyat) yang bertanggung jawab menjamin kesejahteraan serta keselamatan masyarakat.

Rasulullah SAW bersabda:

"Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya." (HR. Bukhari dan Muslim).

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

SEJARAH

Merawat Jejak Tan Malaka DI Tanah Subulussalam: Dari Lae Betar Hingga Penanggalan, Sejarah Yang Menunggu Untuk Diungkap

Oleh Wahda · 23 Nov, 13.00 WIB



Menjaga warisan budaya melalui cerita dan dokumentasi sejarah dari generasi tua ke generasi muda.

Oleh: Wahda, SE((Pemerhati Media Sosial Kota Subulussalam))

EJARAH sebuah daerah tidak selalu tertulis dalam buku-buku resmi. Ada kalanya, perjalanan masa lalu justru tersimpan dalam ingatan masyarakat, diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui cerita para orang tua, tokoh adat, maupun keluarga yang diyakini memiliki hubungan dengan suatu peristiwa sejarah.

Salah satu kisah yang menarik untuk ditelusuri adalah dugaan jejak Tan Malaka di wilayah yang kini dikenal sebagai Kota Subulussalam, Aceh.

Sebuah cerita yang hingga kini masih menjadi perbincangan di kalangan sebagian masyarakat, terutama mengenai kemungkinan perjalanan dan keberadaan tokoh pergerakan nasional tersebut di kawasan Sultan Daulat hingga Penanggalan.

Tan Malaka, yang memiliki nama lengkap Ibrahim Datuk Tan Malaka, merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Lahir di Pandam Gadang, Sumatera Barat, pada 2 Juni 1897, ia dikenal sebagai pemikir, penulis, pendidik, sekaligus pejuang yang memiliki pemikiran kritis terhadap kolonialisme.

Perjalanan hidupnya penuh dengan perjuangan, pengasingan, dan perpindahan dari satu wilayah ke wilayah lainnya.

Di tengah cerita yang berkembang di masyarakat Subulussalam, terdapat penuturan mengenai sosok Ayahanda M. Bustami Meuraxa yang disebut memiliki hubungan dekat dengan Tan Malaka.

Dalam kisah yang diwariskan tersebut, Tan Malaka disebut pernah menggunakan nama samaran Bustami.

Bahkan, terdapat cerita mengenai percakapan antara Tan Malaka dengan M. Bustami Meuraxa tentang makna nama Bustami.

Nama tersebut konon diuraikan menjadi BUS berarti Penggerak, TA berarti Tan, M berarti Malaka, dan I berarti Indonesia.

Sebuah ungkapan yang kemudian dimaknai sebagai pesan tentang penggerak Tan Malaka Indonesia.

Cerita ini tentu menarik untuk didalami. Namun, yang lebih menarik adalah penuturan masyarakat mengenai dugaan perjalanan Tan Malaka di sejumlah kawasan Subulussalam.

Dalam cerita yang berkembang, Tan Malaka disebut pernah berada di kawasan Lae Betar, Kampong Pasir Belum, Kecamatan Sultan Daulat.

Dari kawasan tersebut, menurut penuturan sebagian masyarakat, ia kemudian berpindah ke wilayah Penanggalan.

Tidak berhenti di situ, muncul pula cerita bahwa selama berada di kawasan tersebut, Tan Malaka diduga pernah menikah dengan seorang perempuan setempat.

Siapa perempuan tersebut?

Apakah masih terdapat keturunan atau keluarga yang mengetahui cerita itu?

Adakah dokumen maupun peninggalan yang dapat menjelaskan kisah tersebut?

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

REDAKSI

PENERBIT: PT. Harian Aceh Indonesia
PEMIMPIN REDAKSI: Muhammad Saman
REDAKTUR PELAKSANA: Adam
REDAKTUR: Hayat
SEKRETARIS REDAKSI: Ola

Jurnalis
Banda Aceh:
1. IRWAN SAPUTRA - NOMOR 12334-PWI/WDa/DP/XII/2017/01/01/912.
2. Hamdani

Bireuen:
1. M. Ilham Sakubat

Lhokseumawe:
1. Yoppi

Aceh Barat:
1. Kurniawan

Jawa Timur:
1. Rut Sriwahyuni

Fotografer:
1. Mishabul Amin
2. Nazaruddin

Social Media Manager:
1. Syukur M. Amin